

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA: DUKUNG LAHIRNYA UU TENTANG MPR

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN



EDISI NO.10/TH.XIV/OKTOBER 2020



PILKADA **SERENTAK** 2020

KUNCINYA, TEGAKKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT DAN DISIPLIN



ISSN 0854-6371
9 770854 637158

06 Perspektif
Urgensi Kebersamaan dan Gotong Royong

18 Nasional
Press Gathering Pimpinan MPR Dengan Wartawan Parlemen

39 Selingan
Memperluas Pengaruh Bangun Pangkalan Militer

50 Sosialisasi
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Ala Panggung Toktan



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



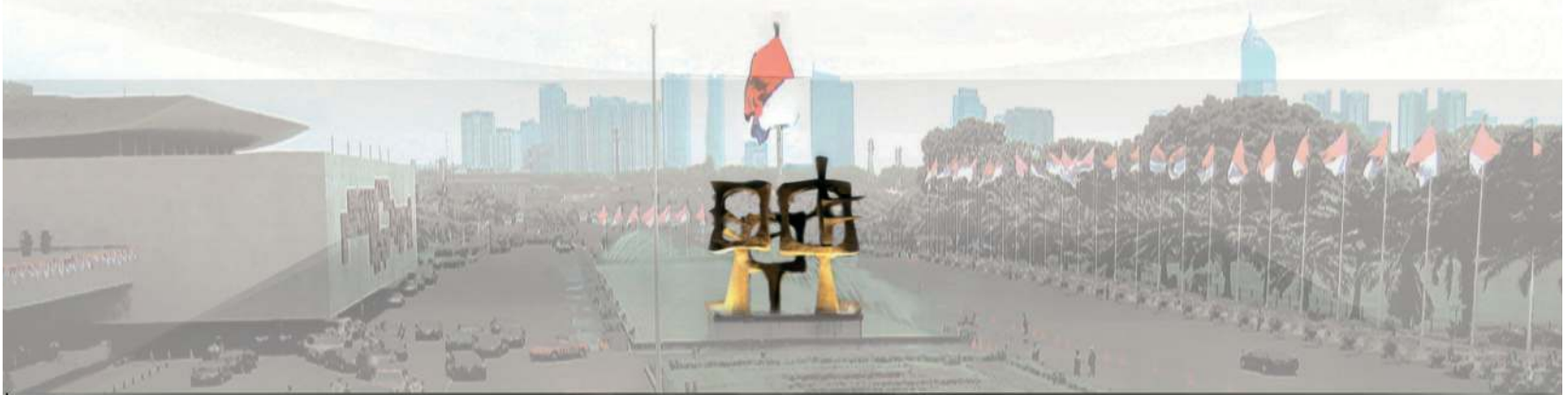
EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



EMPAT PILAR MPR

PANCASILA, ULUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



INDONESIA

MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi



08 BERITA UTAMA

Pilkada Serentak Tahun 2020

Setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Ini cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan mengatasi ketakutan untuk hadir di bilik suara.



18 Nasional

Press Gathering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen



50 Sosialisasi

Sosialisasi Empat Pilar ala Pangung Toktan Riau



39 SELINGAN

Bangun Pangkalan Militer



76 Profil

M. Idris Laena

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	26
Gema Pancasila	36
Aspirasi Masyarakat	47
Varia MPR	66
Wawancara	68
Bedah Buku	71
Figur	72
Ragam	74
Dari Rumah Kebangsaan	80
Rehal	82



COVER
Edisi No.10/TH.XIV/Oktober 2020
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa



Budi Muliawan
Redaktur Pelaksana

Pengantar Redaksi

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Artinya, Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda. Kesepakatan ini merupakan kesimpulan rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 21 September 2020.

Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menilai seluruh tahapan Pilkada Serentak yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan situasi masih terkendali. Karena itu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah memasuki tahap kampanye yang dimulai sejak 26 September 2020. Sesuai tahapan Pilkada sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan kampanye dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Sebelumnya, KPU telah terlebih dahulu menetapkan pasangan calon serta mengundi nomor urut masing-masing paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020.

Pada tahun ini Pilkada Serentak dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Jumlah ini lebih besar dibandingkan Pilkada Serentak sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 171 daerah, tahun 2017 sebanyak 101 daerah, dan pada tahun 2015 sebanyak 269 daerah. Dengan berlandaskan Perppu No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang semula digelar pada

23 September 2020, secara resmi diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Namun, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah masih tingginya kasus positif Covid-19 telah menandai polemik, terutama soal keselamatan jiwa penyelenggara, peserta, dan masyarakat pemilih dalam Pilkada Serentak. Sebab, pandemi Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya dan belum mereda. Sebagian kalangan mengkhawatirkan Pilkada Serentak justru memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19 karena terjadi kerumunan, seperti pada saat pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara.

Tidak heran bila beberapa kalangan dan organisasi kemasyarakatan, sebut saja misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak karena masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Namun, di tengah desakan untuk menunda Pilkada Serentak, agaknya DPR, Pemerintah, dan penyelenggara Pemilu tetap pada rencana semula menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 dengan syarat penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Terlepas dari polemik pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, ada sebuah catatan terkait dengan kelembagaan MPR dengan Pilkada Serentak 2020 ini. Yaitu, rekomendasi visi dan misi NKRI dalam Pilkada Serentak 2020. Para calon kepala daerah pada saat menyusun naskah visi, misi, dan program haruslah tetap merujuk pada visi misi negara, bukan visi misi perseorangan atau kelompok.

Intinya, naskah visi, misi, dan program pasangan calon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). MPR menyampaikan rekomendasi ini kepada lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilu dan Pilkada. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'rif Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Yana Indrawan, Dyastasisa,

Heri Herawan, Mafrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Muliawan

KOORDINATOR REPORTASE

Ario Setiawan

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,

Sucipto, Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Ana Suzana, Bayu Nugroho,

Tengku Novan Muda Mulya,

Yenita Revi, Ikhwan Bimo F,

Amelia Rubinta

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

PENANGGUNG JAWAB/

KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayatati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Armansyah,

Dhita Fitasari Junaid

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

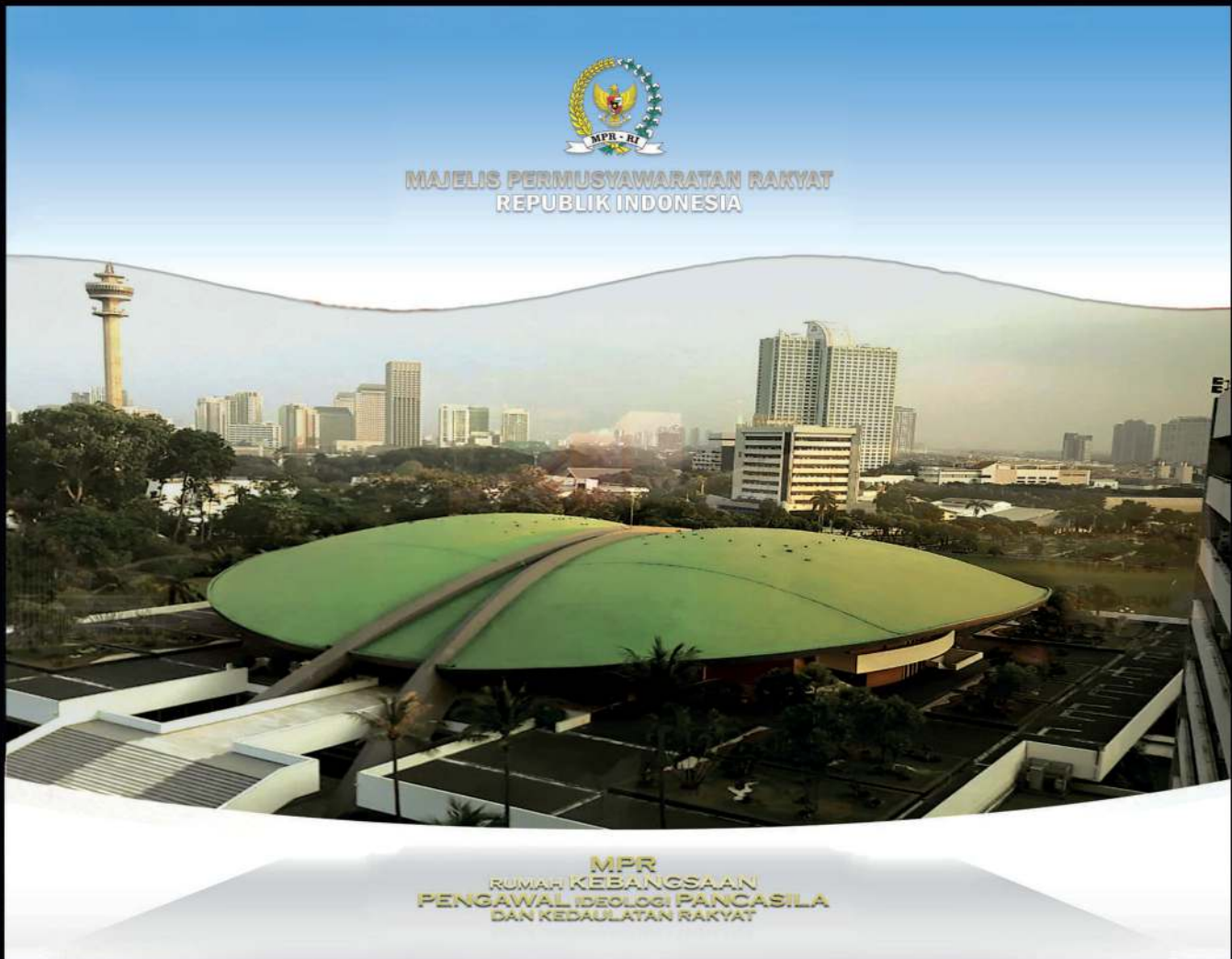
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



EMPAT PILAR MPR RI

- Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
- UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
- NKRI Sebagai Bentuk Negara
- Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO

Urgensi Kebersamaan dan Gotong Royong Menghadapi Pandemi Covid-19

PANDEMI Covid-19 belum memperlihatkan tanda-tanda mereda. Secara global jumlah kasus positif Covid-19 di dunia terus bertambah. Angka kasus positif Covid-19 di dunia sudah melampaui 33,7 juta orang (data 30/9/2020). Pun demikian di Indonesia. Beberapa hari terakhir pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia setiap hari selalu memecahkan rekor, pernah melampaui 4.000 orang dalam satu hari (data 30/9/2020). Kini angka kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah melewati 287.000 kasus (data pada 30 September 2020). Jumlah angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 10.740 orang di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Ini menjadi “alarm” bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Kapan pandemi Covid-19 ini berakhir masih menjadi tanda tanya. Para ahli mengakui sulit memprediksi karena virus ini benar-benar baru dan dunia belum pernah menghadapi pandemi sebesar seperti ini. Ketika vaksin ditemukan dan produksi, virus Corona akan tetap ada dan terus menghantui populasi manusia. Karena itu, ada pandangan bahwa Covid-19 tidak akan musnah atau hilang, dan orang-orang sudah mulai bosan sehingga pada akhirnya hidup berdampingan dengan Covid-19, kemudian memasuki kehidupan new normal.

Di Indonesia pandemi Covid-19 belum mencapai puncaknya. Perkiraan sebelumnya menyebutkan puncak pandemi Covid-19 di Indonesia terjadi pada akhir Juli 2020 dengan jumlah 106.287 kasus. Ada juga yang memprediksi wabah Covid-19 ini berakhir pada rentang Juli – September 2020. Terakhir, Presiden Joko Widodo memprediksi puncak pandemi Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada Agustus atau September 2020. Namun, semua prediksi meleset dan ujung puncak Covid-19 belum terlihat.

Semula pandemi Covid-19 membuat krisis kesehatan. Virus Corona menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat global dan nasional karena menular dengan begitu cepat dan masif. Dari krisis kesehatan, pandemi Covid-19 berimbas pada ekonomi global maupun nasional. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 ini minus 5,2%. Bank Dunia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 0%. Tak jauh berbeda, Bank Indonesia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 0,9% – 1,9%. Artinya, pada 2020 ekonomi Indonesia tidak tumbuh sama

sekali atau mengalami stagnan. Ancaman resesi menghantui perekonomian Indonesia.

Serangkaian kebijakan untuk menekan penyebaran Covid-19 membuat ekonomi tidak bergerak. Kebijakan itu mulai dari diam di rumah, bekerja di rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan roda ekonomi terhenti. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi terganggu. Sektor riil paling terkena dampak pandemi Covid-19, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penopang ekonomi Indonesia. Sebanyak 47% UMKM terkena dampak pandemi Covid-19. Di Indonesia tercatat ada sekitar 60,6 juta UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga pembiayaan formal dan 23 juta KUMKM (Koperasi – UMKM) yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

Kini masalah yang dihadapi adalah bagaimana memulihkan ekonomi di tengah ancaman Covid-19. Kehidupan new normal menjadi satu pilihan dan sebuah keniscayaan. Dengan new normal, masyarakat beradaptasi dengan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) di tempat publik. Seolah-olah kembali normal, masyarakat memulai kembali aktivitas sosial dan ekonomi dengan mematuhi protokol kesehatan. Roda ekonomi mulai berdenyut. Namun, di sisi lain, justru jumlah kasus Covid-19 semakin melonjak. Bahkan, kasus positif Covid-19 Indonesia kini sudah jauh melampaui Tiongkok, tempat di mana virus ini pertama kali berasal.

Kebersamaan dan Gotong Royong

Tentu saja beban negara semakin berat menghadapi krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Pemerintah sudah mengambil langkah dan mengeluarkan kebijakan, termasuk menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah disetujui DPR menjadi undang-undang. Namun, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh elemen masyarakat harus berperan serta membantu pemerintah untuk keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi ini. Dengan kata lain, seluruh elemen masyarakat harus mempunyai kepedulian dan kesadaran kolektif yang solid dan kuat untuk bersama-sama berupaya mengatasi pandemi Covid-19 dan segala dampaknya. Kepedulian dan kesadaran kolektif bangsa Indonesia ini semestinya

Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.
Sekretaris Jenderal MPR RI



melahirkan kebersamaan dan gotong royong saling bahu membahu menekan penyebaran Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi.

Sejak dulu semangat kebersamaan dan gotong royong sudah menjadi modal sosial bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Nilai gotong royong inilah yang dirasakan dan ditangkap Bung Karno ketika merenung di bawah pohon Sukun, di sebuah taman ketika diasingkan ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 1934 – 1939. Kini taman itu dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno atau sering disebut Taman Renungan Pancasila. Di taman itulah, Bung Karno merenungkan tentang Pancasila. Bung Karno menggali dan menangkap nilai-nilai yang inheren dalam pribadi masyarakat Indonesia. Hasil renungan itu dilontarkan Bung Karno dalam pidato pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dan, gotong royong menjadi sentral, seperti kutipan pidato Bung Karno di depan sidang BPUPKI ini.

“....Jadi, yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: sosio-nationalisme, sosio-demokratie, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Gotong Royong.”

Bung Karno melanjutkan, “Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

Bung Karno merasakan adanya ruh gotong royong yang inheren dalam setiap pribadi rakyat Indonesia. Kita pun bisa bertanya adakah ruh gotong royong itu pada diri kita masing-masing. Ruh gotong royong inilah yang menggerakkan setiap tahapan dan proses bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Setelah merdeka pun, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi pondasi bagi berdirinya negara Indonesia sampai sekarang. Falsafah gotong royong masyarakat kita berbeda dengan masyarakat Barat yang cenderung individualistis.

Kiranya energi positif kebersamaan dan gotong royong sebagai karakter asli bangsa Indonesia diperlukan untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Inilah momentum memupuk kebersamaan, gotong royong, solidaritas, saling menguatkan, dan toleransi. Salah satu wujudnya adalah dengan bergotong royong saling berbagi, membantu dan meringankan beban sesama saudara sebangsa dan setanah air, seperti berbagi makanan, sembako, menggerakkan sektor informal.

Mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan) juga bagian dari kebersamaan dan gotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Tanpa disiplin dan gotong royong mematuhi aturan dan kebijakan maka kita tidak dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perlu ditumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kita semua senasib sepenanggungan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Saatnya untuk menyingkirkan segala sekat-sekat karena perbedaan agama, suku, ras, dan golongan, serta perbedaan politik. Kita mesti bersatu, bersama-sama dan bergotong royong mengatasi pandemi Covid-19. Kebersamaan dan gotong royong menjadi jalan bagi bangsa Indonesia menghadapi dan melawan pandemi Covid-19. □

Pilkada Serentak 2020

Kuncinya **Tegakkan** Protokol Kesehatan Secara Ketat dan Disiplin

Setiap tahapan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Ini cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan mengatasi ketakutan untuk hadir di bilik suara.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MAJELIS Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah taklimat yang diterbitkan pada Selasa, 29 September 2020. Tertulis dalam taklimat MUI itu : “Demi menjaga keselamatan jiwa manusia (hifzhu an nafs) yang harus didahulukan seperti saat ini sesuai dengan kaidah (dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih) dan sesuai dengan amanat konstitusi seperti terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, maka pelaksanaan Pilkada pada Desember tahun 2020 harus ditunda hingga pandemi Covid-19 transmisinya melandai (R<0).”

Dengan taklimat itu, MUI meminta pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Menurut MUI, jika pemerintah, DPR, dan KPU tetap menjalankan Pilkada Serentak maka harus diikuti dengan aturan yang sangat ketat. Para ulama meminta pemerintah menindak tegas siapa pun yang mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Bukan hanya MUI, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga mendesak kepada pemerintah, DPR, dan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 ditunda demi menjaga kesehatan rakyat.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” kata Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Ahad, 20 September 2020.

Pernyataan sikap itu menyebutkan, meskipun Pilkada Serentak dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat tetap akan sulit menghindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam setiap tahapan Pilkada. NU juga meminta agar anggaran Pilkada Serentak direalokasikan untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, dalam pernyataannya menilai momentum Pilkada Serentak sangat berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19. “Demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, dalam keterangan pers secara virtual pada Senin, 21 September 2020.

Selain MUI, dan dua Ormas Islam terbesar di Indonesia, beberapa kalangan juga mendesak agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melihat, Pilkada Serentak 2020 perlu ditunda karena masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Hal serupa juga disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurut Komisioner Komnas



HAM, Hariansyah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pilkada Serentak masih dimungkinkan untuk ditunda. “Ada ketentuan mempertimbangkan penundaan karena pandemi dan bisa dilanjutkan kalau pandemi ini sudah berakhir. Jadi, ada syarat undang-undang yang terpenuhi untuk dilakukan penundaan,” katanya dalam Webinar pada Kamis, 17 September 2020.

Meski ada desakan untuk menunda Pilkada Serentak 2020, namun Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah bersepakat untuk tidak menunda Pilkada Serentak 2020. Kesepakatan itu merupakan kesimpulan dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 21 September 2020.

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah



Ahmad Doli Kurnia

dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada

Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, ketika membacakan kesimpulan rapat kerja.

Ketika belum terjadi pandemi Covid-19, Pilkada Serentak direncanakan pada 23 September 2020. Namun, wabah Covid-19 mengganggu tahapan Pilkada Serentak 2020. Rapat dengar pendapat Komisi II DPR, pemerintah, dan KPU pada 27 Mei 2020 menawarkan tiga opsi penundaan Pilkada Serentak, yakni Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. Dengan berlandaskan Perppu No. 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2020, akhirnya diputuskan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang semula digelar pada 23 September 2020 resmi diundur menjadi 9 Desember 2020.

Pada tahun ini Pilkada Serentak dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota, dan 9 provinsi di Indonesia. Jumlah ini lebih

besar dibandingkan Pilkada Serentak sebelumnya pada 2018 sebanyak 171 daerah, tahun 2017 sebanyak 101 daerah, dan pada 2015 sebanyak 269 daerah. Saat ini tahapan Pilkada Serentak 2020 sudah memasuki tahap kampanye yang dimulai sejak 26 September 2020. Sesuai tahapan Pilkada sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, kampanye dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Sebelumnya, KPU telah terlebih dahulu menetapkan pasangan calon serta mengundi nomor urut masing-masing paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020.

Sebagai catatan, Bawaslu menemukan pelanggaran setidaknya di 243 daerah pada masa pendaftaran. Lalu ada 18 pelanggaran protokol kesehatan dalam dua hari pertama masa kampanye. Beberapa hari terakhir pertambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia setiap hari selalu memecahkan rekor, pernah melampaui 4.000 orang dalam satu hari (data 30/9/2020). Kini angka kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah melewati 287.000 kasus (data pada 30 September 2020). Jumlah angka kematian akibat Covid-19 sebanyak 10.740 orang di Indonesia, tertinggi di Asia Tenggara.

Protokol Kesehatan yang Ketat

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai, Pilkada Serentak sebagai agenda ketatanegaraan sangat penting. Karena itu, Pilkada Serentak 2020 sebaiknya tetap berlangsung. “Pasti ada langkah-langkah yang baik untuk melakukan adaptasi ke arah itu,” ujarnya kepada *Majelis*.

“Jika penyelenggaraan Pilkada Serentak dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, saya rasa akan meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 sehingga tidak terjadi klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada,” sambungnya.

Untuk itu, Jazilul meminta pemerintah dan penyelenggara Pilkada melakukan pemetaan seputar zona-zona penyebaran Covid-19. Penyelenggaraan Pilkada disesuaikan dengan zona-zona itu. Misalnya, di zona hijau dilakukan Pilkada secara normal, namun dengan protokol kesehatan. Di zona merah atau hitam dilaksanakan Pilkada dengan teknis yang disesuaikan, misalnya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat atau menggunakan teknologi, atau lainnya.



Jazilul Fawaid

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo. “Kata kuncinya adalah menerapkan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada secara disiplin dan ketat. Protokol kesehatan ini justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan sehingga mengatasi ketakutan masyarakat untuk hadir di bilik-bilik suara,” katanya kepada *Majelis*.

Arif Wibowo menjelaskan, KPU sudah mengakomodasi protokol kesehatan dalam rangka mengatasi penyebaran Covid-19, yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah dan disempurnakan dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Dalam PKPU itu berisi ketentuan membatasi pertemuan tertutup, pertemuan dialog, atau



Arif Wibowo

kegiatan yang mengumpulkan orang di ruang tertutup dibatasi maksimal 50 orang dan menjaga jarak minimal 1 meter.

Selain itu juga keharusan untuk memakai masker secara benar serta mengupayakan agar setiap kegiatan yang menghadirkan masyarakat luas tersebut dilakukan melalui media daring (online). “Sekarang tinggal kemauan dari berbagai pihak yang terlibat Pilkada ini agar mematuhi regulasi itu, mulai dari partai politik, tim kampanye, pasangan calon, hingga penyelenggara itu sendiri, serta masyarakat sebagai peserta aktif dari setiap tahapan Pilkada Serentak,” katanya.

Dia menambahkan, institusi pengawas Pilkada perlu mempertegas pelaksanaan protokol kesehatan ini dan memastikan semua pihak yang terlibat Pilkada Serentak mematuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. “Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan memasukkan protokol kesehatan ke dalam setiap tahapan Pilkada yang disertai pemberian sanksi bagi yang melanggarnya,” tegasnya.

Menurut Arif Wibowo, penundaan Pilkada Serentak justru bisa menimbulkan kompleksitas konstitusional. Hal ini terkait dengan konstitusionalitas masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2014, masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. “Menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 dapat mengurangi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 yang berpotensi melanggar konstitusionalitas masa jabatan kepala daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Arif Wibowo, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 berakhir antara Februari sampai dengan September 2021. Maka, dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tersebut, secara total diperlukan 261 penjabat kepala daerah kabupaten/kota, dan 9 penjabat kepala daerah provinsi. “Penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 mengakibatkan daerah-daerah tersebut dipimpin oleh penjabat kepala daerah untuk waktu yang tidak ditentukan karena menunggu pandemi Covid-19 berakhir. Hal

ini akan mengganggu jalannya administrasi pemerintahan daerah terkait,” katanya.

Tak jauh berbeda dengan Arif Wibowo, anggota MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Aminurokhman, juga setuju bila Pilkada Serentak tetap dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat sebagaimana diatur KPU melalui revisi KPU yang terbaru (Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020) dan koordinasi intensif dengan gugus tugas Covid-19 di masing-masing daerah.

“Sesuai hasil rapat komisi II DPR dengan pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Pilkada Serentak tetap dilaksanakan dengan memerhatikan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah kluster baru Pilkada. Di samping itu, ada pertimbangan lain, jika Pilkada Serentak tidak dilaksanakan pada 2020 ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah,” kata anggota Komisi II DPR ini kepada *Majelis*.

Karena itu, untuk mencegah terjadinya kluster baru dalam momen Pilkada Serentak, tambah Aminurokhman, harus dilakukan upaya pencegahan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan fungsi gugus tugas Covid-19, di samping itu penyelenggara Pilkada, peserta, dan masyarakat harus patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19.

Pendapat berbeda dikemukakan anggota MPR dari Kelompok DPD, Fahira Idris, yang justru meminta agar Pilkada Serentak ditunda. “Sejak awal, bahkan sebelum Perppu Pilkada diterbitkan, saya sudah sampaikan bahwa idealnya Pilkada ini ditunda hingga pandemi Covid-19 ini bisa kita kendalikan. Idealnya Pilkada kita gelar di September 2021. Sangat banyak pertimbangan rasional kenapa Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini tidak ideal untuk dilaksanakan. Jika Pilkada Serentak dipaksakan pada 9 Desember 2020, saya khawatir baik proses atau tahapan maupun hasilnya tidak maksimal. Selain soal keselamatan, hal lain yang perlu dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi akan merosot,” papar Fahira Idris kepada *Majelis*.

Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta ini juga melihat adanya kekhawatiran Pilkada Serentak menjadi kluster baru penyebaran



Aminurokhman

Covid-19. “Saya sudah melihat potensi itu di awal-awal tahapan Pilkada Serentak,” ujarnya. Dia memberi contoh pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menemukan sebanyak 243 bakal paslon yang diduga melanggar protokol kesehatan Covid-19 saat mendaftar ke KPU Daerah. Pada 10 September 2020, KPU merilis data bahwa tercatat ada 60 calon kepala daerah terpapar Covid-19 yang tersebar di 21 provinsi. Beberapa penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) di daerah juga diketahui positif Covid-19.

Visi Misi NKRI

Terlepas dari polemik Pilkada Serentak yang masih bergulir, ada catatan lain dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini. Catatan itu berkaitan dengan kelembagaan



Fahira Idris

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

MPR RI. Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, MPR telah menyusun Rekomendasi tentang Penetapan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan Badan Pengkajian MPR dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi. MPR pun akan menyampaikan rekomendasi itu kepada penyelenggara pemilu.

Fahira Idris menilai, visi NKRI dalam Pilkada Serentak memang harus ditegaskan dalam visi misi dan program calon kepala daerah. Ini dimaksudkan agar semua kepala daerah tidak mendasarkan visi misi dan program hanya berorientasi pada pasar suara atau liberalisme suara yang terjadi di setiap daerah atau konstituennya.

“Poin penting dari rekomendasi MPR ini adalah terkait dengan integrasi visi dan misi calon kepala daerah dengan visi NKRI. Ini harus diimplementasikan ke tataran teknis setelah mendapat penguatan atau masukan dari publik dan berdasarkan kajian akademis,” katanya.

Aminurokhman juga menilai, rekomendasi MPR tersebut sebagai hal yang positif. “Rekomendasi ini wajib diwujudkan oleh KPU dan peserta Pilkada untuk melahirkan kepala daerah yang memiliki visi kenegaraan yang utuh, memiliki integritas dan moralitas kebangsaan dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Arif Wibowo juga setuju dengan visi misi NKRI untuk dimasukkan dalam visi, misi, dan program calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2020 ini. “Saya sangat setuju dan memang sudah seharusnya setiap calon kepala daerah memiliki visi menegakkan NKRI sebagai komitmen bersama warga negara. Tidak hanya itu, setiap dokumen visi misi calon kepala daerah wajib berdasarkan atas Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan kebhinnekaan, selain penegakan NKRI tersebut,” katanya.

“Visi dan misi calon menjadi pedoman dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan. Visi misi merupakan dokumen penting yang diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jika calon kepala daerah terkait dilantik dan menjabat sebagai kepala daerah,” ucapnya. □

DER/EFP/BSC

Visi Misi NKRI Untuk Paslon Pilkada Serentak 2020

Gubernur, bupati, dan walikota yang akan berkontestasi pada Pilkada Serentak harus memiliki pemahaman visi misi NKRI agar pembangunan lebih terintegrasi dan mengacu pada SPPN dan RPJPN.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ADALAH Ketua MPR Bambang Soesatyo yang pertama kali mengungkapkan bahwa MPR telah menyusun Rekomendasi tentang Penetapan Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Rekomendasi ini merupakan hasil pembahasan yang dilakukan Badan Pengkajian MPR dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi. MPR pun akan menyampaikan rekomendasi itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“MPR akan merekomendasikan kepada KPU agar visi misi calon gubernur, bupati, walikota adalah bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila,” ungkap Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam Peringatan HUT Ke-75 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Seperti diketahui, di tengah masa pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah, serta penyelenggara Pemilu telah sepakat untuk menggelar Pilkada Serentak di

270 daerah pada 9 Desember 2020.

Secara garis besar, Bamsoet menjelaskan, visi misi NKRI itu mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). “Gubernur, bupati, dan walikota yang akan berkontestasi pada Pilkada Serentak harus memiliki pemahaman visi misi NKRI agar pembangunan lebih terintegrasi dan mengacu pada SPPN dan RPJPN,” ujarnya.

Visi misi NKRI itu dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan integrasi pembangunan nasional dan daerah. Visi dan misi tersebut memberikan kejelasan arah bagi perjuangan negara dan rakyat Indonesia agar ada rangkaian kontinuitasnya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun

1945 bisa terwujud.

Beberapa hari kemudian, terkait rekomendasi tersebut, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) menggandeng MPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Webinar Nasional dengan tema “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Pemilu dan Pilkada”. Webinar yang digelar pada Senin, 31 Agustus 2020, itu menghadirkan narasumber Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua DKPP Muhammad, serta Jerry Sumampow dan Khoirunnisa Nur sebagai pembahas.

Dalam Webinar ini, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan, Pimpinan MPR telah menerima rekomendasi dari Badan Pengkajian MPR dua minggu sebelum Webinar ini diselenggarakan. Materi rekomendasi tersebut berjudul tentang penetapan visi dan misi NKRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Rekomendasi itu muncul setelah Badan Pengkajian MPR melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden maupun calon kepala daerah. Dalam peraturan itu, setiap calon wajib menyertakan visi, misi serta programnya. “Itu tidak mengatur satu ketentuan bahwa visi misi dan program yang dibuat bersumber pada nilai-nilai Pancasila,” kata Basarah.

Menurut doktor ilmu hukum dari Universitas Diponegoro itu, visi misi dan program yang dituangkan para calon kepala daerah itu seakan milik sendiri. Padahal, katanya, Indonesia merupakan negara kesatuan dan terbagi atas kabupaten/kota. Jadi, seharusnya visi misi para calon kepala daerah itu

harus tetap merujuk pada visi misi negara, bukan visi misi perseorangan yang dibuat calon kepala daerah.

Basarah menambahkan, Badan Pengkajian MPR juga menemukan fakta di lapangan, yaitu pada umumnya sebagian calon kepala daerah pada saat menyusun naskah visi misi dan program, rumusannya dibuat hanya berorientasi pada pasar suara atau liberalisme suara yang terjadi di setiap daerah atau konstituennya saja. “Sehingga yang dipikirkan adalah apa yang diinginkan oleh calon pemilihnya, bukan yang dibutuhkan masyarakat sekitar, dan dibuat related dengan kabupaten-kabupaten lain atau provinsinya dengan NKRI,” katanya.

Mewakili MPR, politikus PDI Perjuangan itu berharap, agar PKPU yang mengatur syarat pendaftaran yaitu PKPU Nomor 3 Tahun 2017 perlu dilakukan perbaikan. Ia menyebut, rekomendasi MPR ini akan diberikan kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pilkada. “Inilah rekomendasi yang secara norma kelembagaan akan kami sampaikan kepada empat lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

Adapun isi rekomendasi MPR tersebut berbunyi :

Perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 42 ayat 91) huruf q yang awalnya mengatur: “Naskah visi, misi, dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah yang ditandatangani pasangan calon”.

Diubah menjadi: “Naskah visi, misi, dan program pasangan calon yang ditandatangani pasangan calon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi misi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau sebagai arah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) di segala bidang kehidupan, yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional.”

Dalam rangka menjamin kesatuan arah dan kesinambungan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka NKRI, para calon kepala daerah itu mestinya membuat naskah visi, misi, dan program kerja mereka semuanya mengacu, selaras, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi dan misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

“Dengan begitu, arah kebijakan dan program kerja para kepala daerah di seluruh Indonesia akan selaras dengan arah, kebijakan, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden yang ketika berkampanye mereka pun diwajibkan membuat visi dan



Ahmad Basarah

misi NKRI, dan berpedoman pada Pancasila saat berkampanye serta berbasis riset dan inovasi,” papar Basarah.

Webinar menghasilkan beberapa poin rekomendasi. Pendapat MPR yang diwakili Ahmad Basarah dimasukkan dalam poin keenam dari tujuh poin hasil Webinar yang ditandatangani para narasumber. Dalam rekomendasi itu, Webinar Nasional juga menyampaikan bahwa Pemilu harus menjadi bagian integral untuk mencapai tujuan negara dan memperkuat NKRI. Visi dan misi NKRI melalui Pemilu dan Pilkada harus dibuat dalam kerangka mencapai tujuan negara, melaksanakan pilar demokrasi, dan mewujudkan sistem politik dan pemerintahan yang efektif.

Pada bagian lain, rekomendasi itu juga menyatakan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus dilakukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan karena itu wajib berpedoman pada nilai-nilai ideologi Pancasila, visi dan misi NKRI, serta menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

“KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dalam jajaran masing-masing diharapkan selaras dan mendukung gagasan MPR RI dan Pemerintah untuk menegakkan implementasi visi dan misi NKRI melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tulis rekomendasi itu. □

BSC





Jazilul Fawaid Wakil Ketua MPR RI

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Perlu Pemetaan Zona

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus mematangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Pilkada Serentak 2020 ini memang berbeda dengan Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018. Sebab, Pilkada Serentak tahun ini digelar dalam suasana pandemi Covid-19. Banyak kalangan mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada Serentak justru menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.

Semula, Pilkada Serentak direncanakan pada 23 September 2020. Namun, karena pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, akhirnya berlandaskan Perppu No. 2 Tahun 2020, pelaksanaan Pilkada Serentak diundur menjadi 9 Desember 2020. Pada tahun ini Pilkada Serentak dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota yang tersebar di sembilan provinsi di Indonesia. Jumlah ini lebih besar dibandingkan Pilkada Serentak sebelumnya, pada tahun 2018

(171 daerah), 2017 (101 daerah), dan 2015 (269 daerah). Namun, di tengah masih tingginya kasus Covid-19, Pilkada Serentak menuai polemik, terutama masalah keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Untuk membahas persoalan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. Berikut wawancara dengan politisi PKB ini beberapa waktu lalu. Petikannya.

DPR dan pemerintah sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Padahal kasus positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Apa tanggapan Bapak?

Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Di sinilah rakyat memilih pemimpin-pemimpin daerahnya yang dianggapnya terbaik. Penyelenggaraan pilkada yang lalu-lalu memang berlangsung normal dan lancar, tapi kali ini sangat berbeda. Pilkada pada Desember nanti bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Ya

mudah-mudahan pada Desember nanti pandemi akan hilang. Tapi kalau pandemi masih ada maka akan menjadi berat buat kita semua.

Namun, sebagai agenda ketatanegaraan yang juga penting, Pilkada harus tetap berlangsung. Pasti ada langkah-langkah yang baik untuk melakukan adaptasi ke arah itu. Kita berharap banyak dari Pilkada yang berlangsung di tengah pandemi ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang sama-sama diharapkan rakyat, dan mampu membawa rakyat menuju kesejahteraan. Kita semua sama-sama berdoa untuk itu.

Persoalannya, pelaksanaan Pilkada di saat kasus Covid-19 masih tinggi dikhawatirkan muncul kluster baru penyebaran virus Corona, karena terjadi kerumunan massa?

Menurut saya, kekhawatiran itu pasti ada karena terjadi kerumunan. Ini yang membuat sebagian masyarakat menjadi khawatir. Tapi, jika penyelenggaraan Pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, saya

rasa akan meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 sehingga tidak terjadi klaster baru.

Begini saja, pemerintah mesti melakukan pemetaan secara presisi seputar zona-zona penyebaran Covid-19. Teknis penyelenggaraan Pilkada disesuaikan dengan kuantitas penyebaran Covid-19. Misalnya, di zona hijau penyelenggaraan Pilkada dilakukan secara normal, namun tetap dengan protokol kesehatan. Dan, di zona merah atau hitam penyelenggaraan Pilkada dilakukan dengan teknis yang disesuaikan, misalnya dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, penggunaan teknologi atau lainnya.

Belakangan terdengar suara-suara dari berbagai kalangan, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menghendaki agar Pilkada ditunda.

maka jika ada daerah yang tidak ada Covid-nya jangan ditunda. Jadi, ada zonasi Pilkada seperti yang saya sebutkan tadi.

Jika Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada Desember 2020, di tengah pandemi Covid-19, dinilai akan menguntungkan petahana atau incumbent. Karena ada alasan petahana menggunakan dana bantuan sosial (Bansos) untuk mendapatkan dukungan pemilih. Apakah benar seperti itu?

Bansos itu kan untuk kemanusiaan. Sudah ada aturan-aturan ketat dalam pengelolaan sampai penyalurannya, serta diawasi oleh masyarakat juga. Tapi hal itu (penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran bansos) mungkin saja terjadi. Itu yang harus diawasi betul oleh seluruh elemen masyarakat.

MPR ikut mengambil peran dalam Pilkada Serentak ini dengan merekomendasikan visi misi NKRI untuk calon kepala daerah. Bisa dijelaskan?

Saya setuju para calon kepala daerah memiliki visi NKRI. Dalam kontestasi Pilkada para calon kepala daerah adu visi dan misi. Nah, visi dan misi itu seharusnya berwawasan pada kenegaraan dan NKRI. Karena itu, para calon kepala daerah harus menghindari visi untuk membela para 'cukong'.

Apakah Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 dengan segala keterbatasan ini bisa menghasilkan kepala daerah yang berkualitas?

Pandemi ini hanya suasananya saja. Pada intinya, Pilkada akan menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas jika dalam per-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Apakah mungkin Pilkada Serentak yang tahapannya sudah berjalan ini ditunda kembali?

Pilkada memang sudah ditunda. Jika ada penundaan lagi, artinya terjadi dua kali penundaan. Alasan penundaan itu adalah Covid-19, padahal tidak ada yang bisa memastikan kapan Covid itu akan berakhir. Kalau Pilkada ditunda, sampai kapan? Kita tak bisa memprediksi kapan virus Corona ini bisa hilang. Semua hanya perkiraan semata.

Menurut saya, langkah terbaik adalah pemerintah dan Komisi II DPR memetakan 270 daerah yang melaksanakan Pilkada. Dari pemetaan ini bisa diketahui daerah-daerah yang kemungkinan besar pelaksanaan Pilkada bisa ditunda. Jadi, jangan pukul rata. Kalau alasan ditunda karena ada Covid,

Begini, sekarang kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, fokus saja dulu untuk melakukan upaya-upaya menghilangkan penyebaran virus Corona. Sehingga mudah-mudahan pada Desember nanti virus ini sudah hilang.

DPR dan KPU sepakat untuk menjatuhkan sanksi bila peserta Pilkada Serentak (Pilgub, Pilbup, dan Pilawal-kot) tidak menerapkan protokol kesehatan (dalam kampanye, misalnya). Apa pendapat Bapak?

Pastinya virus covid itu tidak pandang bulu. Dalam satu wilayah yang memang tinggi kasusnya jika terjadi kerumunan sangat berpotensi tertular atau menulari. Karena itu, para calon kepala daerah mesti diberikan edukasi tentang bahaya ini. Dan, perlu dibuat aturannya dalam masalah sanksi.

tarungannya mengedepankan visi misi serta program untuk rakyat. Juga, untuk kesejahteraan rakyat bukan membela pribadi atau golongan. Dan, masyarakat pemilih juga mesti memilih paslon (pasangan calon-red) berdasarkan pada kualitas visi dan misinya, bukan karena kekuatan uang paslon atau berharap uang.

Saya sendiri di PKB selalu memberi masukan dan mengingatkan para paslon Pilkada yang berasal dari PKB bahwa menjadi kepala daerah semangatnya adalah meneruskan perjuangan para ulama dalam rangka ikut serta membangun, serta menyebarkan kebaikan dan memberikan manfaat kepada sesama. Jadi, semua kader PKB jangan berpikir jadi Bupati misalnya untuk kepentingan dirinya, tapi harus berpikir untuk kepentingan orang banyak. □

Pustaka Akademika

Untirta Dukung Lahirnya UU Tentang MPR

Pengaturan empat lembaga, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam satu UU bisa mengundang munculnya kerancuan.



Restu Gusti Monitasari



Siti Fauziah

WACANA melahirkan Undang-Undang tentang MPR yang terpisah dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 masih bergulir. Kali ini, dukungan itu muncul dalam acara Pustaka Akademika yang berlangsung di Auditorium Gedung B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Banten, Rabu (2/9).

Pustaka Akademika di Untirta itu membahas skripsi berjudul: “Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Sebagai Bentuk Pengejawantahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hadir dalam acara itu Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, SE., MM.; Wakil Rektor III Untirta, Dr. H. Suherna SP., MS.; Dekan FH Untirta, Dr. Agus Prihartono, PS, SH., MH.; serta para dosen dan mahasiswa Untirta Serang Banten.

Selain bedah skripsi, dalam acara Pustaka Akademika itu juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara Perpustakaan MPR dan Untirta. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Karo Humas MPR Siti Fauziah mewakili Perpustakaan MPR dan Dekan FH Untirta Agus Prihartono mewakili Perpustakaan Untirta.

Restu Gusti Monitasari, SH., selaku penulis skripsi dalam paparannya mengatakan, fungsi dan tugas MPR terkesan menjadi

rancu karena diatur dalam satu UU yang sama dengan DPR, DPD, dan DPRD. Seolah-olah antara MPR dengan tiga lembaga lainnya itu memiliki fungsi, tugas dan peran yang sama. Padahal, antara MPR dengan DPR, DPD, dan DPRD sangat berbeda.

“Seperti halnya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK serta Komisi Yudisial, seharusnya MPR juga diatur secara terpisah dari DPR, DPD dan DPRD dalam undang-undang tersendiri. Ini sesuai dengan perintah Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” kata Restu Gusti.

Lebih lanjut, Restu menyatakan, pengaturan MPR bersama lembaga lain, khususnya DPRD, merupakan kerancuan yang sangat nyata. Pasalnya, DPRD bukanlah lembaga legislatif, seperti halnya DPR, yang memiliki kewenangan pembuatan UU. Sebaliknya, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, yang salah satu tugasnya adalah menyusun peraturan daerah. Oleh karena itu, sebaiknya DPRD tidak diatur dalam UU tentang MD3. Dan, sebaiknya DPRD diatur dalam UU Kewenangan Pemerintah Daerah.

“Pembentukan UU tentang MPR adalah konstitusionalitas untuk memisahkan dengan lembaga negara yang lain. Karena MPR memang memiliki tugas dan wewenang berbeda dengan lembaga negara lainnya,” ujar Restu.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ada Kerancuan

Pernyataan serupa disampaikan oleh Lia Riesta Dewi, SH., MH., yang berbicara sebagai narsum sekaligus penelaah dalam Pustaka Akademika itu. Menurut Lia, sesuai amanat Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MPR harus diatur dalam UU tersendiri, terpisah dari lembaga lainnya. Kalaupun terpaksa, MPR masih bisa diatur menggunakan UU yang sama dengan DPR dan DPD, namun tidak dengan DPRD. Karena MPR, DPR dan DPD memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding DPRD.

“MPR harus diatur dalam UU tersendiri

sehingga tidak ada kerancuan. Minimal UU tersebut tidak mengatur DPRD di dalamnya, karena tugas DPR dan DPRD berbeda. Satu bagian legislatif dan satunya lagi bagian dari pemerintah daerah,” jelas Lia Riesta.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, menurut Lia, pengaturan MPR menggunakan UU tersendiri, terpisah dari lembaga negara lain, merupakan amanat konstitusi. Sebagaimana perintah UUD NRI Tahun 1945.

Sebelumnya pada sesi pembukaan, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah mengatakan, MPR terbuka melakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk

perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Bahkan, Perpustakaan MPR juga terbuka membedah hasil skripsi para mahasiswa, selama berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan MPR. Apalagi, jika acara tersebut bisa bermanfaat bagi perkuliahan para mahasiswa.

“Dalam kondisi seperti sekarang MPR memang membatasi kegiatannya dengan tujuan ikut mencegah penyebaran Covid 19. Kalaupun tetap dilaksanakan, seperti di Untirta, pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan,” ujar Siti Fauziah. □

MBO

Press Gathering

Media Mitra Strategis MPR dalam Menyebarkan Wawasan Kebangsaan

Media massa merupakan mitra penting dan strategis bagi MPR dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, terutama dalam mewujudkan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEGIATAN Press Gathering yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Anyer, Banten, akhir pekan pertama Agustus lalu, terasa lain dari biasanya. Diselenggarakan dalam situasi sulit, di masa pandemi Covid-19, press gathering kali ini harus mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Seluruh peserta harus mengikuti rapid test terlebih dahulu,” ujar Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., dalam laporannya pada acara pembukaan press gathering di Hotel Aston, Anyer, Sabtu siang (5/9/2020). Dan, tentunya, juga berlaku ketentuan pakai masker, dan jaga jarak.

Ini adalah kegiatan press gathering untuk pertama kali diselenggarakan pada 2020 ini. “Kalau bukan karena pandemi, acara press gathering biasanya diselenggarakan dua kali dalam setahun, yaitu pada awal dan akhir tahun,” kata Romdoni Setiawan, Koordinator

Wartawan Perlemen. Dan, press gathering kali ini diikuti oleh 90 wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan online.

Namun yang perlu dicatat, dibanding kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, press gathering kali ini ternyata

paling banyak dihadiri oleh pimpinan MPR, pimpinan badan, dan pimpinan fraksi. Seperti dijelaskan oleh Siti Fauziah, dari sepuluh pimpinan MPR hadir lima orang, yaitu: Bambang Soesatyo, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, dan Hidayat Nur





Siti Fauziah

Wahid (hadir secara virtual).

Sedangkan pimpinan Fraksi MPR yang hadir enam orang. Mereka adalah Idris Laena (Partai Golkar), Taufik Basari (Nasdem), Anton Sukartono (Partai Demokrat), Arwani Thomafi (PPP), H. Andi Akmal Pasludin (PKS), dan Hj. Intsiawati Ayus (Kelompok DPD). Sementara Sadarestuwati (PDI Perjuangan) dan Neng Eem Marhamah Zulfa (PKB) hadir sebagai Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR.

Lebih lanjut Siti Fauziah menyatakan, pertemuan yang melibatkan wartawan parlemen ini sangat penting. Karena kegiatan yang diikuti oleh mass media — sebagai salah satu pilar demokrasi — ini diharapkan dapat memperkuat posisi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. “Media sebagai mitra strategis MPR mudah-mudahan dapat menjadi Jendela MPR bagi masyarakat, dengan selalu memberitakan hal-hal positif



Bambang Soesatyo

yang dilakukan MPR,” ujarnya.

Pentingnya peran pers bagi MPR juga dijelaskan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Ketika membuka acara press gathering ini, Bamsotet— begitu ketua MPR ini biasa disapa — menyatakan, media adalah mitra strategis yang selama ini selalu mendukung kerja MPR. Untuk itu, Bamsotet mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dan sinergi yang terjalin baik selama ini, sehingga pada setiap agenda kelembagaan MPR senantiasa mendapat dukungan peliputan dari media parlemen.

“Pimpinan MPR RI menyadari bahwa media massa, baik sebagai institusi publik maupun sebagai institusi sosial, mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsepsi kehidupan ketatanegaraan modern, media massa tidak saja turut memberi warna, tetapi juga menjadi salah satu pilar demokrasi, di

samping lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” paparnya.

Bamsotet menambahkan media juga berpartisipasi dalam mempertahankan dan merawat kepribadian serta jatidiri bangsa. “Dengan jangkauan yang luas dan tingkat aksesibilitas yang tinggi, media massa mempunyai peran strategis dalam menyebarkan wawasan kebangsaan. Media massa akan menjadi salah satu mitra penting dan strategis bagi MPR dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya, terutama dalam mewujudkan visi MPR sebagai “Rumah Kebangsaan,” katanya.

Usai acara pembukaan press gathering, di tempat yang sama, dilanjutkan diskusi dengan tema: “MPR Rumah Kebangsaan.” Diskusi ini menampilkan para narasumber: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (secara virtual), Arwani Thomafi (PPP), H. Andi Akmal Pasludin (PKS), dan Hj. Intsiawati Ayus (Kelompok DPD). □



Diskusi Press Gathering

Agar Empat Pilar MPR Jadi Rujukan Program dan Kampanye Pilkada

Bangsa Indonesia mempunyai modal sangat kuat menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Modal besar itu adalah Empat Pilar MPR, yaitu: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.



Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PRESS GATHERING Pimpinan dan Anggota MPR dengan Koordinatoriat Wartawan MPR/DPR pada 4–6 September 2020 juga diisi dengan diskusi mengambil tema “MPR Rumah Kebangsaan”. Dalam diskusi ini Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berharap visi misi, program, dan kampanye kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada Serentak 2020 agar merujuk dan tidak keluar dari bingkai Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

“Setiap kandidat kepala daerah baik dalam Pilgub, Pilbub, dan Pilwalkot hendaknya menjadikan Empat Pilar MPR sebagai rujukan dalam program-program atau materi kampanye dalam Pilkada Serentak,” kata Hidayat Nur Wahid dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Aston, Banten, Sabtu petang (5/9/2020).

Diskusi ini diikuti sekitar 90 wartawan peserta press gathering. Selain Hidayat Nur Wahid, narasumber dalam diskusi ini adalah Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP MPR), Andi Akmal Pasludin (Sekretaris Fraksi PKS MPR), dan Instiawati Ayus

(Ketua Kelompok DPD di MPR).

Hidayat Nur Wahid berbicara tentang isu politik terkini dikaitkan dengan peran MPR sebagai Rumah Kebangsaan. Hidayat mengulas Pilkada Serentak 2020 sebagai isu politik terkini, karena bersamaan dengan tahapan pendaftaran para calon kepala daerah untuk mengikuti kontestasi dalam Pilkada Serentak.

Dikaitkan dengan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Hidayat menyebutkan, komit-



men MPR untuk terus menyosialisasikan Empat Pilar MPR ke seluruh elemen masyarakat. “Sebagai Rumah Kebangsaan, MPR tetap berkomitmen untuk terus menyosialisasikan Empat Pilar MPR,” ujarnya.

Menurut Hidayat, MPR sebagai Rumah Kebangsaan adalah tempat berhimpunnya anggota DPR dan anggota DPD. Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merepresentasikan kekuatan politik di Indonesia. Meski datang dari latarbelakang politik yang berbeda, pimpinan MPR tetap kompak dan guyub.

“Ini menunjukkan bangsa Indonesia mempunyai modal yang sangat kuat menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita tetap kuat dan bisa mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan modal besar itu,” katanya.

“Modal besar itu namanya Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” sambungnya.

Hidayat berharap, modal besar itu menjadi

rujukan dalam program-program dan materi kampanye dari masing-masing para calon kepala daerah. Kepada para jurnalis, Hidayat juga berharap, bisa mengawasi dan memberitakan Pilkada Serentak untuk menghadirkan Pilkada yang jujur dan demokratis. “Jangan sampai pengorbanan yang sangat besar, penggunaan APBN yang besar di tengah pandemi Covid-19 ini, tapi tidak menghadirkan Pilkada yang demokratis, berkualitas,” tuturnya.

Hidayat menambahkan, tugas media

kan kita semua. Pilkada serentak jangan menafikan kebhinnekaan. Ketika perbedaan muncul, kita berkomitmen memperkuat pondasi Rumah Kebangsaan kita dan pondasi itu menjadi panduan bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.

Arwani melanjutkan bahwa tugas kita semua untuk mempertahankan dan memperkuat pondasi bangunan Rumah Kebangsaan. “Kita semua ikut menjaga Rumah Kebangsaan ini. Karena inilah satu-

menjaga rumah kebangsaan itu,” katanya.

Pembicara lain, Ketua Kelompok DPD di MPR Intsiawati Ayus menegaskan bahwa tugas MPR yang utama sebagai Rumah Kebangsaan adalah merekatkan sesama anak bangsa. “Merekatkan sesama anak bangsa bukan pekerjaan mudah. Ini bisa dilakukan MPR melalui para anggotanya di Rumah Kebangsaan,” katanya.

Karena itulah MPR mendapat amanat dari UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk menyosialisasikan Empat Pilar



adalah mengawasi dan mengingatkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berada dalam konteks semangat reformasi dengan komitmen terhadap Empat Pilar MPR. “Kita bersama-sama menghadirkan Pilkada yang berkualitas,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi sejalan dengan Hidayat Nur Wahid. Arwani mengungkapkan, menyambut Pilkada Serentak 2020, MPR telah menyampaikan usulan rekomendasi kepada pihak terkait, termasuk presiden dan DPR untuk menegaskan kembali visi misi para kandidat agar memenuhi unsur dari implementasi Pancasila.

“Kita berharap, momentum Pilkada menjadi satu sarana mempererat dan mempersatu-

satunya harapan terakhir agar Empat Pilar menjiwai penyelenggaraan pemerintah baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Semuanya dalam kerangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Empat Pilar MPR,” paparnya.

Karena itu, sambung Arwani, masih banyak yang harus dikerjakan MPR. “Lembaga negara lain memiliki kepentingan-kepentingan subyektif. Misalnya bicara Pilkada, di lembaga lain ada kepentingan subyektif. Tapi di MPR kita duduk bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan mengedepankan kepentingan nasional. Banyak yang harus dikerjakan MPR sehingga tidak hanya memperkuat bangunan rumah. Para penghuninya harus aktif dalam

MPR. “MPR ke depan dengan merekatkan bangsa melalui kedaulatan rakyat akan bekerja sesuai mandat yang diberikan UUD dan UU,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKS MPR Andi Akmal Pasludin berpendapat, MPR harus memperkuat positioningnya dengan memberikan solusi atas persoalan kebangsaan. “Semua masalah bangsa ini, seperti konflik-konflik wilayah, bisa difasilitasi MPR. UU yang bisa menimbulkan perpecahan antarlembaga, alangkah bijaknya bisa dipertemukan MPR. Karena MPR adalah lembaga negara yang mencari jalan keluar permasalahan melalui musyawarah mufakat,” ucapnya. □

BSC

PAW Anggota MPR

Ketua MPR Lantik Dua Anggota Baru MPR

Kita perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, agar memprioritaskan penanganan krisis kesehatan agar tidak berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, atau bahkan krisis politik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR Bambang Soesatyo melantik dan mengambil sumpah janji dua anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Fraksi Partai Gerindra. Kedua anggota PAW MPR adalah Prasetyo Hadi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang menggantikan Harry Purnomo, dan Haerul Saleh dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara menggantikan Imran yang meninggal dunia.

Pelantikan berlangsung di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Hadir dalam pelantikan dan pengucahan sumpah janji anggota MPR PAW ini Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sementara, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Syarifuddin Hasan mengikuti pelantikan dan pengucahan sumpah anggota MPR PAW ini secara virtual.

Dalam sambutannya, Bambang Soesatyo mengungkapkan, rangkaian agenda penting MPR mulai dari Sidang Tahunan MPR,

Peringatan Hari Konstitusi, Peringatan Hari Ulang Tahun MPR sampai pada pelantikan dan pengucahan sumpah janji anggota MPR PAW kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan.

“Sudah lebih dari enam bulan kita diterpa pandemi Covid-19. Jumlah kasus Covid-19 sudah menembus angka lebih dari 200 ribu, bahkan 300 ribu, dengan angka kematian lebih dari 8000 kasus,” ungkapnya.

“Untuk itu, kita perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, memprioritaskan penanganan krisis kesehatan agar tidak berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, atau bahkan krisis politik,” sambungnya.

Menurut Bamsuet, pemerintah perlu mencanangkan strategi baru yang lebih efektif untuk pemulihan sektor ekonomi dan perekonomian sesuai dengan situasi maupun kondisi saat ini.

“Yang sangat ditunggu adalah mendorong penemuan vaksin Covid-19 yang akan diproduksi dari dalam negeri agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan faktor keamanan dan efektivitas yang terjamin bagi masyarakat yang akan menggunakan,” katanya.

“Untuk itu, kami pimpinan MPR akan segera berkunjung dan melihat langsung untuk memastikan Bio Farma dapat memproduksi vaksin ini secepat-cepatnya,” imbuhnya.

Pada bagian lain, Bamsuet menyinggung pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal, yaitu Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 270 daerah. “Mari sambut pesta demokrasi ini dan memaknainya sebagai kompetisi antarkita, antarsaudara, antarsesama anak bangsa, sehingga hasilnya merupakan kemenangan kita semua. Pilihan politik boleh beda, tetapi Merah Putih kita sama dan tetap akan sama selamanya,” ujarnya.

Namun, Bamsuet juga mengingatkan, untuk berhati-hati karena pelaksanaan



Pilkada Serentak kali ini juga berpotensi menimbulkan klaster-klaster baru dalam penularan Covid-19. “Untuk itu, kita pun perlu mendorong seluruh calon kepala daerah, bahkan memperingatkan mereka agar mematuhi seluruh protokol kesehatan yang berlaku,” tuturnya.

Bamsuet juga meminta KPU dan Bawaslu bertindak tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar peraturan dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.

“Kita mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, agar bersikap tegas apabila ada calon kepala daerah yang

tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Serta mengumpulkan data kepala daerah yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan untuk dijadikan dasar penegakan, jika perlu dibatalkan,” katanya. □

BSC

Bantuan Modal UMKM

Syarief Hasan Bantu Pedagang Kaki Lima

Sektor UMKM adalah sektor paling terpuak akibat pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang harus tutup, baik sementara maupun permanen karena tidak lagi memiliki modal.



WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan modal usaha

ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan di tengah pandemi Covid-19.

Penyerahan bantuan modal usaha kepada

pelaku UMKM dilakukan di pelataran Hotel Gino Feruci, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (27/8/2020). Syarif Hasan secara langsung menyerahkan bantuan modal usaha kepada sejumlah pedagang kaki lima.

Sebelum menyerahkan bantuan, Syarif Hasan sempat berdialog dengan para pedagang. Seperti Dasep, pedagang es jeruk. Syarif Hasan menanyakan modal untuk berdagang es jeruk. “Modalnya Rp 250 ribu,” ujar Dasep. Pedagang kecil ini berjualan es jeruk untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama seorang istri dan dua orang anak.

Selain pedagang es jeruk, Syarif Hasan didampingi istri Ingrid Kansil juga berdialog dengan pedagang lainnya, seperti pedagang nasi kuning, lumpia basah, bakso, cilung, sering.

Sambil berdialog, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat itu menyerahkan bantuan modal usaha kepada para pedagang. “Ini

bantuan untuk modal usaha. Modal ini untuk diputar atau ditabung dulu. Nanti dilihat bagaimana hasilnya. Jangan dibuat beli rokok atau yang lain,” pesan Syarief Hasan.

Pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur ini merupakan termin pertama. Menurut Syarief Hasan, pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM akan terus dilaksanakan secara kontinyu di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Syarief Hasan berharap, bantuan modal

usaha ini bisa bermanfaat bagi pelaku UMKM. “Kita juga berharap pandemi Covid-19 ini bisa cepat berlalu dan kegiatan perekonomian masyarakat kembali pulih,” harapnya.

Sektor UMKM adalah sektor yang paling terpuak akibat pandemi Covid-19. Banyak pelaku UMKM yang harus tutup, baik sementara maupun permanen, karena tidak lagi memiliki modal. Padahal UMKM adalah tulang punggung dan penyangga utama ekonomi Indonesia. “UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia dan

menyerap sampai 97% tenaga kerja. Jadi jangan biarkan UMKM tidak berdaya,” kata Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga mendukung langkah pemerintah yang menyalurkan bantuan tunai kepada sebanyak 12 juta bantuan UMKM. Dia berharap, jajaran kementerian mempercepat penyaluran bantuan tunai itu kepada UMKM. “UMKM harus segera dibantu agar bisa bergerak lagi,” ucapnya. □

BSC

FGD Universitas Suryakencana

Gali Pandangan Akademisi Terkait Amandemen UUD

Pendapat dan pandangan akademisi menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta kajian bagi MPR terkait dengan haluan negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Dr. Syarifuddin Hasan, MM., MBA., menyerap pendapat dan pandangan kalangan akademisi Universitas Suryakencana melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945.

khususnya soal wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Haluan Negara (GBHN). Pendapat dan pandangan akademisi ini menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta kajian bagi MPR terkait dengan haluan negara.

“Pandangan dan pendapat kalangan akademisi ini merupakan kontribusi bagi perkembangan demokrasi, pembangunan dan kesejahteraan,” kata Syarief Hasan ketika membuka FGD dengan tema “Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Khusus-



nya Terkait Dihidupkannya Kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara” di Cianjur, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

FGD yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Universitas Suryakencana ini dihadiri Rektor Prof. Dr. Dwidja Priyanto, SH., MH., Sp.N.; Jafar Hafsa (Staf Ahli Wakil Ketua MPR); Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Dr. Dedi Mulyadi, SH., MH., serta akademisi Universitas Suryakencana.

Syarief Hasan mengungkapkan, MPR periode 2019 - 2024 mendapatkan amanah

dari MPR periode sebelumnya (2014 - 2019) untuk melanjutkan kajian terhadap amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara. “Untuk melakukan amandemen UUD perlu pendalaman yang komprehensif dengan melibatkan stake holder dan masyarakat Indonesia,” katanya.

Salah satu klaster yang digali, lanjut Syarief Hasan, adalah kalangan akademisi. “Karena kalangan akademisi memiliki independensi dalam memberikan pendapat dan pandangannya. Akademisi memiliki

independensi demi kepentingan bangsa dan negara. Itulah sebabnya saya selalu berkomunikasi dengan perguruan tinggi,” tambahnya.

Kepada peserta FGD, Syarief Hasan pun menjelaskan pandangan-pandangan tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan GBHN. Ada pandangan yang mengatakan, amandemen empat tahap sebelumnya (amandemen UUD 1945 yang dilakukan tahun 1999 - 2002) belum sempurna sehingga perlu dilakukan amandemen kelima, khususnya terkait dengan GBHN.

“Strategi pembangunan kita melalui UU No 25 Tahun 2004 dan UU No 17 Tahun 2007 belum mewakili kepentingan nasional. Salah satunya tidak ada sinergi dan kesinambungan pembangunan sampai tingkat provinsi dan kabupaten, karena pembangunan di daerah berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih,” jelasnya.

“Jika GBHN masuk dalam konstitusi maka akan menjadi haluan pembangunan siapa pun pemimpin atau kepala daerah,” imbuhnya.

Namun, lanjut Syarief Hasan, muncul beragam masalah bila dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Bukan tidak mungkin ada kepentingan lain yang masuk ketika melakukan amandemen, dan tidak hanya amandemen khusus haluan negara,” katanya.

Persoalan lainnya, tambah Syarief Hasan, adalah siapa yang menyusun GBHN. “Ada pandangan bila MPR yang menyusun GBHN maka MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Karena itu, Presiden sebagai pelaksana GBHN akan bertanggungjawabkan kepada MPR. Ini juga menjadi persoalan,” katanya.

Untuk itu, Syarief Hasan meminta pendapat dan pandangan para akademisi Universitas Suryakencana melalui FGD terkait dengan persoalan itu. “Saya apresiasi terhadap para peserta FGD di tengah pandemi Covid-19 ini ikut memberikan kontribusi, berupa pandangan dan pendapat berkomitmen untuk sharing bersama. Pendapat, pandangan, dan saran akademisi ini akan dibawa ke MPR,” ujarnya. □



BSC



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
Ketua MPR RI

Risiko Persiapan Pilkada di Tengah Pandemi

AKIBAT pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, masyarakat paham dengan sendirinya tentang tantangan riil bersama, sekarang dan di waktu-waktu mendatang. Permasalahan riil sekaligus prioritas masalah adalah melindungi sekaligus merawat kesehatan masyarakat dari ancaman Covid-19, dan aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah strategi dan upaya memulihkan perekonomian.

Karena itu, menuju pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pada Desember nanti, komunitas pemilih hendaknya mulai menyimak dengan seksama program-program yang ditawarkan atau dijanjikan oleh para pasangan calon (Paslon). Komunitas pemilih disarankan untuk benar-benar peduli. Pandemi Covid-19 menghadirkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.

Dan, karena durasinya yang berkepanjangan, pandemi Covid-19 pun sudah menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi perekonomian. Ancaman kesehatan dan kerusakan ekonomi itu tidak hanya dirasakan pada tingkat negara, melainkan hingga ke setiap rumah tangga, baik di perkotaan maupun desa. Maka, kepada komunitas pemilih, disarankan untuk menyimak betul persepsi para Paslon tentang dua masalah strategis ini, dan bagaimana para Paslon menawarkan jalan keluar.

Selain itu, kepedulian para Paslon atas dua masalah itu juga bisa diukur dari tindakan atau aksi mereka membuat persiapan, terutama pada periode kampanye. Kepada setiap Paslon dan tim sukses-

nya yang bekerja di lapangan, komunitas pemilih harus menuntut mereka mampu mengendalikan massa pendukung. Kegiatan seperti sosialisasi figur Paslon dan program-programnya harus tetap berpatokan pada protokol kesehatan. Tidak boleh ada pengerahan massa di ruang publik, atau mengumpulkan orang dalam jumlah banyak yang menyebabkan terjadinya kerumunan.

Sebaliknya, ketika ada pergerakan massa atau kerumunan orang untuk menyuarakan dukungan pada Paslon tertentu, pergerakan massa dan kerumunan itu berpotensi memperpanjang durasi pandemi di daerah bersangkutan. Pergerakan dan kerumunan itu juga menjadi bukti ketidakmampuan Paslon mengelola dan mengendalikan aktivitas komunitas pendukungnya. Logikanya, kalau mengelola aktivitas pendukung saja tidak bisa, bagaimana mungkin Paslon bisa mengelola aktivitas semua elemen masyarakat di daerah itu.

Lebih dari itu, ketika durasi pandemi menjadi berkepanjangan akibat klaster baru dari aktivitas kampanye, upaya memulihkan perekonomian wilayah menjadi makin sulit. Kalau faktanya menjadi seperti itu, persoalannya kembali pada komunitas pemilih untuk menilai kapabilitas dan kredibilitas kepemimpinan Paslon bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2020, Pilkada serentak tahun ini dilaksanakan pada Desember 2020. Dilaksanakan di 270 daerah pemilihan (Dapil), mencakup sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Karena faktor

pandemi Covid-19, pelaksanaan pemungutan suara digeser ke 9 Desember 2020, dari rencana sebelumnya 23 September 2020.

Bisa diasumsikan bahwa Paslon dan tim suksesnya di semua Dapil kini mulai beraktivitas melakukan persiapan. Aktivitas seperti itu wajar saja. Akan tetapi, harus diingat dan digarisbawahi bahwasanya semua aktivitas itu berlangsung di tengah pandemi Covid-19, yang mewajibkan siapa saja patuh pada protokol kesehatan; menjaga jarak, penggunaan masker dan rajin cuci tangan.

Untuk mencegah perilaku dan tindakan ceroboh, semua Paslon harus mengingatkan kepada tim sukses dan massa pendukung bahwa aktivitas persiapan Pilkada kali ini dipastikan sangat berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Pun, akan sangat ideal jika semua Paslon dan tim suksesnya bertekad untuk tidak akan menimbulkan klaster baru Covid-19 dari semua rangkaian kegiatan mereka. Tekad atau kesadaran seperti ini akan mendorong Paslon dan tim sukses lebih berhati-hati, dan mau bisa bersikap tegas dalam mengendalikan aktivitas para pendukung. Risikonya akan sangat besar jika Paslon tidak mampu mengendalikan pergerakan pendukung, karena komunitas pemilih akan punya persepsi negatif tentang Paslon bersangkutan.

Dengan begitu, menjadi sangat penting jika para Paslon mau berkomitmen untuk mengendalikan massa pendukung agar tidak turun ke jalan atau membuat kerumunan orang. Persiapan Pilkada serentak yang lazim diisi dengan kegiatan kampanye jangan sampai menjadi klaster baru penularan Covid-19. Memang betul bahwa protokol kesehatan untuk mendukung Pilkada 2020 sudah ditetapkan. Namun, mendekati pelaksanaan Pilkada, potensi tantangannya tetap ada, yakni kemungkinan terjadinya pengerahan massa pendukung para Paslon. Maka, komitmen serta tanggung jawab para Paslon dan tim suksesnya masing-masing untuk tidak mengerahkan massa pendukung selama periode kampanye juga sangat diperlukan.

Akhir-akhir ini, cukup gencar pemberitaan tentang angka kesembuhan dari Covid-19 di dalam negeri. Per 26 Agustus 2020 misalnya, dilaporkan bahwa persentase kesembuhan Covid-19 di tanah air tercatat 72,1% dari total kasus Covid-19. Tentu saja informasi ini patut disyukuri. Akan tetapi, informasi dan data ini jangan sampai membuat atau mendorong siapa saja, utamanya Paslon dan tim sukses, bertindak dan berperilaku ceroboh. Sebab, tingginya tingkat kesembuhan tidak berarti pandemi Covid-19 telah berakhir. Sebaliknya, sebagaimana bisa disimak bersama, jumlah kasus baru pun terus bertambah dengan besaran yang masih mengkhawatirkan. Karena itu, kepatuhan pada protokol kesehatan adalah mutlak. Penegakan disiplin protokol kesehatan yang didukung TNI-Polri masih sangat diperlukan.

Karena itu, persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus tetap berpijak pada kepatuhan akan protokol kesehatan. Angka kesembuhan memang tinggi, tetapi tidak berarti Paslon dan tim sukses boleh meremehkan ancaman dari Covid-19. Harap diingat bahwa kendati angka kesembuhan tinggi, upaya pemulihan masih sulit dimulai karena jumlah kasus baru pun terus bertambah. Artinya, protokol kesehatan harus tetap dijalankan selama persiapan Pilkada agar semua aktivitas persiapan itu tidak menjadi klaster baru Covid-19.

Dalam konteks ini, tentu saja perhatian khusus layak dialamatkan ke pulau Jawa. Sebab, sekitar 74% kasus Covid-19 tercatat di Jawa. Dalam Pilkada 2020, tidak ada pemilihan Gubernur (Pilgub) di Pulau Jawa. Pilgub berlangsung Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Namun, pulau Jawa akan marak Pilkada karena pemilihan bupati dan walikota berlangsung di banyak kabupaten maupun kota, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Berarti, akan banyak warga yang melibatkan diri atau dilibatkan dalam aktivitas persiapan Pilkada,.

Agar pelibatan warga dalam persiapan Pilkada tidak mendatangkan risiko penularan Covid-19, Paslon dan tim sukses dituntut lebih kreatif dalam berkomunikasi dengan komunitas pemilih. □

Subsidi Kuota Internet

Agar Kemenag Berbuat Serupa

Kemendikbud menyediakan anggaran Rp 9 triliun untuk subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi itu, dan berharap Kemenag juga melakukan hal serupa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR-RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid MA, mengapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang bisa menyediakan alokasi anggaran subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen senilai Rp 9 triliun. Hidayat meminta Kementerian Agama (Kemenag) meniru kebijakan Kemendikbud itu dengan menyediakan subsidi kuota internet untuk pelajar dan guru di madrasah, serta mahasiswa dan dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Hidayat mengemukakan alasan bahwa peserta didik di lingkungan Kemenag jumlahnya cukup besar, yaitu: 9,2 juta siswa madrasah, 780 ribu guru madrasah, 1 juta mahasiswa PTKIN, adalah juga warga Indonesia yang terdampak negatif akibat pandemi Covid-19, sama halnya dengan peserta didik di lingkungan Kemendikbud.

"Dalam rangka memenuhi kewajiban Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan sila

kedua dan kelima dari Pancasila maka sudah seharusnya Menteri Agama memperjuangkan pemenuhan hak bagi peserta didik di lingkungan Kemenag, dengan menghadirkan anggaran untuk subsidi pembelian kuota internet bagi para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di lingkungan Kemenag.

Seperti diketahui, Kemendikbud sudah dapat tambahan dana BOS untuk sekolah terdampak Covid-19 sebesar Rp 3,2 triliun, lalu kini dapat lagi subsidi kuota internet Rp 9 triliun. Sementara sekolah keagamaan di lingkungan Kemenag hanya mendapatkan bantuan untuk pesantren dan madrasah senilai Rp 2,6 triliun tanpa ada subsidi pembelian kuota internet yang juga sangat diperlukan oleh para peserta didik di lingkungan Kemenag. "Tentu itu pendidikan berwarga-negara yang tidak adil dan tidak proporsional," kata Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/8).

Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII sebagai mitra Kemenag menyebutkan, sejak Raker di DPR, 8 April 2020, Kemenag sudah menyepakati keputusan rapat kerja

dengan Komisi VIII untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan belajar jarak jauh di Ponpes, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan. Serta kemungkinan penggunaan dana abadi pendidikan untuk membantu guru pendidikan Islam dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan, baik di dalam maupun di luar negeri yang terdampak oleh Covid-19. Namun, hingga saat ini, yang sudah masuk di anggaran negara baru bantuan untuk pesantren dan madrasah senilai Rp 2,6 triliun. "Jadi, sangat jauh dari anggaran untuk Kemendikbud," ujar Hidayat.

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan pentingnya keberpihakan Kemenag kepada penjagaan dan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di era Covid-19. Selain belum adanya program dan anggaran untuk subsidi kuota internet, seperti yang diberlakukan di Kemendikbud, keberpihakan Kemenag pada PTKIN melalui KMA 515/2020 tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal tidak terimplementasi dengan baik di lapangan. Faktanya, sebagaimana ditemukan pada Raker Komisi VIII dengan para Rektor PTKIN (25/8), ketentuan dalam produk hukum tersebut tidak mengatur secara jelas sehingga banyak PTKIN yang tidak menjalankannya. Oleh karena itu, Hidayat meminta agar mahasiswa dan dosen juga diberikan bantuan dan subsidi sebagaimana yang dilakukan oleh Kemendikbud.

"Mentri Agama, sebagaimana juga Mendikbud, harus serius menghadirkan program dan anggaran bantuan untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen di lingkungan Kemenag. Hal itu sebagai bentuk keadilan negara untuk warganya, bagian dari upaya mempersiapkan dan menghasilkan sarjana muslim moderat kelas dunia," pungkasnya. □

MBO

Diskusi Pilkada Serentak

Harus Tunjukkan Energi Positif Bangsa

Penyelenggaraan Pilkada Serentak harus diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah telah sepakat menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada Serentak) di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Pilkada Serentak ini digelar di tengah masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia. Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyebutkan, Pilkada Serentak pada Desember nanti merupakan Pilkada yang paling berisiko karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Karena itu, penyelenggaraan Pilkada Serentak perlu diperhitungkan secara matang termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Karena itu kami harus benar-benar memperhitungkan secara matang agar risiko tinggi penyelenggaraan Pilkada Serentak, namun bisa menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi melawan Covid-19,” kata Mardani Ali Sera dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi” di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Selain Mardani Ali Sera, juga turut berbicara dalam diskusi ini adalah anggota

MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe.

Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan, salah satu yang diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 adalah pengumpulan massa. “Kami mendorong Peraturan KPU dalam bab pengumpulan massa. Kita minta jaga jarak sekitar 2 meter. Kami juga mendesak KPU atau Bawaslu menghentikan kampanye yang tidak mengikuti protokol Covid-19,” katanya.

Agar Pilkada serentak menjadi momentum menghidupkan semangat kebangsaan, menurut Mardani, merupakan pekerjaan bersama. “Kami mengusulkan dalam RDP dengan Kemendagri agar Pilkada serentak menjadi orkestra yang indah dan ketat. Pilkada serentak ini harus menunjukkan energi positif bangsa bahwa di masa pandemi Covid-19 kita bisa menyelenggarakan Pilkada yang berkualitas, tidak menjadi cluster baru Covid-19, dan hasilnya adalah kemenangan besar buat rakyat,” paparnya.

Mardani menambahkan, ada tiga syarat untuk menjadikan Pilkada serentak sebagai orkestra yang indah dan ketat. *Pertama*, masyarakat perlu dilibatkan sejak awal. Masyarakat, partai politik, dan media harus

punya komitmen. “Seharusnya jangan sampai ada kotak kosong. Sedih sekali kalau Pilkada ada calon tunggal, karena ini bencana dan musibah bagi demokrasi,” tuturnya.

Kedua, penyelenggara tidak hanya memiliki integritas tetapi juga harus meningkatkan profesionalismenya. “KPU dan KPUD, Bawaslu, Bawasda, harus benar-benar menerapkan protokol Covid-19 secara ketat. Bahkan, kita ingin mengusulkan sanksi ketat bagi pasangan calon yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” katanya.

Ketiga, kedewasaan dari Kemendagri untuk menjadi dirigen dalam orkestra itu. “Mendagri adalah pembina kepala daerah. Siapa pun harus menjadikan Pilkada sebagai orkestra indah yang menunjukkan bangsa Indonesia bisa menyelenggarakan Pilkada tanpa ada cluster baru dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” ujarnya.

Tidak jauh berbeda, anggota MPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengungkapkan, agar Pilkada serentak tidak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19 maka ada dua cara. Pertama, level teknis prosedural. Misalnya, seluruh tahapan Pilkada serentak dikaji ulang, seperti rescheduling pelaksanaan Pilkada, pembatasan massa dalam kampanye, pencoblosan harus menerapkan

protokol kesehatan yang sangat ketat.

Kedua, level substansi. Dalam situasi krisis dan terbatas jangan sampai Pilkada disusupi tujuan lain yang bertolak belakang dengan semangat kebangsaan. Misalnya, masuknya kekuatan pemodal ke arena Pilkada.

“Problem hari ini adalah bagaimana Pilkada memunculkan tokoh pemimpin yang memiliki kapasitas memajukan daerah dalam forum dunia. Karena kepala daerah yang kita miliki saat ini masih berpikir pada tingkat regional

atau nasional. Pilkada belum memunculkan pemimpin atau kepala daerah yang memajukan daerahnya ke tingkat dunia,” katanya.

Sementara itu Ketua Komite I DPD Fachrul Razi dan pengamat politik Maksimus Lalongkoe berpendapat sama bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak lebih baik ditunda hingga pandemi Covid-19 mereda. “Sampai saat ini kita meminta pelaksanaan Pilkada serentak ditunda ke tahun 2021, banyak daerah juga yang belum siap,” kata Fachrul Razi. Alasannya, kasus positif Covid-19 masih

tinggi pada daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Maksimus Lalongkoe juga mengatakan, alangkah eloknya bila Pilkada Serentak 2020 ditunda. “Jumlah yang terkena Covid-19 terus bertambah belum lagi dampak Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan hidup. Jangan sampai Pilkada ini justru menyulitkan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya. □

BSC



Diskusi Antisipasi Resesi Ekonomi

Gotong Royong Modal Dasar Menghadapi Pandemi Covid-19

Gotong royong dan kedermawanan merupakan hasil pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat Pancasila, demi terwujudnya sila kelima.

PANDEMI Covid-19 telah berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Bahkan ada kecenderungan dunia bakal mengalami resesi ekonomi. Menghadapi dampak ini, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai gotong royong dan persatuan sebagai salah satu nilai yang sangat kuat dan menjadi modal dasar menghadapi dampak dari pandemi Covid-19, termasuk mengantisipasi resesi ekonomi.

“Gotong royong merupakan nilai dasar kebangsaan yang sangat diperlukan saat



ini. Juga semangat solidaritas dan kolaborasi. Kondisi bangsa saat ini memerlukan kerjasama semua pihak,” kata Lestari Moerdijat dalam Diskusi Empat Pilar dengan tema “Penguatan Nilai Gotong Royong untuk Antisipasi Resesi” di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Narasumber lain diskusi ini adalah anggota MPR Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian dan UMKM Luhur Pradjarto, Ketua/Pendiri NCBI (Nation and Character Building Institute)



FOTO-FOTO: FFY

Juliaman Saragih.

Rerie, sapaan Lestari Moerdijat, mengutip sebuah survei aspirasi dengan sampling acak sebanyak 389 responden pada periode Mei – Juni 2020. Dari survei itu, responden setuju bahwa Covid-19 adalah ancaman. “Lebih dari 31% responden setuju Covid-19 merupakan ancaman. Jika dikelompokkan, lebih dari 70% setuju dan sadar bahwa Covid-19 adalah ancaman,” kata Wakil Ketua MPR dari Partai Nasdem ini.

Mengutip analisa lainnya, Rerie menyebutkan, ekonomi merupakan ancaman utama dari pandemi Covid-19. “Jadi publik pada dasarnya paham bahwa pandemi Covid 19 bukan sekadar ancaman kesehatan saja, tapi bisa berujung pada problem besar akibat hambatan atau eksekusi pandemi Covid-19. Yaitu, menurunnya aktivitas perekonomian. Tak boleh dilupakan adalah masalah stabilitas nasional kita. Bagaimana pertahanan menghadapi penyakit, bermacam masalah, dan *social unrest*,” ujarnya.

Menurut Rerie, Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan menghadapi tan-

tangan itu. Mengutip survei *Charities Aid Foundation*, Indonesia adalah negara yang giving indeks-nya terus naik dalam 10 tahun terakhir. Solidaritas (gotong royong) dan kedermawanan menjadi modal sosial menghadapi Covid-19. Gotong royong sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

“Solidaritas atau gotong royong dan kedermawanan sesungguhnya adalah pemaknaan Pancasila itu sendiri. Gotong royong dan kedermawanan merupakan hasil pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat Pancasila, demi terwujudnya sila kelima,” jelasnya.

Sejalan dengan Rerie, anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat, ketahanan sosial bangsa Indonesia sedang diuji di masa pandemi Covid-19. “Ada hikmah di balik pandemi Covid-19 ini, yaitu kita bisa memperkuat ketahanan sosial kita dengan menumbuhkan kegotong-royongan,” ujarnya.

“Kalau masyarakat kita menumbuhkan

nilai-nilai gotong royong, saling percaya, saling menghormati, saling membantu, dan membangkitkan kedermawanan sosial, maka apapun yang terjadi, termasuk misalnya resesi ekonomi, kita sebagai bangsa dengan nilai-nilai Pancasila akan tetap menjadi negara yang kuat,” sambungnya.

Ace Hasan Syadzily berharap, pemerintah bisa mendorong masyarakat agar memiliki ketahanan sosial yang kuat. “Jangan kemudian ketahanan sosial itu diganggu dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya bisa menimbulkan *social unrest* dan tidak ada harmoni di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua/Pendiri NCBI (Nation and Character Building Institute) Juliaman Saragih setuju bahwa gotong royong merupakan karakter dan jati diri bangsa. Gotong royong ada di kalangan masyarakat bawah. Karena itu, nilai gotong royong itu akan sangat besar bila pemerintah membantu UMKM. Sebab, UMKM menyentuh lapisan masyarakat bawah. “Dengan demikian akan muncul roh gotong royong di masyarakat. Dan, kita bisa melewati masa pandemi ini,” ujarnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian dan UMKM Luhur Pradjarto menambahkan, dari sebanyak 235 ribu pelaku UMKM, sebanyak 22% mengeluhkan penjualan dan permintaan menurun, 18% mengeluhkan produksinya terhambat, dan 19% mengeluh distribusi terhambat.

“Pemerintah telah menggelontorkan Rp 695 triliun, dan dari jumlah itu sebanyak Rp 123,4 triliun untuk UMKM supaya pelaku UMKM bisa tumbuh. UMKM merupakan tulang punggung dan garda terdepan ekonomi Indonesia,” ujarnya. □

BSC



Bansos Kemensos

Realisasi Perlindungan Sosial Diberikan Secara Tunai

Pandemi Covid-19 menyeret perekonomian Indonesia ke arah resesi. Untuk mengerem agar kondisi ekonomi tidak makin memburuk, ada baiknya penyaluran bantuan sosial diberikan secara tunai.



Hidayat Nur Wahid

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengapresiasi realisasi bantuan sosial Kemensos yang telah mencapai 65%. Selanjutnya, agar masyarakat tidak menanggung beban yang semakin berat akibat resesi yang sudah diambang pintu, HNW meminta Kemensos untuk terus mempercepat penyaluran bantuan sosial, tidak hanya dalam bentuk sembako tapi juga diutamakan secara tunai. Ini penting, agar roda ekonomi dapat berputar mengatasi resesi. Menurut HNW, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III yang tinggal tersisa satu bulan, demi menghindarkan Indonesia dari ancaman resesi dan dampak buruknya yang bisa berkepanjangan.

“Konsumsi masyarakat di kuartal II 2020 terkontraksi 5,51%, termasuk untuk pengeluaran keseharian seperti makanan dan minuman. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli. Dengan catatan, Kemensos harus terus memperbaiki

akurasi data penerima bantuan sosial, serta melaksanakan hasil evaluasi distribusi bantuan agar masalahnya tak terulang lagi pada periode berikutnya,” kata HNW usai rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Jakarta, Kamis (3/9).

Hidayat menilai, realisasi anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 65% hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong. Menurutnya, sekalipun program dirancang untuk distribusi sepanjang tahun, penting untuk meningkatkan realisasi di kuartal III untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam resesi dengan segala dampak buruknya. Karena jika resesi terjadi, selain dampak riil pada berkurangnya pekerjaan, ada juga dampak psikologis yang bisa mendorong pada irasionalitas pasar, serta menghadirkan kepanikan yang akan memperparah penyebaran Covid-19.

Hidayat meminta Kemensos untuk mengalihkan bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Pasalnya, kontraksi kon-

sumsi di kuartal II paling besar terjadi di Jawa, yakni -6,69%. Dalam konteks ini, bantuan sembako Jabodetabek tidak akan terlalu efektif karena tidak mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat. Bantuan langsung tunai juga dinilai lebih aman dari penyimpangan dan korupsi oleh oknum penyalur.

“Sebagian pedagang toko kelontong mengeluhkan dagangannya tidak laku, karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia. Seharusnya, bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung yang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi warga, dan meningkatkan kohesivitas sosial diantara mereka, yang juga akan menjadi terapi atasi covid-19”, tegas Hidayat. □

Beras Cianjur Terkenal Enaknya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



KUNJUNGAN Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 3 September 2020, salah satunya adalah bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al Khadijah. Jazilul Fawaid hadir di pesantren yang dipimpin oleh KH. Muhammad Deni Ramdani itu didampingi oleh anggota MPR Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa.

Kehadiran Jazilul Fawaid ke pesantren untuk melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR. "Saya merasa berbahagia bisa bersilaturahmi ke pesantren ini," ujarnya. "Nurul Hidayah berarti pancaran cahaya. Pancaran cahaya agar kita bisa menjadi baik," tambahnya. Sebagai pria yang pernah mengenyam pendidikan pesantren,

berada di antara santri dan kiai merupakan hal yang biasa baginya. "Di pesantren serasa di rumah sendiri," ungkapnya.

Sebagai alumni pesantren, Jazilul Fawaid mengatakan, saat ini dia diberi amanah untuk menjadi Wakil Ketua MPR. Salah satu tugas MPR, jelas Jazilul, adalah melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Dalam kesempatan itu, Jazilul menjelaskan, terbentuknya suatu negara adalah produk kesepakatan politik. "Para pendiri bangsa bersepakat untuk ber-Indonesia," tutur pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu. Dalam kesepakatan ada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Inilah kesepakatan harus dijaga," tegasnya.

Di hadapan ratusan warga masyarakat dan santri, Jazilul menuturkan, ketika para pendiri bangsa menyusun Pancasila terjadi perdebatan panjang dan serius. "Merumuskan Pancasila tidak mudah dan gampang," ungkapnya. Dari proses yang ada, tokoh-tokoh umat Islam rela menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta. "Pancasila merupakan hasil ijtihad dari para pendiri bangsa yang di antara mereka ada tokoh umat Islam," tuturnya. Jadi, tidak ada alasan umat Islam menolak Pancasila. Justru seharusnya umat Islam menjaga

warisan dari para tokoh umat Islam. Atas dasar itulah, Jazilul Fawaid mengajak semua untuk menjaga kesepakatan-kesepakatan dari para pendiri bangsa.

Alumni PMII itu menyebut, dalam setiap kepemimpinan ada momentum untuk melakukan perubahan. Untuk itu, dalam Pilkada yang akan datang, Jazilul mendorong agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. "Kita harus cerdas dalam memilih," paparnya. Ketika mencoblos yang membutuhkan waktu 1 menit, namun dampaknya bisa sampai lima tahun.

Selama dua hari di Cianjur, Jazilul Fawaid mengatakan, kabupaten ini perlu peningkatan sumber daya manusia, artinya fasilitas dan akses pada sekolah masih sangat perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia yang ada belum maksimal maka kreativitas dan potensi yang ada belum tergarap sepenuhnya. "Potensi yang ada di sini belum maksimal karena sumber daya manusianya," ungkapnya. Padahal potensi kabupaten ini sangat melimpah. Dalam suatu kesempatan, ia mengatakan, banyak orang makan beras dari olahan petani Cianjur. "Beras Cianjur sangat terkenal enakannya," paparnya. □

AWG

FGD Universitas Brawijaya

Serap Aspirasi Terkait Haluan Negara

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, pertengahan September lalu, membuka *Facus Group Discussion* di Hotel Atria Tangerang, Banten. Dalam rangka serap aspirasi kalangan akademisi dan birokrasi terkait wacana menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad melakukan kegiatan serap aspirasi kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan birokrasi beberapa lembaga negara serta kementerian melalui Focus Group Discussion (FGD), terkait wacana Haluan Negara sebagai arah perencanaan pembangunan nasional.

“Pandangan para profesional ini sangat

dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar haluan negara,” kata Fadel Muhammad, saat membuka FGD bertema: ‘Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional’, di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9/2020).

FGD yang diselenggarakan MPR bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Uni-

versitas Brawijaya (FIA UB) ini dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasajo (virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bappenas, Kemendagri, Kemenhan,



Kemenkeu dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.

Fadel Muhammad mengungkapkan, sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia. Pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB). Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Di era reformasi inilah haluan negara seperti GBHN muncul menjadi isu nasional

pandangannya tentang haluan negara. Menurut Fadel, sistem pembangunan nasional mesti lebih konsisten arahnya serta terintegrasi dari pusat sampai daerah, karena dalam NKRI seluruhnya harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian.

Namun, lanjut Fadel, walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidaklah mudah. Ada mekanisme ketat yang harus diikuti. Salah satunya, melakukan amandemen UUD.



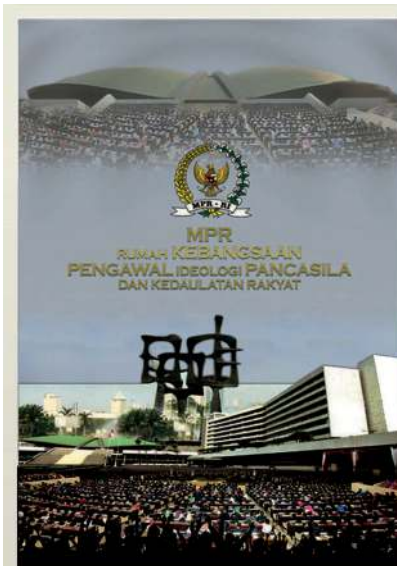
yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara, tapi ada juga yang merasa tidak perlu. MPR sendiri sigap merespon hal tersebut. Sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam.

“Kini MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut. Agar kebijakan yang diambil nanti lebih bagus, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tapi juga melibatkan elemen masyarakat lainnya, seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat. Untuk itulah MPR kerap melakukan serap aspirasi,” terangnya.

Kepada peserta FGD, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini menjelaskan pandangan-

Hal lainnya, tambah Fadel, adalah muatan materinya. Fadel melihat, materinya harus disusun dengan lebih sederhana, sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan, terutama oleh para kepala daerah. Selain itu, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat, seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.

Untuk itu, Fadel Muhammad berharap, pendapat dan pandangan para peserta FGD terkait berbagai hal tersebut. “Kami mengharapkan saudara-saudara sekalian bisa ikut memberikan kontribusi yang kita harapkan. Seluruh pemikiran yang keluar dari FGD ini akan kita tampung dan menjadi masukan di MPR untuk pedoman dalam penyusunan haluan negara,” ujarnya. □



KH. Hasyim Asy'ari

Kiai, Pejuang, dan Politisi

PROKLAMASI Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, merupakan buah perjuangan seluruh bangsa Indonesia, termasuk para ulama. Tokoh-tokoh Islam bahu membahu dengan tokoh-tokoh nasionalis, waktu itu, terlibat langsung dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka, sejak revolusi fisik hingga era perjuangan diplomasi. Salah satu ulama yang memiliki kontribusi besar terhadap tegaknya Negara Kemerdekaan Republik Indonesia (NKRI) adalah KH. Hasyim Asy'ari.

KH. Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Ia dikenal sebagai

lebih tua ketimbang dirinya.

Pada usia 15 tahun Hasyim berkelana memperdalam ilmu dari pesantren yang satu pesantren ke pesantren lain. Pesantren yang pernah singgahi untuk menimba ilmu, antara lain: Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis (Semarang), Pesantren Kademangan (Bangkalan), dan Pesantren Siwalan (Sidoarjo).

Kenyang dengan pendidikan dan pengajaran pesantren Nusantara, pada 1893 Hasyim Asy'ari berangkat ke Tanah Suci dan menetap

sebagai tempat tinggal. Hasyim mengajar dan melaksanakan salat berjamaah di tratak bagian depan. Sedangkan tratak bagian belakang dijadikan tempat tinggal. Saat berdiri, santrinya berjumlah 8 orang, dan tiga bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang.

Di kemudian hari pesantren Tebu Ireng semakin masyhur, dan melahirkan banyak ulama besar. Antara lain, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. R. As'ad Syamsul Arifin, dan KH. Achmad Siddiq. Karena keberhasilan para alumnya tak berlebihan jika Tebu Ireng diberi gelar sebagai



salah seorang ulama paling berpengaruh di Indonesia. Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 bertepatan dengan 24 Dzulqaidah 1287 H., di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kakek Presiden ke-4 KH. Abdurrahman Wahid ini wafat pada 25 Juli 1947 dan dikuburkan di Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari sebelas bersaudara pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah. Bakat kepemimpinan dan kecerdasan Hasyim Ashari sudah terlihat sejak masih kanak-kanak. Di antara anak-anak seusianya, ia kerap tampil sebagai pemimpin. Pada usia 13 tahun Hasyim sudah membantu ayahnya mengajar para santri, dan tak sedikit dari para santri itu usianya

di Mekkah selama 7 tahun. Selama di sana ia berguru kepada banyak ulama, antara lain: Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, Syaikh Mahfudh At Tarmisi, Syaikh Ahmad Amin Al Aththar, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Said Yamani, Syaikh Rahmaullah, Syaikh Sholeh Bafadlal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As Saqqaf, dan Sayyid Husein Al Habsyi.

Pada 1899 ia kembali ke Tanah Air dan mengajar di pesantren milik kakeknya, Kiai Usman. Tak berselang lama Hasyim Asy'ari membeli sebidang tanah Dukuh Tebuireng, luasnya sekitar 200 meter yang letaknya di sebelah barat Pabrik Gula Cukir, atau di arah timur Desa Keras. Di sana Hasyim Asyari mendirikan bangunan dari bambu (tratak)

salah satu pesantren paling besar dan paling penting di tanah Jawa. Sedangkan KH. Hasyim Asy'ari selaku pendiri dan pengasuh Tebu Ireng mendapat gelar Hadratus-Syaikh (Tuan Guru Besar).

Resolusi Jihad

Salah satu gagasan besar KH. Hasyim Asy'ari dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah seruannya untuk melawan dan mengusir penjajah yang dikenal Resolusi Jihad. Ide itu muncul untuk merespon rencana Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kala itu tentara NICA (Netherland Indian Civil Administration) bentukan Belanda membonceng pasukan Sekutu yang dipimpin Inggris, berusaha melakukan agresi ke tanah



Jawa (Surabaya).

Mengantisipasi tipu muslihat penjajah Belanda itu, Kiai Hasyim bersama para ulama menyerukan Resolusi Jihad, sebuah seruan melawan pasukan gabungan NICA dan Inggris. Kesepakatan melawannya Belanda Pasca Kemerdekaan itu ditandatangani di kantor NU Bubutan, Surabaya, pada 22 Oktober 1945.

Ada tiga butir yang menjadi isi dari Resolusi Jihad, yaitu: (1). Hukum membela tanah air adalah fardhu ain; (2). Bagi kaum muslimin yang berada dalam radius 94 Km wajib ikut berperang; dan (3) warga negara yang membantu penjajah adalah pengkhianat yang harus diperangi.

Berkat Resolusi Jihad ini arek-arek Surabaya terpanggil dan serentak bergerak melawan penjajah. Berbagai senjata mereka gunakan hingga puncaknya terjadi pada 10 November. Kala itu, Bung Tomo dengan suara menggelegar lewat corong radio memompa semangat arak-arek Surabaya dengan kalimat takbir: *Allahu Akbar ... Allahu Akbar*. Bersamaan dengan itu, di medan juang, arek-arek Surabaya berjuang dengan semangat membara dan tak takut mati. Buahnya, hari itu, pasukan Inggris dan NICA berhasil dipukul mundur.

Di belakang hari, tanggal dan bulan ditandatanganinya Resolusi Jihad (22 Oktober) dan pertempuran 10 November di Surabaya ditetapkan menjadi hari penting dalam kalender nasional. Yaitu: 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, dan 10 November sebagai Hari Pahlawan.

Namun, sebelum terjadinya kedua peristiwa bersejarah tersebut, nama Kiai Hasyim sendiri sudah disegani oleh penjajah. Karena pengaruhnya yang sangat kuat, Kiai Hasyim menjadi perhatian serius oleh penjajah. Baik Belanda maupun Jepang berusaha untuk merangkul Kiai Hasyim. Salah satu caranya dengan menganugerahkan bintang jasa



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

kepada Kiai Hasyim. Penganugerahan bintang jasa itu terjadi pada 1937 tapi ditolak Kiai Hasyim.

Cara-cara yang digunakan oleh Belanda atau Jepang untuk menarik simpati dari Kiai Hasyim itu ternyata tak mempan. Pada zaman penjajah Belanda, Kiai Hasyim sempat mengharamkan naik haji menggunakan kapal Belanda. Fatwa tersebut membuat Van der Plas (penguasa Belanda) menjadi bingung. Banyak umat Islam yang urung naik haji meski telah mendaftarkan diri.

Sebelum itu, tepatnya pada 1913 Masehi, intel Belanda mengirim pencuri agar berbuat keonaran di Tebuireng. Namun, sang pencuri malah tertangkap dan dihajar para santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan kubu Belanda untuk menangkap Kiai Hasyim dengan tuduhan pembunuhan.

Rupanya Kiai Hasyim sangat piawai dengan hukum Belanda. Ia mampu menepis semua tuduhan dan dia lepas dari jeratan hukum. Karena kehabisan akal, Belanda kemudian mengirim pasukan untuk memporak-porandakan pesantren yang baru berdiri 10-an tahun itu. Akibatnya, hampir seluruh bangunan pesantren porak poranda, dan kitab-kitab dihancurkan serta dibakar.

Pada masa penjajahan Jepang Kiai Hasyim menolak kewajiban berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo pada pukul 07.00 pagi. Penolakan dilakukan karena berbaris dan membungkukkan badan ke arah Tokyo adalah simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari. Akibat dari penolakan itu, Kiai Hasyim ditangkap dan ditahan secara berpindah-pindah. Selama dalam tahanan, Kiai Hasyim mengalami penyiksaan fisik yang sangat berat.

Setelah empat bulan dalam penjara, pada 18 Agustus 1942, Kiai Hasyim dibebaskan. Pembebasan dilakukan karena banyaknya protes dari para kiai dan santri. Pembebasan terhadap Kiai Hasyim juga terjadi berkat kepiawaian Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab Hasbullah melobi pembesar-pembesar Jepang, di Jakarta.

Pasca kumandang Proklamasi 17 Agustus, tepatnya 7 November 1945 KH. Hasyim Asy'ari terlibat dalam membidani partai politik bernama Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi). Dan, Kiai Hasyim juga diangkat sebagai Ro'is 'Am (Ketua Umum) pertama periode 1945-1947. □

MBO

Memasifkan Sosialisasi Empat Pilar

MPR dan UT Jalin Kerjasama

UNTUK lebih memasifkan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih dikenal dengan Sosialisasi 4 Pilar, MPR melakukan kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT). Penandatanganan kerjasama dilakukan di Ruang Delegasi, Kompleks MPR/ DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 18 September 2020. Dalam penandatanganan kerjasama itu pihak MPR diwakili oleh Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono, sedang dari pihak UT diwakili oleh Wakil Rektor UT Liestyodono Bawono Irianto.

Ma'ruf Cahyono mengatakan, acara penandatanganan kerjasama MPR dan UT dalam Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dijalin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan Rektor UT Prof. Ojat Darajat. "Pada hari ini merupakan tindak lanjut dari MOU itu", ungkapnya. "Saya dan Pak Liestyodono menindaklanjuti", tambahnya.

Menurut Ma'ruf Cahyono, sosialisasi merupakan amanat dari UU MD3 sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut perlu secara gotong royong atau kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat", kata pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan, MPR telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan berbagai perguruan tinggi. "Sosialisasi memerlukan kerjasama dengan melibatkan seluruh pihak tanpa terkecuali, termasuk perguruan tinggi dan kelompok strategis", paparnya. Mensosialisasikan nilai-nilai luhur bangsa, menurut Ma'ruf Cahyono, merupakan



Ma'ruf Cahyono

tanggung jawab semua.

Selanjutnya, Ma'ruf menuturkan, dengan semakin banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak maka Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika akan lebih dipahami oleh masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Sosialisasi harus dilakukan dengan berbagai metode dan mengikuti perkembangan zaman. "Kita sudah menggunakan informasi teknologi (IT) untuk melakukan sosialisasi", ungkapnya. Kemajuan IT itulah yang menurutnya juga perlu dikuasai agar sosialisasi bisa mengikuti perkembangan waktu.

Dalam kerjasama tersebut, baik MPR maupun UT, nantinya akan menyediakan narasumber untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Ma'ruf Cahyono menjelaskan, sudah banyak akademisi mengikuti *training of trainers* (ToT) yang digelar MPR. ToT merupakan kegiatan untuk mencetak

narasumber dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi. "Mereka yang sudah mengikuti ToT bisa kita berdayakan lewat kerja sama ini", ujarnya.

Ma'ruf Cahyono berharap, kerjasama ini bisa dikembangkan dan disinergikan, sebab antara MPR dan perguruan tinggi, UT, dalam beberapa hal memiliki tugas yang hampir sama, yaitu memberikan edukasi. Bila di perguruan tinggi ada lembaga penelitian maka di MPR juga ada Badan Pengkajian dan Komisi Kajian. Badan ini oleh alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, itu disebut memiliki bidang kajian (penelitian) sangat luas. "Ada kajian mengenai sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pelaksanaannya", ucapnya. Bicara mengenai konstitusi saja cakupannya sangat luas, meliputi seluruh bidang/dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Kalau mengkaji tentang ekonomi, pastinya juga akan mengkaji masalah konstitusi", demikian pula dengan bidang-bidang lainnya", sebutnya. Selanjutnya ia berharap kerja sama itu bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Sementara Liestyodono mengatakan, UT memiliki mahasiswa sebanyak 324.000 orang. Mereka tersebar di seluruh Indonesia bahkan ada yang di luar negeri. "Yang berada di luar negeri adalah para pekerja migran", ujarnya. Alumni yang dimiliki UT lebih dari 1,8 juta orang. Lembaga pendidikan ini memiliki 39 wilayah. "Jadi kami siap melakukan kerja sama untuk melakukan sosialisasi", tuturnya. □

AWG



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



Memperluas Pengaruh Bangun Pangkalan Militer

Sejak masa lalu negara-negara besar mempunyai keunggulan teknologi membangun pangkalan militer di negara lain untuk memperluas pengaruhnya. Pangkalan militer dibangun untuk kepentingan ekonomi dan menciptakan koloni. Hadirnya pangkalan militer asing di sebuah kawasan bisa meningkatkan ketegangan wilayah. Indonesia menolak kehadiran pangkalan militer asing dari manapun.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DARI waktu ke waktu, Cina sebagai salah satu negara yang memiliki luas wilayah dan berpenduduk terbesar di dunia semakin agresif dalam tata kelola hubungan antarbangsa atau dunia internasional. Negeri Panda ini semakin membuat tidak nyaman tetangganya. Vietnam dan Filipina merupakan negara yang paling merasakan kecongkakan dan dirugikan oleh Cina dalam masalah perbatasan dan klaim kepemilikan pulau terluar. Sebagai negara yang kekuatannya di bawah Cina membuat Vietnam dan Filipina tak bisa berbuat banyak menghadapi negeri Tirai Bambu itu.

Keagresifan Cina tidak hanya berhenti di Laut Cina Selatan. Di perbatasan dengan

India, ketegangan antara kedua negara itu kerap terjadi. Bila di wilayah perbatasan Cina – India terus memanas maka bisa jadi membuat kedua negara itu hidup dalam penuh tekanan.

Di negara Asia, selepas Jepang yang agresif dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, selanjutnya Cina sepertinya akan menggantikan posisi Jepang sebagai kekuatan militer dari Asia yang mampu menjungkirbalikkan kekuatan militer bangsa Eropa dan Amerika Serikat, baik di wilayah Asia maupun Pasifik, dalam Perang Dunia II.

Indikasi Cina sebagai kekuatan militer baru sudah di depan mata. Buktinya, Amerika Serikat bingung apa yang mesti dilakukan

ketika Cina semakin agresif di Laut Cina Selatan. Filipina dan Vietnam sepertinya sudah berteriak minta tolong pada Amerika, namun Paman Sam itu masih belum mampu memberi pertolongan yang dibutuhkan. Amerika berpikir seribu kali bila hendak menghantam kekuatan militer Cina, sebab kekuatan militer Cina tidak bisa dipandang sebelah mata.

Kementerian Pertahanan Amerika mempunyai dokumen yang berjudul *Perkembangan Militer dan Keamanan Dunia yang Melibatkan Cina di tahun 2020*, mengungkapkan, Cina akan membangun pangkalan militer di negara-negara Asia dan Afrika. Negara-negara yang dipilih untuk menjadi basis kekuatan militer di luar negaranya adalah Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Laporan Kementerian Pertahanan Amerika menyebutkan, membangun kekuatan militer di negara-negara itu untuk memperluas kekuatan Cina pada area yang lebih jauh dan luas.

Masuknya Indonesia sebagai salah satu negara yang diincar Cina untuk dijadikan pangkalan militernya membuat pemerintah, pengamat hubungan internasional, dan politisi bersikap. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan mengatakan, rencana pembangunan pangkalan militer asing di Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. “Kalau ada pangkalan militer asing berarti bangsa ini sudah tidak berdaulat,” ujar Syarif Hasan saat menghadiri suatu acara di Indramayu, Jawa Barat, 8 September 2020.

Alasan penolakan tak hanya itu, menurut anggota Komisi I DPR, ini bangsa Indonesia selama ini menjalankan politik bebas aktif. “Indonesia tidak ikut block kekuatan militer atau ideologi dari kekuatan-kekuatan yang ada,” tuturnya. Bila ada pangkalan militer, tegas Syarif Hasan, mencederai politik luar negeri yang selama ini kita dipegang, bebas aktif. Syarif Hasan dengan menyatakan: “Tolak pangkalan militer asing”. “Jangankan mengeksekusi, berpikir tentang pangkalan





Syarief Hasan

militer asing di sini pun tidak boleh”, tambahnya.

Senada dengan politisi Partai Demokrat ini, Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, dalam sebuah media online menyatakan, rencana pembangunan pangkalan militer Cina di Indonesia perlu diwaspadai. Alasannya, Indonesia adalah negara yang memegang teguh sikap politik luar negeri bebas aktif. Ketergantungan ekonomi Indonesia dari suatu negara, menurut Hikmahanto, tidak boleh menggoyahkan sikap politik luar negeri Indonesia yang selama ini dipegang, yakni bebas aktif. “Indonesia tak boleh memberi ruang atau menyediakan wilayah-



Hikmahanto Juwana

nya untuk penempatan tentara asing dari manapun”, tegasnya.

Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, juga tegas menolak pangkalan militer asing ada di Indonesia. Dalam konferensi pers, 4 September 2020, alumni Jurusan Hubungan Internasional UGM itu mengatakan, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.

Berbicara mengenai pangkalan militer atau benteng, sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Di tahun 1400-an dan 1500-an, Nusantara merupakan gugusan pulau yang kaya dengan sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Sebagai wilayah penghasil komoditas yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa membuat gelombang armada kapal niaga dan perang berdatangan menuju Nusantara. Bangsa Eropa, seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol merupakan bangsa yang berhasil tiba di Nusantara.

Mereka, bangsa Eropa, tiba di Nusantara berebut menguasai wilayah yang kaya dan menjadi sumber rempah-rempah. Untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasai, mereka membikin pangkalan militer. Hal itu bisa kita telusuri dari jejak-jejak peninggalan benteng bangsa Eropa yang ada di seujur negeri ini, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara. Bila kita berkunjung ke daerah Ternate dan Tidore, Maluku Utara, yang merupakan sumber utama rempah-rempah, di sana banyak benteng peninggalan Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris. Di antara benteng-benteng yang ada itu bahkan saling berhadapan.

Dari paparan di atas memperlihatkan dalam sejarah sebelum Indonesia merdeka, sudah banyak berdiri pangkalan militer atau benteng. Benteng yang ada fungsinya sama seperti pangkalan militer saat ini, memperluas pengaruh dan untuk kepentingan ekonomi. Jadi, sejak dulu Indonesia memang jadi incaran bangsa asing. Itu tak lepas, karena letak Indonesia sangat strategis, berada di antara dua benua dan dua samudera, dan di dalamnya terkandung berbagai kekayaan alam.



Retno Marsudi

Sebagai bangsa adidaya selepas Perang Dunia II, Amerika Serikat menancapkan pengaruhnya di berbagai sudut dan penjuru dunia. Mereka membangun pangkalan-pangkalan militer di berbagai negara. Amerika ingin mengendalikan wilayah laut yang berada di Pasifik, Samudera Hindia, dan Laut Cina Selatan. Untuk itu, negerinya Trump membangun pangkalan militer di Pulau Christmas, Pulau Cocos, Darwin, Guam, Filipina, Singapura, Vietnam, Kepulauan Andaman, dan Nicobar. Total pangkalan



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

militer Amerika di kawasan itu tercatat 13 pangkalan. Bila dilihat dari posisinya, pangkalan militer itu 'mengepung' Indonesia.

Dari ke-13 pangkalan militer yang paling dekat dengan Indonesia adalah pangkalan militer yang ada di Singapura, Filipina, Australia, dan Diego Garcia. Dalam suatu berita online disebutkan, pangkalan militer Amerika di Singapura sudah ada sejak 1960, saat itu Singapura masih berada di bawah koloni Inggris. Kali pertama di Pelabuhan Sembawang, tempat itu digunakan untuk sebatas perbaikan, logistik, dan istirahat dari para awak kapal perang.

Entah karena ketakutan Singapura terhadap Indonesia dan Malaysia, membuat fungsi pangkalan itu meningkat statusnya. Pada 1990, dari hasil perjanjian antara Singapura dan Amerika, pangkalan itu tak sekedar menjadi tempat perbaikan, logistik, dan istirahat, namun juga sudah meningkat menjadi pangkalan militer. Meski demikian, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyebut Sembawang hanya sebatas Komando Pusat Logistik Pasifik Barat Armada VII.

Pangkalan militer Amerika di Singapura posisinya bukan dekat lagi dengan Indonesia, namun sudah masuk dalam lingkaran wilayah Indonesia. Dari Batam, bisa jadi pangkalan ini persis di depan mata.

Satu lagi pangkalan militer Amerika yang paling dekat dengan wilayah Indonesia, dalam hal ini wilayah Nusa Tenggara Timur, Darwin. Kota besar paling utara Australia ini merupakan pangkalan militer yang

statusnya bisa dikatakan penuh. Ada ribuan marinir ditempatkan di Darwin. Sebagai pangkalan militer yang statusnya penuh, maka di tempat ini pasti ada berbagai macam jenis kapal perang yang siap digerakkan bila ada kepentingan.

Keberadaan pangkalan militer Amerika di Darwin telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Rencana penempatan pesawat tak berawak yang mematai-matai wilayah Samudera Hindia, termasuk Indonesia, konon membuat Indonesia mengirim nota protes kepada Australia dan Amerika. Indonesia meminta penjelasan mengenai kegiatan di pangkalan militer itu.

Tidak hanya Indonesia yang dikepung oleh pangkalan militer Amerika. Iran sebagai negara yang kaya minyak dan sering berlawanan dengan Amerika, juga mengalami

nasib yang sama, ada 11 pangkalan militer yang melingkari negaranya.

Pangkalan militer Amerika memang ber-tebaran di mana-mana. Untuk mengendalikan pangkalan militer yang berada di berbagai belahan dunia, Kementerian Pertahanan Amerika membentuk komando *United State North Command* (USNORTHCOM) yang membawahi wilayah Benua Amerika Utara. Untuk membawahi wilayah Amerika Selatan dibentuk *United State South Command* (USSOUTHCOM). Wilayah Timur Tengah dan Afrika ada komando *United State Central Command* (USCENTCOM). Di Eropa ada komando *United State Europe Command* (USEUCOM). Sedang di Asia Pasifik dan Australia ada komando *United State Pasific Command* (USPACAOM). □

AWG/dari berbagai sumber





Pangkalan Militer Asing Itu Cerita Masa Lalu

Pangkalan militer asing bercokol di suatu negara, itu merupakan cerita masa lalu. Selepas perang, negara pemenang menancapkan kekuatan di wilayah penduduk atau bekas jajahan. Pangkalan militer dibangun untuk kepentingan ekonomi.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

TAK HANYA Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer yang tersebar di banyak negara. Beberapa negara Eropa dan Asia juga memiliki pangkalan militer yang juga tersebar di banyak negara. Negara-negara itu adalah Inggris, Perancis, Rusia, India, Italia, Jerman, Jepang, China, dan Turki.

Pangkalan militer negara-negara itu

biasanya bekas daerah koloni atau daerah yang didudukinya. Inggris misalnya, mempunyai pangkalan militer di Kepulauan Falkland. Pulau ini letaknya di Samudera Atlantik. Pulau yang juga dikenal dengan nama Pulau Malvinas itu dulunya merupakan wilayah sengketa antara Inggris dan Spanyol - Argentina.

Dalam masa-masa bangsa Eropa gencar



melakukan penjelajahan untuk menemukan dunia baru lewat pelayaran, Falkland merupakan pulau yang selalu diperebutkan. Dalam *Wikipedia* diungkapkan, pulau itu kali pertama ditemukan oleh pelaut asal Belanda, Sebald de Weert. Weert menemukan pulau itu pada 1600, sehingga pulau itu dinamakan Pulau Sebald. Klaim itu dibantah oleh Inggris dan Spanyol. Menurut mereka, pelaut mereka-lah yang lebih dulu mendarat di Falkland.

Dari *Wikipedia* dapat diceritakan bahwa terjadi silih berganti pelaut dari negara-negara Eropa datang dan pergi ke Falkland. James Cook pernah mendarat di Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta, sebelum menemukan Australia, juga pernah mendarat di Falkland.

Menurut cerita, pada Abad XVIII, Louis de Bougainville, pelaut asal Perancis membangun pangkalan militer di Falkland bagian timur, tepatnya di Port Louis pada 1764. Meski Perancis sudah menguasai pulau itu, hal itu tak dipedulikan oleh pelaut asal Inggris. John Byron, pelaut dari Inggris, mendirikan bangunan serupa namun letaknya di Port Egmont di Falkland bagian barat. Pangkalan militer itu dibangun pada 1765.

Entah karena apa, Perancis pada 1766, menjual Port Louis kepada Spanyol. Setelah memiliki pangkalan itu, Spanyol mendeklarasikan perang melawan Inggris pada 1770. Tujuan perang itu dikobarkan adalah untuk menguasai Falkland secara keseluruhan. Namun, endingnya, masalah kedua negara itu akhirnya selesai ketika mereka sepakat membagi Falkland menjadi dua, timur dikuasai Spanyol dan barat dikuasai Inggris.

Masalah kepulauan itu selesai setelah perang antara Inggris dan Argentina. Setelah Argentina kalah dalam perang ditambah

dengan referendum rakyat Falkland yang lebih memilih Inggris daripada Argentina, membuat Falkland tak diributkan lagi oleh negara-negara jauh. Untuk memperkuat statusnya, Inggris membuat pangkalan militer di pulau itu.

Selain di Falkland, Inggris juga memiliki pangkalan militer di Pulau Ascension, Bahrain, Belize, Bermuda, Kanada, Siprus, Jerman, Gibraltar, Kenya, Monserrat, Nepal, dan Qatar.

Negara besar Eropa, Perancis juga memiliki pangkalan militer di banyak negara. Negara ini memiliki pangkalan militer di Gabon, Senegal, Uni Emirat Arab, Djibouti, Pantai Gading, Jerman, serta di wilayah koloninya, yakni: Guyana, Polinesia, Martinique, Kaledonia Baru, dan Reunion and Mayotte.

bekas pangkalan militer Uni Soviet yang berada di Georgia, Kazakhstan, Kirgiztan, Tajikistan, Ukraina, Moldova, Belarus, dan Armenia, sekarang dikendalikan dan dipegang oleh Rusia.

Rusia memiliki pangkalan militer tak hanya di bekas negara Uni Soviet. Negeri Beruang Merah itu juga memiliki pangkalan militer di Vietnam dan Suriah. Vietnam adalah negara yang disokong oleh Uni Soviet saat terjadi perang saudara Vietnam. Kemenangan Vietnam Utara yang sosialis atas Vietnam Selatan yang didukung Amerika Serikat membuat Uni Soviet (Rusia) diganjar dengan area pangkalan militer.

Sebagai salah satu negara Asia dan terbilang tidak memiliki agresivitas dalam hubungan antarbangsa, India rupanya juga

Somalia serta Ethiopia.

Keanehan negeri ini adalah dijadikan pangkalan militer oleh banyak negara. Negara yang membangun pangkalan militer di sini adalah Italia, Jerman, Cina, Jepang, Perancis, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Dengan luas wilayah setara dengan Donggala, pastinya pangkalan-pangkalan militer asing itu posisinya saling berhimpit dan berdekatan. Bersinggungan dan bersenggolan dalam lalu lintas kapal dan pesawat militer pastinya pernah terjadi di sana.

Dalam suatu berita online dikatakan, banyak negara membangun pangkalan militer di sana karena Djibouti berada di Semenanjung Bab el-Mandeb, gerbang ke Terusan Suez. Wilayah itu merupakan rute perdagangan yang sangat penting untuk



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Terlihat di sini Inggris dan Perancis memiliki pangkalan militer di Jerman. Hal demikian merupakan sisa-sisa Perang Dunia II. Pangkalan militer di Jerman dibangun setelah Jerman kalah dalam perang itu saat melawan Sekutu.

Ketika Uni Soviet berdiri, negara besar ini terhimpun dari banyak negara yang posisi negara itu ada wilyah Eropa dan Asia. Meski demikian, posisi sentral dan yang paling banyak mengambil peran serta kebijakan adalah Rusia. Ketika Uni Soviet pecah dan masing-masing negara berdaulat, kekuatan Rusia masih terbilang kuat dan mempunyai pengaruh di bekas negara Uni Soviet. Dari sinilah, pangkalan-pangkalan militer Uni Soviet tetap dikendalikan oleh Rusia. Bekas-

memiliki pangkalan militer, namun letaknya tidak jauh dari wilayahnya. Negara ini membangun kekuatan militernya hanya di sekelilingnya, seperti di Tajikistan, Bhutan, Seychelles, Madagaskar, Maladewa, dan Mauritius.

Dalam soal pangkalan militer, ada suatu 'keanehan' tersebut negara bernama Djibouti. Menurut *Wikipedia*, negara ini terletak di Afrika bagian timur. Ia berada di Teluk Aden, jalur menuju ke Laut Tengah. Negara yang luasnya setara dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, itu merdeka pada 27 Juni 1977. Negeri ini dulunya bekas jajahan Perancis sehingga dikatakan sebagai Somalia Perancis. Memang negara ini bertetangga dengan

ekonomi dunia. Selain itu, Djibouti negara yang dekat dengan kawasan konflik di Timur Tengah, sehingga posisinya sangat vital untuk menggerakkan kekuatan militer bila ada perang besar.

Dari negara-negara di atas, Amerika merupakan negara yang paling banyak memiliki pangkalan militer di negara lain. Negara yang dihinggapinya Amerika sebagai pangkalan militer adalah di Belgia, teritori Inggris, Jerman, Yunani, Italia, Spanyol, Kosovo, Portugal, Norwegia, Belanda, Turki, Bulgaria, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Bahrain, Kuwait, Israel, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Djibouti, Honduras, Kuba, Greenland, dan Diego Garcia. □

AWG/dari berbagai sumber



Pangkalan Militer di Nusantara untuk Berperang

Sebelum Indonesia merdeka, banyak pangkalan militer (benteng) asing yang berdiri di seujur nusantara. Mulai dari Aceh hingga Maluku Utara. Benteng-benteng itu awalnya untuk mempertahankan wilayah rempah-rempah. Selanjutnya berubah untuk mengawasi pemerintahan keraton dan peperangan.



Benteng Marlborough

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SALAH SATU tempat wisata yang menjadi andalan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, adalah Benteng Marlborough. Untuk mengunjungi benteng ini tidak sulit, sebab letaknya di tengah kota. Benteng ini usianya sudah ratusan tahun. Dibangun pada 1714 oleh *East India Company* (EIC).

Menurut sumber yang ada, benteng ini memiliki luas 44.000 meter persegi. Di

atasnya berdiri bangunan berukuran 240 x 170 m dengan ketinggian dinding bervariasi, antara 8 sampai 8,50 meter. Sebagai benteng, dindingnya memiliki ketebalan 1,85 sampai 3 meter. Benteng ini dilengkapi 72 meriam. Bila masuk ke dalam benteng ini dijumpai berbagai ruang dan bangunan. Ada yang berfungsi sebagai barak, penjara, dan perkantoran. Benteng ini memang difungsikan sebagai benteng pertahanan Inggris

saat menduduki Bengkulu. Dalam perjalanan waktu, Marlborough mengalami gonta-ganti pengendali. Dari 1714 hingga 1824 menjadi benteng Inggris, lalu 1825-1942 menjadi benteng Belanda. Saat Jepang melakukan pendudukan, 1942-1945, benteng itu digunakan Jepang sebagai basis militer dan pemerintahan.

Bila wisatawan jalan-jalan di Malioboro, Yogyakarta, dan hendak menuju ke Keraton Yogya, dan berhenti di perempatan Bank BNI, maka terlihat bangunan Benteng Vredenburg. Benteng ini juga obyek wisata peninggalan sejarah yang ditawarkan kepada wisatawan. Menurut sejarahnya, pada 1760, Belanda meminta izin kepada Sultan Hamengku Buwono I untuk membangun benteng di lokasi di mana benteng itu sekarang berdiri. Alasan Belanda untuk membangun benteng di sana untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya.

Padahal itu sebenarnya merupakan akal-akalan Belanda agar bisa mengawasi aktivitas Keraton Yogyakarta, sedangkan tujuan sebenarnya untuk bisa mengontrol aktivitas keraton. Benteng sangat efektif bagi Belanda untuk mengawasi keraton. Dulu, sebelum berdirinya banyak bangunan seperti saat ini, benteng Vredenburg dan keraton itu saling berhadapan. Intinya, Belanda membangun benteng untuk kesiapsiagaan bila Keraton Yogyakarta tidak menuruti kemauan atau melawan Belanda. Dari benteng itulah mereka bisa melakukan blokade, ancaman, dan penyerangan terhadap keraton.

Pada 1788, benteng itu secara penuh berada di bawah komando pemerintahan Belanda. Dari sinilah aktivitas pemerintahan kolonialisme Belanda dilakukan.

Sebelum membangun benteng di Yogyakarta, Belanda lebih dahulu membangun benteng di Surakarta (Solo). Tujuan mem-



Benteng Vredenburg



Benteng Van den Bosch



Benteng Fort de Kock

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

bangun benteng di Solo sama dengan tujuan membangun benteng di Yogyakarta, yakni mengawasi pemerintahan Keraton Surakarta. Benteng yang dibangun pada 1745 ini berada di Gladak. Benteng dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff. Bentuk benteng ini persis seperti bangunan benteng yang ada di Eropa, yakni dikelilingi oleh parit. Dengan adanya parit, apalagi ukurannya lebar, membuat musuh susah mendekati benteng.

Ketika terjadi Perang Jawa atau Perang Diponegoro, 1825-1830, pertempuran yang terjadi tidak hanya di Yogyakarta dan Magelang, namun juga merembet ke berbagai daerah di wilayah Jawa. Peperangan membela Pangeran Diponegoro juga terjadi di Ngawi dan Madiun. Daerah tersebut saat ini masuk wilayah Jawa Timur. Perlawanan di Madiun dipimpin oleh Bupati Kerto Dirjo, sedang di Ngawi dipimpin oleh Adipati Judodiningrat, dan Raden Tumenggung Surodirjo serta Wirotani.

Belanda bertempur hingga di Ngawi karena, pada masa itu, wilayah Ngawi mempunyai peran strategis, yakni sebagai jalur perdagangan. Peperangan yang terjadi di Ngawi tidak imbang, terbukti di awal perang, wilayah itu langsung bisa ditundukkan oleh Belanda. Untuk mempertahankan Ngawi maka di sana dibangun benteng. Benteng yang selesai dibangun pada 1845 itu memiliki kekuatan 250 tentara bersenjata lengkap, 6 meriam, dan 60 pasukan kavaleri. Benteng dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Johannes graaf

van den Bosch. Dan, benteng itu kemudian dikenal sebagai Benteng Van den Bosch.

Benteng ini tepatnya berada di Kelurahan Pelem. Benteng yang sekarang menjadi tujuan wisata itu memiliki luas bangunan 165 x 80 m. Bangunan ini berdiri di atas tanah 15 hektar. Belanda membangun benteng itu dengan meninggikan atau menguruk tanah di sekeliling bangunan, sehingga memberi kesan letak benteng lebih rendah. Itulah sebabnya Benteng Van de Bosch juga disebut Benteng Pendem.

Ketika di Jawa terjadi Perang Diponegoro, di Sumatera Barat terjadi Perang Paderi (1821-1837). Untuk memperkuat pertahanan Belanda, pada 1825, Kapten Bouer membangun benteng di Bukittinggi. Pada masa itu pemerintah Belanda berbagi tugas. Gubernur Jenderal fokus pada masalah di Jawa, sedang Wakil Gubernur Jenderal

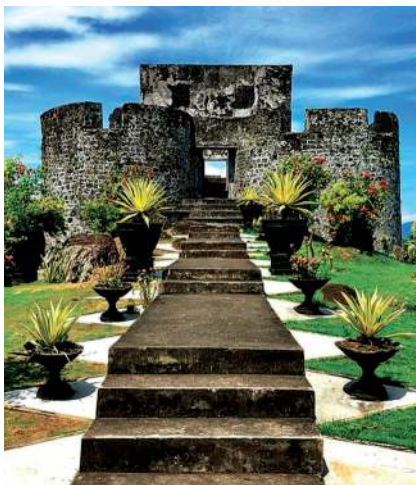
mengurusi Sumatera. Saat itu Wakil Gubernur Jenderal Belanda adalah Hendrik Merkus de Kock. Ia juga komandan Der Troepen atau Komandan Tentara Belanda. Dari sinilah benteng itu dinamakan de Kock, meski yang membangun Bouer.

Benteng itu dibangun tak sekadar untuk menahan serangan laskar Imam Bonjol, namun juga untuk menunjukkan bahwa Bukittinggi, Agam, dan Pasaman, merupakan daerah yang sudah ditundukkan.

Ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Ternate dan Tidore untuk memburu rempah-rempah, mereka berebut untuk segera menguasai wilayah-wilayah yang ada. Bila sudah menguasai, ia langsung membangun benteng pertahanan. Bila berkunjung ke Ternate dan Tidore, kita akan menjumpai puluhan benteng yang sisa-sisa bangunannya masih bisa kita lihat. Benteng-benteng yang ada di Ternate adalah Tolukko, Kalamata, Oranje, dan Nuestra Senora del Rosario. Sedangkan di Tidore terdapat benteng: Tahura, Rum, dan Tore. Benteng-benteng itu dibangun oleh Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris.

Dari benteng yang ada, Tolukko merupakan benteng yang masih terlihat utuh. Sekarang Tolukko menjadi tujuan wisata bila berkunjung ke Ternate. Benteng ini dibangun oleh panglima tantara Portugis, Fransisco Serao, pada 1540, dengan tujuan untuk mengamankan perdagangan cengkih. Belanda yang datang ke Ternate pada 1610 lalu merebut Tolukko. Dan, itulah sebabnya, benteng itu pernah disebut benteng Hollandia. □

AWG/dari berbagai sumber



Benteng Tolukko

Komjen Pol.(Purn.) Nanan Soekarna

Ketua Umum Volkswagen Indonesia Association

Komunitas Jangan Leha-leha, Dukung Program Negara

SEBAGAI bagian dari warga negara Indonesia setiap elemen masyarakat berkewajiban turut andil dalam berbagai program negara sesuai kapasitas dan kemampuannya. Salah satu program negara yang saya lihat sangat baik luar biasa adalah program Sosialisasi Empat Pilar MPR.

Sosialisasi tersebut menyasar seluruh rakyat Indonesia di berbagai pelosok. Nah, kita sebagai anggota komunitas penghobi mobil antik juga jangan lantas berleha-leha, kerjanya cuma jalan-jalan saja, tidak. Kita mesti ikut mendukung program baik itu. Di antaranya dengan komit mengimplementasikan nilai-nilai Empat Pilar tersebut, seperti menunjukkan akhlak dan sikap yang baik, bergotong royong, saling toleransi.

Dalam komunitas kami, pertama kami hafal Empat Pilar. Bahkan di seragam komunitas kami ada tertera tulisan Empat Pilar sebagai pengingat kami. Dituliskan sudah, diucapkan sudah, tinggal ditanam di hati dan pelaksanaannya saja.

Saya juga berharap, semua komunitas hobi di Indonesia harus melekatkan Empat Pilar dalam hati semua anggotanya, dan bersama-sama pemerintah saling mendukung, saling jalan beriringan agar semua damai, nyaman dan tentram. □



DER

Muhammad Yusuf

Direktur Pendayagunaan Pesisir KKP

Bersama Kita Jaga Maritim Indonesia



KEKAYAAN maritim Indonesia sangat luar biasa. Potensinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari produksi lautnya ataupun potensi wisatanya. Pemerintah, dalam hal ini KKP, sangat berupaya keras memaksimalkan dan menjaga potensi laut kita. Jangan sampai tidak maksimal atau malah diambil negara lain.

Menjaga maritim kita hendaknya harus menjadi keinginan semua rakyat Indonesia. Pemerintah dan semua elemen bangsa mesti bersatu padu bersinergi untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia.

Saya apresiasi dan salut dengan MPR yang juga sangat peduli dengan potensi maritim Indonesia. Saya rasa itu harus dijaga dan dikembangkan lagi dengan kegiatan-kegiatan nyata untuk menggugah seluruh rakyat untuk bagaimana memaksimalkan kekayaan maritim kita.

Terutama sekali menjaga dari kerusakan. Maritim kita sangat rentan kerusakan akibat dari perbuatan kita sendiri, baik disengaja atau tidak. Untuk itu, edukasi tentang hal ini mesti juga kita laksanakan bersama-sama dengan baik. □

DER

Ketika Masa **Jabatan Hakim MK** Semakin Panjang

Awal September 2020, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi undang-undang. Revisi terkait dengan kedudukan, susunan, kewenangan MK; pengangkatan dan pemberhentian hakim MK, serta perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK; perubahan usia minimal, syarat, dan tata cara seleksi hakim MK; serta penambahan ketentuan baru mengenai unsur majelis kehormatan MK. RUU MK itu disah setelah melalui proses perdebatan yang sangat dinamis. Berikut pendapat wakil rakyat mengenai UU MK.

Achmad Dimiyati Natakusumah, Anggota MPR Fraksi PKS

Hakim MK Jangan Sampai Terseret Kepentingan Politik



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBETULNYA kalau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) direvisi dan sudah disahkan menjadi undang-undang, batin saya tidak terima. Mengapa? Sebab, dahulu Ketua Panja yang ketok palu dan menjadikan undang-undang itu adalah saya. Waktu itu saya adalah pimpinan Badan Legislasi DPR.

Hakim Konstitusi saat ini tersusun dari tiga lembaga, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Masing-masing lembaga diwakili oleh 3 orang, sehingga ada 9 Hakim

Konstitusi. Terkait revisi mengenai batas perodesasi jabatan Hakim Konstitusi ini memang menjadi perdebatan dan kajian yang mendalam. Kalau kita bandingkan dengan perodesasi masa jabatan Hakim Konstitusi di Amerika Serikat, Korea, Jerman, dan beberapa negara lainnya, memang perodesasinya berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, ada yang dibatasi masa jabatan, dan model-model lainnya. Dalam masalah ini, saya lebih memilih dan seyogyanya masa jabatan Hakim Konsti-

tusi dibatasi. Alasannya, supaya norma dan aturannya jelas.

Mengenai anggota Majelis Kehormatan MK, itu merupakan hal-hal yang perlu dikaji, siapa-siapa saja yang layak menjadi anggota Majelis Kehormatan MK. Jangan seenaknya main tunjuk, jangan seenaknya ambil, karena kehormatan MK berada di Majelis Kehormatan itu. Untuk itu dipilih orang-orang yang betul paripurna. Jangan karena faktor *like* dan *dislike* menempatkan orang di majelis ini. Jadi perlu dibahas secara mendalam.

Hakim Konstitusi yang saat ini sudah menjabat dan RUU MK sudah disahkan menjadi undang-undang maka harus dilihat bagaimana konsideran dalam kejelasan masalah umur.

Intinya adalah bagaimana DPR harus terus mengawasi proses ketatanegaraan ini. Paling penting apa yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan kepentingan nasional. Jangan sampai Hakim Konstitusi masih keseret kepentingan politik praktis. Hakim Konstitusi harus benar-benar menjadi negarawan dan begawan hukum. Menjadi negarawan itu ada variable dan indikatornya. Jangan ada Hakim MK yang terkena masalah hukum lagi seperti yang

sudah-sudah. Ada Hakim MK yang terkena masalah hukum bisa jadi karena ada pengabaian dalam soal persyaratan, seleksi, prosedur, dan ketentuan lainnya dalam seleksi dan rekrutmen Hakim

Konstitusi.

Jadi, intinya jangan sampai undang-undang hanya berhitung ritme waktu kepentingan politik tertentu. Seharusnya undang-undang dibuat untuk kepentingan

bangsa dan negara dalam jangka waktu 20 sampai 50 tahun ke depan. Jangan hanya kepentingan negara pada saat ini. Inilah yang harus dijadikan pemikiran. □

AWG

Benny K Harman, Anggota MPR Fraksi Partai Demokrat

Hingga 2024 Tak Ada Hakim Konstitusi Pensiun

DISAHKAN revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi UU MK seperti petir di siang bolong, mengagetkan. Saya ibaratkan seperti Covid-19 datang tiba-tiba, diam-diam, namun mematikan.

Ceritanya, RUU ini masuk dalam RUU prioritas yang telah ditetapkan dalam Prolegnas Baleg untuk 2020. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Setelah disepakati sebagai RUU prioritas maka dibagi tugas antara pemerintah dan DPR. Dalam pembagian tugas, DPR mendapat tugas untuk mempersiapkan naskah RUU MK. Rapat Paripurna DPR menetapkan dan menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk mempersiapkan RUU sehingga Baleg kemudian membahas, mempersiapkan badan keahlian, mempersiapkan rancangan untuk dibahas di dalam pleno. Selanjutnya, pleno Badan Legislasi menyerahkan kepada Panja untuk membahas teknis detailnya. Kemudian panja melaporkan kembali dalam Pleno Baleg. Pleno Baleg menerima itu sebagai RUU usul inisiatif dewan untuk diajukan ke rapat paripurna dewan yang disetujui menjadi RUU usul inisiatif dewan.

Pengesahan RUU ini sebagai RUU inisiatif dewan, kalau tidak salah, dilakukan bersamaan dengan rapat paripurna untuk menerima atau menolak Perppu. Kami salah satu fraksi yang menolak pembahasan RUU karena ada wabah Covid-19. Karena kami oposisi makanya kalah. Rapat paripurna menyetujui RUU MK menjadi RUU usul inisiatif



dewan. Rapat paripurna kemudian menugaskan komisi III untuk membahas ini.

Lalu apa yang menjadi substansi RUU MK? Substansi utamanya adalah: *Pertama* berkaitan dengan masa jabatan Hakim MK. Maksudnya, usia berapa dia diterima dan usia berapa dia diberhentikan. RUU diajukan oleh dewan, jelas sekali usia minimumnya 60 tahun, usia maksimumnya 70 tahun. Pemerintah kemudian mengubah bukan 60 tahun tapi 55 tahun. Usulan pemerintah itu disepakati fraksi pendukung. Namanya, pemerintah ya pasti didukung oleh fraksi mayoritas pendukung di Parlemen.

Kedua, dalam RUU inisiatif dewan itu, masa jabatan hakim tetap 5 tahun dan bisa dipilih

kembali setelah dievaluasi oleh instansi (MA, Presiden, dan DPR) yang mengirim mereka menjadi hakim MK. Walaupun masa pensiun 70 tahun, DPR mengusulkan supaya setiap lima tahun dievaluasi. Bila evaluasinya bagus ya dilanjutkan. Tetapi usulan ini ditolak oleh pemerintah. Dari sini tidak ada masa jabatan Hakim MK. Ia masuk usia 55, pensiun 70 tahun.

Ketiga, apakah UU MK sudah berlaku dan menggunakan undang-undang ini sebagai kerangka hukum kerja mereka di sana. Bila sudah berlaku maka sampai 2024 tidak akan ada hakim MK yang dipensiunkan dan tidak ada yang berhenti. □

AWG

Kota Pekanbaru, Riau

Sosialisasi Empat Pilar MPR Ala Panggung Toktan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PAGELARAN Seni Budaya Nasional dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar yang satu ini memang dibuat dalam format berbeda. Berlangsung di kompleks Panggung ZK (Ziarah Kesenian) Toktan (Datok Jantan) di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Ahad (23/08), acara pagelaran seni budaya dikemas dalam bentuk yang jauh dari formal alias santai. Ini adalah kegiatan kedua, setelah sehari sebelumnya, kegiatan serupa diselenggarakan di sebuah hotel di Bumi Lancang Kuning tersebut.

Tuan rumah kali ini adalah Panggung ZK Toktan, sebuah komunitas yang membina beragam kegiatan seni budaya dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). Acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dianisiasi oleh Idris Laena, anggota MPR dari dapil Riau, ini juga menampilkan seni budaya Melayu Riau. Tapi, tempat penyelenggaraannya bukan di gedung ber-AC, tapi di tanah lapang yang beratapkan tenda. Terasa gerah, itu tak bisa di hindari. Udara panas dari terik matahari bebas masuk ke arena tempat acara yang tanpa dilengkapi kipas angin, apalagi pendingin udara atau AC.

Meski demikian, acara sosialisasi Empat Pilar MPR dengan metode pagelaran seni budaya ala Panggung Toktan ini berjalan lancar. Tamu

kehormatan yang hari itu hadir adalah Ir. H.M. Idris Laena, Ketua Fraksi Golkar di MPR RI yang juga Ketua Badan Penganggaran MPR. Selain Idris Laena, juga hadir anggota MPR lainnya, yaitu: Dr. Intsiawati Ayus, SH., MH., (Kelompok DPD), Sadarestuwati, SP., M.M.A., (Fraksi PDI Perjuangan), dan Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I., (Fraksi PKB).

Dari Setjen MPR sebagai penyelenggara acara hadir: Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM.; Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR Maifrizal, SE., MM., Akt.; Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Sekretariat Badan Penganggaran MPR, Rharas Esthining Palupi. Serta cukup banyak tokoh, seniman, budayawan menjadi peserta acara itu, antara lain: HR. Maizir MIT (Ketua Raja Indragiri), Dr. H. Khaidir (Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Riau), R. Yose R. Zein (Kadis Kebudayaan Provinsi Riau), Fauzi Kadir (Tokoh Masyarakat Riau), Dheni Kurnia (penyair).

Acara pagelaran seni budaya Melayu di Panggung Toktan ini dipandu langsung oleh H.A. Aris Abeba, yang tak lain adalah penyair dan pendiri Panggung Toktan. Di Panggung Toktan, sebuah komunitas untuk membina para seniman dan UMKM ini, kakek 64 tahun ini



menempatkan dirinya dalam posisi sebagai imam, sementara pemimpin Panggung Toktan diserahkan kepada puterinya, Qori Islami. Karena acara ini berlangsung di komunitas seniman maka acaranya pun mengikuti selera seniman.

“Di Panggung Toktan tidak mengenal run-

down acara. Setiap acara yang diselenggarakan di sini harus mengikuti peraturan AD/ART yang berlaku di Panggung Toktan,” ungkap Aris Abeba yang hari itu mengenakan penutup kepala dari kain kotak-kotak hitam putih. Acara diawali dengan prosesi penyambutan tamu. Para tamu kehormatan disambut

dengan upacara adat Melayu, sekapur sirih. Dan, selanjutnya para tamu diantar ke tempat acara yang telah disiapkan.

Sejenak tamu undangan dihibur oleh lagu-lagu yang disajikan oleh komunitas penyanyi jalanan. Setelah itu acara demi acara pun berlangsung. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai lagu Indonesia Raya, sebelum masuk acara inti, diselingi acara musikalisasi puisi. Puisi berjudul “Talang di Langit Palestina” karya Dheni Kurnia dibawakan oleh Qori Islami, putri Aris Abeba, diiringi petikan gitar Syahfitri, yang tak lain adalah suami Qori. Puisi dibawakan dengan penuh penghayatan dan menyayat perasaan. Maka tak heran bagi yang mendengarkan ikut larut dalam keharuan.

Setelah itu, pembawa acara mempersilahkan

kan Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, maju menyampaikan kata sambutan. Tak biasanya pula, sambutan harus disampi sambil duduk di kursi. "Aturan di sini memang begitu, untuk perempuan harus duduk, tak boleh sambil berdiri," begitu alasan Aris Abeba. Syarat lainnya, sebelum dan sesudah menyampaikan kata sambutan harus berpantun.

Begitu pula ketika Idris Laena maju ke atas panggung menyampaikan materi sosialisasi, ketentuan yang berlaku lebih longgar. "Karena Pak Idris laki-laki boleh berdiri dan boleh duduk. Hanya saja politisi partai Golkar yang sudah empat periode menjadi anggota legislatif, tiga periode di antaranya ditugas-

Selanjutnya, sebagai narasumber, Idris Laena memaparkan tentang tugas dan wewenang MPR. Kepala Badan Penganggaran MPR ini menjelaskan, selain melakukan tugas-tugas konstitusional, MPR juga diberi amanat oleh undang-undang untuk menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan, yakni: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Bukan hanya itu, menurut politisi Partai Golkar asal Riau ini, MPR juga ditugaskan mengkaji sistem ketatanegaraan kita, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep

Idris, agama sangat berpengaruh. Namun, setelah agama dijadikan alat kekuasaan maka timbul gerakan yang dimotori oleh Marxisme dan Leninisme. Dan, Rusia pun berubah menjadi negara komunis, karena tidak lagi mempercayai agama.

Jadi, menurut Idris Laena, apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan juga Rusia itu, karena mereka tidak memiliki konsensus yang dibuat secara bersama-sama, diakui oleh rakyat, yang dapat menyatukan mereka. "Alhamdulillah kita punya yang namanya Empat Pilar Kebangsaan yang dapat mempersatukan bangsa yang berpenduduk 260 juta ini," ungkap Idris Laena.

Idris Laena kemudian menutup pidato



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

kan di MPR, memilih sambil duduk. Tapi Idris Laena juga diminta mengawali pidatonya dengan pantun,

Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, dalam laporannya selaku pelaksana sosialisasi menjelaskan bahwa MPR memilih Pagelaran Seni Budaya sebagai salah satu metode sosialisasi dengan tujuan untuk ikut melestarikan seni budaya daerah agar jangan sampai punah. Untuk itu, Siti Fauziah menyampaikan ucapan terima kasih kepada datok Aris Abeba yang sudah ikut menjaga dan melestarikan seni budaya, dengan membina generasi di bawahnya. Juga kepada semua yang hadir, Siti Fauziah berharap, agar ikut menjaga serta melestarikan seni budaya yang kita miliki. "Hal ini penting dilakukan, karena di dalam seni budaya terdapat tuntunan, panutan, dan tentunya tontonan," ujar Siti Fauziah.

yang ada atau belum. Sesuai dengan tugas konstitusionalnya, MPR dapat mengubah UUD asal sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya saja ada konsensus bahwa yang tak boleh diubah adalah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kesempatan itu, Idris Laena juga memceritakan tentang pengalaman spiritualnya ketika melakukan kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah yang selalu bergolak, seperti Lebanon, Palestina, Yordania, dan Syria. Berdasarkan pengalaman spiritual itu, Idris menjadi tahu bahwa yang pemicu hingga terjadinya pergolakan adalah konflik internal di negara-negara itu.

Begitu juga saat melakukan kunjungan ke Rusia. Di sini, di negara komunis itu, Idris menyaksikan adanya Gereja Kristen Ortodok peninggalan kerajaan yang telah menguasai Rusia selama 300 tahun. Saat itu, menurut

dengan membacakan sebuah puisi yang bercerita tentang asap. Judulnya "Melawan Asap". Usai itu, sebelum kembali ke tempat duduk semula, Idris diminta untuk membubuh coretan di atas kain putih yang disiapkan di pojok panggung. Dan, Idris pun menoreh kain putih itu dengan canting disaksikan oleh Intsiawati Ayus, Sadarestuwati, Eem Marhamah Zulfa Hiz, dan Siti Fauziah.

Apa yang yang dilakukan Idris Laena ini adalah proses awal dari pekerjaan membatik. "Nanti akan diteruskan oleh para pembatik dari Seroja Dara sampai menjadi kain batik. Hasilnya, nanti akan kami serahkan kepada MPR," kata Aris Abeba. Seroja Dara adalah komunitas kerajinan batik di bawah binaan Panggung Toktan. Hasil produksinya telah dijual di pasaran, dan bahkan sudah diekspor ke negara tetangga, Malaysia. □

SCH/JAZ

MPR Ingatkan Pesan Bung Karno: Jasmerah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN alim ulama, santri, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengingatkan, sejak lama umat Islam Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan negaranya. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan warisan dari jihad para ulama dan umat Islam.

Karena itu, Hidayat Nur Wahid mengajak umat Islam untuk aktif mengisi kemerdekaan, sebagai bentuk syukur kepada Allah dan sebagai ucapan terima kasih kepada para ulama. Caranya, menurut Hidayat, ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan juga mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan.

“Sungguh disayangkan jika sampai sekarang masih ada umat Islam yang menganggap bahwa kehidupan demokrasi itu bid’ah, pemilu juga bid’ah, karena tidak ada di zaman Nabi. Padahal, mereka itu juga pakai handphone, nonton televise, dan itu semua tidak dijumpai di masa Rasulullah,” papar Hidayat.

Hidayat mengemukakan hal itu secara virtual dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ponpes Annihayah, Dusun Krajan Satu, Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (5/9). Selain Hidayat, sosialisasi itu juga menghadirkan narasumber H. Ahmad Syaikh, anggota MPR RI Fraksi PKS. Dan, dihadiri oleh pengasuh ponpes Annihayah, K.H. Tatang Syihabuddin.

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid mengingatkan, hubungan antara umat muslim dengan negaranya kerap diusik oleh kelompok masyarakat yang tidak ingin melihat keserasian hubungan antara umat Islam dengan negaranya. Mereka itu adalah kelompok Islamophobia.

“Mereka mengira, antara Islam dan Indonesia tidak ada hubungan apapun. Itu terjadi karena mereka melupakan sejarah, melupakan pesan Bung Karno berisi Jasmerah —jangan sekali-kali melupakan sejarah,” kata Hidayat lagi. Umat Islam dan Indonesia, tegas Hidayat, memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk kalangan Nahdliyin misalnya, orang NU tidak boleh melupakan kiprah besar K.H. Hasyim

As’ari, dengan resolusi Jihad.

Resolusi Jihad ini melahirkan gerakan yang mampu mengobarkan semangat santri dan arek-arek Surabaya melawan penjajah Belanda, hingga melahirkan perlawanan 10 November. “Mereka tidak memikirkan upah dan jasa. Yang ada dalam benaknya adalah berjihad membela bangsa dan negara dari penjajahan, meski nyawa taruhannya,” ungkap Hidayat.

Sementara itu, anggota MPR Fraksi PKS Ahmad Syaikh mengajak masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila, dimulai dari rumah tangga masing-masing. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini pandemi corona belum berlalu. Karena itu, warga Karawang harus tetap menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat.

Pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar di ponpes Annihayah ini memang memenuhi ketentuan memenuhi protokol kesehatan. Semua peserta wajib mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Serta para peserta dilarang berkerumun terlalu dekat. □

MBO

PSB Pekanbaru

Memberikan Pemahaman Empat Pilar lewat Seni Budaya Melayu



Siti Fauziah



Intsiawati Ayus

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DENGAN memberlakukan ketentuan protokol kesehatan yang ketat, sosialisasi Empat Pilar MPR berlangsung di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu malam (22/08/2020). Sosialisasi dengan metode Pagelaran Seni Budaya Melayu Riau itu mendapat sambutan hangat oleh para peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai komunitas yang ada di Kota Pekanbaru, Riau.

Sosialisasi Empat Pilar MPR tidak boleh berhenti karena perintah undang-undang. Dan, “tujuan utama sosialisasi adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya Empat Pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., dalam sambutannya pada acara pembukaan Sosialisasi Empat Pilar dengan metode Pagelaran Seni

Budaya Nasional di Pekanbaru, Riau, Sabtu malam (22/8/2020).

Nah, karena di Bumi Lancang Kuning, Riau, kental akan budaya Melayu, maka kegiatan sosialisasi dikemas dalam bentuk Pagelaran Seni Budaya Melayu Riau. “MPR yang menyelenggarakan pagelaran seni budaya ini bukan hanya untuk memberi hiburan semata, namun juga bertujuan ikut melestarikan seni budaya itu sendiri,” ungkap Siti Fauziah yang biasa disapa Bu Titi.

Kenapa pelestarian seni budaya ini dinilai penting? “Karena di dalam seni budaya itu terkandung semua unsur atau nilai yang dibutuhkan untuk kehidupan berbangsa. Selain unsur tontonan, hiburan, juga mengandung tuntunan,” ungkap Siti Fauziah. Maka dari itu, Siti Fauziah mengajak para peserta dan tamu undangan untuk terus menjaga seni budaya agar

jangsan sampai punah.

Tentang arti pentingnya seni budaya juga dijelaskan oleh Anggota MPR dari Kelompok DPD asal Riau, Dr. Intsiawati Ayus, SH., MH. Ketika membuka Pagelaran Seni di Pekanbaru ini, Bu lin —begitu ia biasa disapa— menyatakan, seni diciptakan untuk memberi rasa senang. “Karena seni memang diciptakan dengan senang dan dinikmati dengan senang pula. Jadi, antara karya seni dan penikmat seni sama-sama senang sehingga tercipta harmonisasi, rasa senang, dan bahagia,” katanya.

Lebih dari itu, tegas Intsiawati Ayus, seni dapat mempertajam rasa kemanusiaan, rasa nasionalisme, dan rasa patriotisme. “Semua rasa inilah yang mempersatukan bangsa,” ujar Bu lin seraya menambahkan bahwa siapa yang tidak suka akan seni, dia termasuk tidak kreatif dan tidak aspiratif.





"Ibarat sayur tanpa garam," katanya.

Karena itu, Bu lin bangga bahwa seni budaya Melayu termasuk warisan budaya Nusantara yang adiluhung sebagai wujud dari kebhinnekaan Indonesia. Apalagi tujuan dari sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Jadi, lanjut Bu lin, berbicara soal tatanan kehidupan tentu yang dituju adalah nilai. Saat bicara Pancasila, nilai yang dituju adalah moral dan etika. Lalu bicara soal UUD NRI Tahun 1945 sasarannya adalah tatanan hukum. Begitu pula kalau bicara NKRI, yang bertangan wilayahnya dari Sabang sampai

Merauke maka nilai yang dituju adalah rasa nasionalisme dan patriotisme. "Cubit Sabang, Merauke menjerit," ungkap Bu lin menggambarkan rasa nasionalisme dan patriotism itu. Dan, kalau bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika maka nilai yang ingin dicapai adalah saling menghormati dan saling menghargai. "Itulah nilai-nilai Empat Pilar yang menjadi karakter bangsa," katanya.

Pagelaran Seni Budaya Melayu malam itu betul-betul menggambarkan suasana kebhinnekaan. Sebuah tari kolosal yang merupakan rangkaian tarian-tarian nusantara, tampil beturut-turut tanpa jeda, yakni: tari piring (Sumatera Barat), tari ttor (Sumatera Utara), tari ondel-ondel (Betawi, Jakarta), tari Bali, tari kipas

(Sulawesi Selatan), dan tari sajojo (Papua). Dan, tentu tak ketinggalan kesenian Melayu, seperti: silat, tari persembahan, tari Lancang Kuning, puisi, dan lagu-lagu perjuangan dibawakan oleh grup musik yang tergabung dalam Komunitas Kampung Musisi Pekanbaru.

Tamu undangan yang hadir malam itu cukup antusias menyaksikan pagelaran Seni Budaya Melayu Riau. Selain Intsiawati Ayus acara ini juga dihadiri Ir. HM. Idris Laena (Ketua Fraksi Golkar MPR), Sadarestuwati, SP., M.MA., (Anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan), dan Eem Marhamah Zulfa Hiz, STh.I (Sekretaris Fraksi PKB MPR) serta para tamu dan undangan lainnya. □

SCH/JAZ

Universitas Yudharta Pasuruan

Bamsoet Resmikan Gedung Bhinneka Tunggal Ika



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meresmikan Gedung Bhinneka Tunggal Ika di Universitas Yudharta, Pondok Pesantren Ngalah, Pasuruan, Jawa Timur. Di kompleks tersebut, sudah berdiri Aula Pancasila, Gedung NKRI, dan Gedung UUD NRI Tahun 1945. Keempat sarana dan prasarana tersebut menjadi tonggak implementasi Empat Pilar MPR RI di kehidupan kampus dan pondok pesantren.

Bersama pengasuh pondok pesantren Ngalah, perwakilan pemuka agama serta Forkopimda Kabupaten Pasuruan, Bamsoet melepas 17 burung puter putih lambang kemakmuran dan menandatangani Ikrar Catur Pilar Indonesia. Berisi tiga butir pernyataan: *Pertama*, setia kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, setia menjaga keutuhan NKRI. *Ketiga*, setia menghargai Bhinneka Tunggal Ika.

“Para santri dan mahasiswa adalah generasi milenial yang merupakan generator, sekaligus kreator kemajuan bangsa. Kalianlah agen perubahan yang mampu menggerakkan roda zaman dan memberi warna serta corak kehidupan bangsa. Keberadaan sekitar 18 juta santri yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, di mana 5 juta di antaranya adalah santri mukim yang menempati 28.194 pesantren menjadi aset berharga bangsa Indonesia dalam menggapai Indonesia Emas 2045,” ujar

Bamsoet dalam peresmian Gedung Bhineka Tunggal Ika sekaligus Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Yudharta, Pondok Pesantren Ngalah, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, akhir Agustus lalu.

Turut hadir antara lain Wakil Bupati Pasuruan KH. Abdul Mujib Imron; pengasuh Pondok Pesantren Ngalah, KH. Sholeh Bahruddin; Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, Dr. Kholid Murtadlo; Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan; Kajari Pasuruan Ramdhanu Dwiantoro; Dandim Pasuruan Letkol Burhan Fajari Arfian; Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan; dan Ketua Pengadilan Negeri Bangil AFS Dewantoro. Kedatangan Bamsoet di sambut

oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Fadil Imron.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, di tengah pandemi Covid-19 yang berat ini, bangsa Indonesia juga masih dihadapkan pada tantangan lain yang tak mudah. Di antaranya, melemahnya rasa toleransi dalam keberagaman, demoralisasi generasi milenial bangsa, mudarnya identitas dan karakteristik bangsa, masih tingginya kesenjangan sosial, penyalahgunaan Narkoba, hingga merebaknya LGBT yang tak sesuai jati diri bangsa.

“Survei LSI Tahun 2018 menemukan dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan





sekitar 10%. Pada 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2%, dan hingga 2018, angkanya turun menjadi 75,3%. Kampus dan pondok pesantren harus menjadi garda terdepan dalam membentengi Pancasila sekaligus menyiapkan generasi muda agar siap memegang tongkat estafet kepemimpinan. Tak terjerumus dalam berbagai permasalahan, apalagi sampai mempertentangkan Pancasila,” tandas Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini mengungkapkan, negara secara de facto dan de jure sudah mengakui keberadaan pondok pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ditandai dengan disahkannya UU No.18/2019 tentang Pesantren dalam Rapat Paripurna DPR RI 24 September 2019, beberapa minggu menjelang akhir masa jabatan Bamsuet memimpin DPR RI.

“UU tersebut memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memberikan dukungan pendanaan melalui Dana Abadi Pesantren yang diambil dari Dana Abadi Pendidikan, berapa besarnya masih menunggu Peraturan Presiden,” ungkap Bamsuet.

Di akhir acara Sosialisasi Empat Pilar MPR

RI, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memberikan hiburan kuis ‘Empat Pilar MPR RI’ kepada para santri dengan hadiah utama sepeda ‘Bromsoet’ dan berbagai hadiah menarik lainnya. Keceriaan menjadi bagian yang tak boleh dilupakan, agar penyampaian materi sosialisasi tak selalu kaku dan tegang.

“Tertawa bahagia penuh keceriaan merupakan bagian dari meningkatkan imunitas tubuh dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, termasuk melawan virus

Covid-19. Terpenting jangan kebablasan, karena di luar sana masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Terutama dalam menyemai toleransi antarumat beragama. Pondok pesantren harus menjadi leading sectornya. Ingattah selalu pesan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib RA, yang menyatakan bahwa dia yang bukan saudaramu seiman adalah saudara mu dalam kemanusiaan,” pungkas Bamsuet. □



Kunjungan ke Indramayu

MPR Serap Aspirasi Rakyat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN warga masyarakat yang terdiri dari pemuda dan aktivis partai politik berkumpul di sebuah gedung pertemuan di Desa Bangkaloa, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (8/9/2020). Kehadiran mereka di gedung pertemuan yang berada di samping lintasan Pantai Utara Jawa (Pantura) itu untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal dengan sebutan Empat Pilar MPR. Acara itu dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Syarif Hasan didampingi anggota MPR Fraksi Demokrat, E. Herman Khaeron.

Di hadapan peserta sosialisasi yang datang dari seluruh penjurur Indramayu, Syarif Hasan menuturkan, kehadirannya di kabupaten yang terkenal penghasil mangga itu adalah untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Sosialisasi merupakan salah satu tugas MPR", ujarnya.

Sebagai negara yang wilayahnya terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Talaud hingga Rote, di mana berjajar ribuan

pulau yang didiami oleh penduduk yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang beragam, namun semua sepakat hidup dalam NKRI. "Meski berbeda-beda, namun kita tetap satu seperti semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika", paparnya.

Menurut pria asal Sulawesi itu, Bhinneka Tunggal Ika sudah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan keseharian. "Kita sudah tidak memperlakukan perbedaan. Tak ada masalah lagi dalam keragaman. Dan, hal-hal inilah yang perlu kita jaga," tegasnya.

Syarief Hasan selanjutnya menjelaskan mengenai keinginan dari masyarakat untuk melakukan amendemen UUD, dalam kaitannya untuk menghidupkan kembali haluan negara model GBHN. Selain itu, melalui amendemen ini juga ada keinginan untuk memperkuat DPD. Soalnya, "DPD itu lembaga legislatif, namun tugasnya beda dengan DPR dan MPR," ungkap Syarif Hasan. Serta ada juga wacana untuk mengubah periode masa jabatan Presiden.

Mengenai aspirasi-aspirasi itu, mantan Menteri Koperasi dan UMKM itu menegaskan bahwa MPR mendengar semua aspirasi masyarakat. Namun, kata Syarif Hasan, kita tak boleh buru-buru melakukan amendemen. "Tetapi kita tetap mendengar aspirasi masyarakat yang macam-macam itu," paparnya.

Dalam masalah amendemen, Syarif Hasan menuturkan, MPR menjaring aspirasi masyarakat. Sehubungan dengan itulah dia melakukan kunjungan ke perguruan-perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan komponen masyarakat lainnya. "Seperti saat ini di Indramayu, saya juga menangkap aspirasi masyarakat mengenai berbagai hal", ungkapnya.

Bagi Syarif Hasan, yang lebih penting bagi kita sebenarnya adalah mempertahankan yang sudah bagus. Lebih penting lagi, menurut politisi Partai Demokrat ini, kita fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Seperti mendorong anak muda memperoleh pekerjaan dan meningkatkan

pendapatan mereka agar lebih besar”, ucapnya. Ia juga menginginkan agar generasi muda meningkatkan hubungan dengan berbagai elemen masyarakat agar bisa menjalin kebersamaan. Dengan kebersamaan akan membawa masa depan yang lebih baik.

Dalam acara sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, Syarif Hasan juga memaparkan tugas dan wewenang MPR. Dijelaskan oleh Syarif Hasan, sebelum dilakukan amandemen UUD, MPR merupakan lembaga tertinggi. Sebagai lembaga tertinggi, salah satu wewenang MPR pada masa itu adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Setelah amandemen, MPR menjadi lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR. “Pemilihan Presiden pun tidak lagi dilakukan di MPR, namun dipilih langsung oleh rakyat,” paparnya.

Meski sebagai lembaga negara, kata Syarif Hasan, MPR tetap memiliki wewenang tertinggi, yakni mengubah dan menetapkan UUD. Kewenangan tertinggi lainnya adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden dan juga bisa memakzulkan Presiden bila terbukti melanggar.

Selepas bertemu dengan para pemuda dan aktivis partai politik, selanjutnya di tempat yang sama, Syarif Hasan bersilaturahmi dengan para habib, ulama, dan tokoh umat Islam. “Terima kasih atas kehadirannya,” ujarnya. Pertemuan antara MPR dengan para pemuka agama Islam itu sebagai salah satu bentuk silaturahmi. “Barang siapa memelihara silaturahmi akan



dipanjangkan umur, dilipatgandakan rezeki, dan dikabulkan cita-citanya”, ujar mantan Menteri Koperasi dan UMKM itu.

Dalam kesempatan tersebut, Syarif Hasan mengajak para pemuka agama Islam di Indramayu untuk tetap menjaga Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Hari ini saya berkomunikasi dengan para pemuka agama Islam untuk mengajak menjaga Empat Pilar”, ujarnya.

Kepada para pemuka agama itu, Syarif Hasan menjelaskan bahwa kunjungannya ke kabupaten yang berada di Pantai Utara Jawa (Pantura) itu salah satunya tujuannya untuk

menjaring dan mendengar aspirasi masyarakat. “Semua aspirasi masyarakat dengarkan”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Syarif Hasan mendapat informasi bahwa Indramayu dilintasi oleh jalan Tol Cipali, namun pintu exit menuju ke Indramayu belum dibangun. Selama ini, bila lewat tol dengan tujuan Indramayu, si pengguna jalan tol harus exit di Gerbang Cikamurang Kabupaten Subang, Gerbang Kertajati Kabupaten Majalengka, atau Gerbang Palimanan Cirebon.

Menanggapi hal itu, Syarif Hasan mengatakan, salah satu program pembangunan jangka pendek yang harus dilakukan adalah dibuat exit tol yang langsung menuju ke Indramayu. “Akses langsung ke Indramayu akan meningkatkan perekonomian dari dan di kabupaten ini,” tuturnya. Selain itu, tambah Syarif Hasan, exit tol langsung ke Indramayu akan meningkatkan pembangunan, sehingga kabupaten ini mampu memberi kontribusi ke pusat.

Sementara anggota MPR Fraksi Partai Demokrat, E. Herman Khaeron, dalam acara itu mengatakan, atas nama warga Indramayu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Syarif Hasan di kabupaten yang kaya dengan produksi buah mangga itu. Dia juga sepakat dengan Syarif Hasan yang pentingnya kita peduli pada kesejahteraan masyarakat. “Kita mendukung reforma agraria di Indramayu demi kemakmuran rakyat”, tegasnya. □

AWG



Sosialisasi Empat Pilar

MPR RI dan APEKSI Tandatangani MoU

Peran kepala daerah dalam menggerakkan semangat gotong royong warga dalam menghadapi pandemi Covid-19 sejalan dengan misi MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR. “Gotong royong adalah jati diri bangsa Indonesia,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sebagai penganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, membuat peran kepala daerah dalam mendukung persatuan dan kesatuan Indonesia sangat penting.

Para kepala daerah merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Di tengah kesibukan melaksanakan tugas pemerintahan dan berjuang menghadapi dampak pandemi Covid-19, mereka tetap bersemangat turut serta memikirkan persoalan kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

“Pandemi Covid-19 telah menjadi ujian gotong royong kebangsaan. Peran kepala daerah dalam menggerakkan semangat gotong royong warga dalam menghadapi pandemi Covid-19, sejalan dengan misi MPR RI dalam menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Gotong royong adalah jati diri bangsa Indonesia yang tak dimiliki bangsa lainnya. Melalui gotong royong, ujian seberat apapun bisa kita lalui bersama,” ujar

Bamsoet usai Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sekaligus penandatanganan MoU dengan APEKSI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (14/9/20).

Turut hadir antara lain Ketua Dewan APEKSI Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan APEKSI Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi, dan Hukum APEKSI Taufan Pawe (Walikota Parepare), Sekretaris dan Direktur Eksekutif Dewan Pengurus APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti, serta ratusan pengurus dan anggota APEKSI dari berbagai pemerintahan kota yang bergabung secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, masing-masing identitas kebangsaan mempunyai karakteristik yang beragam, sehingga konsep dan formulasi organisasi bernegara tidak bisa dikelola dengan menerapkan paham sentralistik. Kebijakan yang sentralistik hanya akan menjadikan daerah sebagai objek, mengesampingkan hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerahnya sesuai karakteristik, serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

“Dalam pemahaman ini, diperlukan kearifan dari masing-masing pemerintah daerah dan masyarakat, agar dalam setiap

kebijakan dan implementasinya menyesuaikan dengan etika dan budaya lokal. Memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak menyimpang dari tujuan nasional dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menerangkan, prinsip tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang. Frasa dibagi atas, bukan terdiri atas, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di Pusat. Sedangkan frasa terdiri atas merujuk pada konsep federalisme, di mana kedaulatan berada di tangan masing-masing negara bagian.

“Dalam konteks inilah Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota, menjadi ujung tombak dalam mengatur dan mengelola tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat di daerah perkotaan. Semangat membangun daerah perkotaan diselenggarakan dengan semangat membangun ikatan kebangsaan dan nasionalisme,” terang Bamsoet.



Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, kehidupan masyarakat di 98 kota yang menjadi anggota APEKSI sangat dinamis dan menghadirkan beragam tantangan, antara lain persoalan kependudukan. Rujukan Bank Dunia, pada 2019 sekitar 56% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 151 juta orang, tinggal

di daerah perkotaan.

“Seiring waktu, rasio jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan semakin mendominasi. Berdasarkan proyeksi Worldometer (situs web rujukan statistik dunia), diperkirakan pada 2020 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mencapai sekitar 154,2 juta orang atau sekitar 56,4%

dari total penduduk. Sedangkan pada 2025 diperkirakan meningkat kembali menjadi 170,4 juta orang atau sekitar 59,3% dari total penduduk,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini memandang, peningkatan jumlah penduduk kota sangat dipengaruhi tingginya kesempatan dan akses ekonomi di daerah perkotaan, yang masih menjadi magnet menggiurkan dan mendorong laju urbanisasi. Untuk menguranginya, perlu dibangun titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan. Dalam hal ini, program pemerintah untuk mengembangkan Dewa (desa wisata agro), Dewi (desa wisata industri), dan Dedi (desa digital) perlu didukung bersama.

“Selain itu, MPR RI juga mengharapkan partisipasi para Walikota agar dalam menjalankan fungsi dan wewenang pemerintahannya, dapat turut berperan aktif menyampaikan narasi-narasi kebangsaan. Sehingga dapat membangun karakter dan wawasan kebangsaan, baik kepada perangkat pemerintah kota maupun kepada seluruh lapisan warga masyarakat,” pungkas Bamsoet. □



Kabupaten Cianjur

Hindari Politik Uang Dalam Pilkada



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SAAT Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR, yang digelar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menuturkan, dalam demokrasi yang berkembang di Indonesia, selepas reformasi, rakyat diberi kesempatan yang besar dalam memilih Presiden dan kepala daerah secara langsung.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengakui, dalam demokrasi semacam itu, di satu sisi merupakan demokrasi yang terbuka, namun ada tantangan yang perlu dihadapi dan dipikirkan, karena demokrasi seperti ini pemenangnya adalah suara yang terbanyak.

“Demokrasi yang berkembang mempunyai tantangan,” ujarnya, Cianjur (2/9/2020). Menurut Jazilul, demokrasi yang berkembang menyehatkan, namun mempunyai efek samping. “Efek samping itu seperti tumbuhnya politik uang,” ungkapnya. Dalam aturan demokrasi, politik uang termasuk pasal penyauapan. “Demokrasi tak menghendaki cara-cara seperti itu,” tegasnya.

Ia membandingkan politik uang sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dengan masa jabatan kepala daerah yang memiliki jangka waktu sampai lima tahun. Hal demikian, menurut Jazilul, harus ditinggalkan. “Yang merusak dalam kehidupan perlu ditinggalkan,” papar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu. Ia berharap, Pemilu tidak seperti dagang sapi, juga tidak seperti pasar malam. Yang dimaksud seperti pasar malam oleh pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, itu karena di sana ada orang baik, pencuri, tokoh agama, berbaur. Tidak jelas mana yang baik dan buruk berkumpul.

Gus Jazil berharap, Pilkada serentak yang digelar pada Desember 2020 tidak terjadi politik uang dan praktik dagang sapi. “Pilihlah pemimpin yang mempunyai visi dan misi,” tegasnya. Tak hanya itu, dia juga berharap agar pelaksanaan Pilkada bisa berlangsung damai.

Dalam Pilkada yang digelar pada Desember 2020 bisa jadi situasi pandemi Covid-19 masih menggejala. Ia meminta dalam setiap proses dan tahapan Pilkada, masyarakat, tim sukses, dan calon kepala daerah

hendaknya menerapkan protokol kesehatan. “Agar terhindar dari penularan Covid-19, tak ada politik uang dan dagang sapi, serta berlangsung damai. Itu harapan kita dalam Pilkada 2020,” tutur alumni PMII itu. □

Pesantren Al Istiqlal Cianjur Ajak Para Santri Mengawal Empat Pilar

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid pada 2 September 2020 melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Istiqlal, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kehadiran Jazilul Fawaid di pesantren salafiyah itu dalam rangka Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer dengan sebuta Empat Pilar MPR. Kehadiran Jazilul Fawaid yang didampingi oleh anggota MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), disambut langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al Istiqlal, KH. Ade Abdullah.

Di hadapan ratusan santri, saat memberi sosialisasi, Jazilul Fawaid menuturkan bahwa dia merasa terhormat bisa hadir di pesantren itu. Kehadirannya di pesantren yang berada di tepi jalan itu untuk me-

laksanakan amanah UU MD3, yakni melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR. “Empat Pilar merupakan pengikat bangsa,” ujarnya.

Kehadiran di tengah para santri dan pesantren itu mengingatkan dia saat nyantri dahulu. Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu mengungkapkan bahwa santri, kiai, dan ulama mempunyai peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. “NKRI merdeka juga berkat perjuangan para santri, kiai, dan ulama,” ujarnya. Dia lalu menyebut contoh bagaimana pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tahun 1945 hingga terjadinya Hari Pahlawan. Semua itu, lanjut Jazilul, berkat perjuangan para santri, kiai, dan ulama. Untuk itulah, Gus Jazil berharap agar para santri menjadi pengawal Empat Pilar agar Indonesia semakin kuat.

karena itu, Gus Jazil berharap agar santri dan pesantren mempunyai akses untuk pengembangan diri agar bisa lebih berkembang. “Sehingga santri bisa menjadi pengusaha, salah satu contohnya,” paparnya.

Menurut Jazilul Fawaid, negara ini merdeka mempunyai tujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Berdasarkan fakta yang ada, di banyak daerah masih terjadi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Di daerah pertanian yang subur, petani pun masih ada yang belum sejahtera. Ia ingin agar pemerintah terus berusaha untuk pemerataan pembangunan

membuat lembaga pendidikan ini wajib untuk dibantu,” tambahnya.

Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu mengatakan, ada antropolog yang mengklasifikasi masyarakat Indonesia menjadi tiga, yakni santri, priyayi, dan abangan. Dia menyebutkan, dulu yang menjadi bupati dan pejabat negara adalah dari kaum priyayi. Sedang kaum santri sebagai kelompok yang mampu mandiri. “Yang memiliki usaha batik, rokok, dan usaha lainnya adalah dari kelompok santri,” ujarnya. Sedang kaum abangan, katanya, mayoritas adalah kaum petani.

Ketika era reformasi, menurut Jazilul, kaum santri memiliki peluang menjadi apa saja. “Sehingga ada santri yang menjadi presiden, gubernur, bupati, walikota, dan



Sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu ingin agar kehidupan para santri dan pesantren semakin membaik. Berdasarkan UU Pesantren, lembaga pendidikan yang berdiri sejak Indonesia belum merdeka itu mempunyai tujuan yang mulia, yakni: sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, lembaga dakwah, serta lembaga pemberdayaan masyarakat.

Ia mengakui, ada di antara tujuan itu yang belum tercapai. “Masih banyak pesantren yang belum mampu menjadi lembaga yang memberdayakan masyarakat,” ungkapnya. Hal itu bisa terjadi, karena para santri dan pesantren masih belum memiliki akses untuk mendapat alokasi anggaran negara. “Pesantren belum diikutkan dalam program pemberdayaan masyarakat,” tuturnya. Oleh

agar tercipta kemakmuran. “Tak ada manfaatnya bila penanaman ideologi tanpa dibarengi dengan kemakmuran,” ujarnya. Maka dia berharap, dari pembangunan yang ada bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. “Pembangunan dilakukan agar kekayaan tak berputar pada satu kelompok,” ujarnya. Dia berharap, nasib petani di Cianjur didorong agar lebih baik. “Bila petani makmur maka negara ini akan maju,” tegasnya.

Sebagai politisi PKB, Jazilul Fawaid merasa bangga ikut mendorong lahirnya UU Pesantren dan UU Desa. Dua undang-undang tersebut membuat adanya jaminan dan bantuan yang perlu diberikan kepada pesantren dan desa. “Dengan adanya UU Desa maka setiap desa sekarang mendapat anggaran dari APBN,” tuturnya. “Pun demikian dengan adanya UU Pesantren

jabatan penting lainnya,” ujarnya. “Santri sudah banyak menempati pos-pos penting,” tambahnya. Untuk itu, Jazilul mengajak kaum santri agar terus mengawal Empat Pilar. □

Potensi Wisata di Cianjur Agar Mampu Bersaing dengan Daerah Lain

Pada 2 September 2020, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengunjungi Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut dia bertemu dengan masyarakat, santri, kiai, ulama, dan para anjungan. Di hadapan masyarakat, Jazilul Fawaid menyebut, Cianjur memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang. Sebagai daerah yang juga menjadi penyangga Jakarta, selain Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, Cianjur diharapkan memaksimalkan diri agar potensi yang ada bisa lebih tergalai dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat



di sana. “Cianjur memiliki letak yang strategis,” ujarnya kepada para wartawan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendorong agar pemerintah di sana mengejar ketertinggalan pembangunannya. Salah satu yang perlu diperhatikan, menurut Jazilul, adalah soal infrastruktur dan sumber daya manusia. “Kita berharap dengan memerhatikan masalah itu maka akan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan,” paparnya.

Potensi besar seperti pariwisata diharapkan digenjot agar Cianjur mampu bersaing dengan daerah lainnya. Dia menyebut potensi wisata yang ada, seperti Istana Cipanas dan wisata alam lainnya. Menjadi tantangan dalam pengembangan wisata di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Bandung Barat itu adalah kemacetan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus dipikirkan. “Untuk menopang pariwisata dan yang lainnya juga perlu sumber daya manusia yang unggul,” ujarnya. Masalah SDM, menurut pria yang akrab disapa Gus Jazilul juga perlu diperhatikan. “Perlu didorong anak muda yang kreatif untuk ikut mendukung pembangunan daerah,” tambahnya. □

Sosialisasi di Wana Wisata Alam Pemimpin Harus Berpihak Pada Rakyat

Sekitar pukul 09.00 WIB, ratusan warga Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 3 September 2020, mulai berdatangan di Wana Wisata Alam, d’Reungit Forest. Kehadiran mereka untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut Empat Pilar MPR.

Kehadiran Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam acara itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang berada di sana. Kedatangan mereka disambut antusias dengan kesenian tradisional Sisingaan. Jazilul Fawaid dan Cucun Ahmad dinaikkan ke atas Sisingan dan diarak menuju ke panggung tempat sosialisasi.

Di hadapan ratusan peserta sosialisasi, Jazilul Fawaid mengatakan, senang bisa hadir di tengah masyarakat Sukanagara. “Apalagi berada di bawah pohon-pohon pinus dengan hawa yang adem,” ujar politisi PKB itu. Kehadiran Jazilul di daerah yang masuk wilayah Cianjur Tengah itu adalah dalam rangka melaksanakan tugas MPR, yakni menyosialisasikan Empat Pilar. “Kami



datang ke sini untuk melakukan sosialisasi dan menguatkan Empat Pilar,” tuturnya.

Pria yang akrab disapa Gus Jazilul itu memaparkan, bila dalam agama Islam ada Rukun Islam dan Rukun Iman maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga memiliki rukun. “Rukun dalam berbangsa dan bernegara adalah Empat Pilar,” ucapnya. “Semua warga negara harus tahu rukun yang ini,” tambahnya.

Jazilul menyatakan, terciptanya Pancasila sebagai dasar negara ada peran dari para tokoh umat Islam. “Sila I merupakan bukti hadirnya tokoh umat Islam dalam menciptakan Pancasila,” tuturnya. Dari sinilah bila tidak percaya kepada Tuhan maka mereka disebut bertentangan dengan Pancasila.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh warga negara harus mengacu pada UUD NRI Tahun 1945. Tata laku dalam bermasyarakat diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Mulai dari soal perkawinan, pendidikan, berpolitik, semua ada undang-undangnya. “Namun semua aturan harus tunduk pada UUD,” paparnya.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Talud hingga Rote. “Di seujur wilayah Indonesia berdiam penduduk yang memiliki ragam agama, budaya, bahasa, dan keragaman lainnya,” tutur pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu. “Paling penting keragaman yang ada hidup di bawah NKRI,” tegasnya. “Keragaman yang ada diikat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.

“Nah tugas MPR adalah memastikan masyarakat mengerti dan melaksanakan Empat Pilar,” ujar alumni PMII setelah menjelaskan dasar dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia merdeka, menurut Jazilul, mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

Ia bertanya, apakah Cianjur sudah maju apa belum? Kemudian dia menjelaskan bahwa maju tidaknya suatu wilayah itu tergantung pada pemimpinnya. Bagi Jazilul Fawaid memimpin itu bukan soal kemampuan saja, namun juga soal keberpihakan pada rakyat. “Semua bisa memimpin, namun yang paling penting adalah keberpihakannya kepada rakyat,” tegasnya.

Keberpihakan kepada rakyat dicontohkan oleh Jazilul Fawaid ketika disahkan UU Tentang Desa. Dengan adanya undang-undang itu membuat desa mendapat perhatian dan anggaran dari APBN. Demikian juga dengan disahkannya UU Tentang Pesantren. Undang-undang ini juga membuat pemerintah serius dalam membantu dan mendorong kemajuan pendidikan pesantren.

“Pesantren akhirnya mendapat akses untuk mendapat alokasi anggaran,” jelasnya.

Dia ingin masalah desa dan pesantren juga diberdayakan. “Di Cianjur kan banyak pesantren,” tuturnya. Dengan memajukan pesantren maka masyarakat yang berada di desa-desa bisa menjadi cerdas dan selanjutnya akan terwujud kemakmuran.

Kepada para peserta sosialisasi, Jazilul menjelaskan, meski masyarakat tinggal di desa, gunung, hutan, dan pesisir namun mereka berhak untuk mendapat akses terhadap alokasi anggaran. “Masyarakat

kota dan desa memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam akses alokasi anggaran,” paparnya.

Masyarakat yang tinggal di kota atau desa, kata Jazilul, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. “Perbedaannya hanya soal berbagi tugas,” ujarnya. “Kalau berbagi tugas maka semua harus sama-sama enak,” tambahnya. Bila tidak terjadi kemakmuran yang sama atau merata maka hal demikian akan bertentangan dengan sila kelima Pancasila. □

AWG



Ratusan Pecinta dan Penghobi Mobil Klasik Sambangi MPR RI



ADA pemandangan tak biasa dipelataran depan Gedung MPR, tepatnya di depan Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2020. Di situ berjejer banyak mobil klasik era 40-an sampai 80-an seperti Volkswagen Beetle, Jeep perang era 40-an dengan stand gun, Chevrolet, Bentley dan lainnya milik komunitas pecinta mobil tua yang tergabung dalam Automobile Pride and Nationalism.

Kedatangan para pecinta mobil lawas tersebut adalah untuk menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dibuka oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Selain komunitas mobil klasik, hadir pula berbagai komunitas atau klub otomotif antara lain, city car community, Axoc dan lainnya

“Acara hari ini mendapat respon yang luarbiasa dari klub-klub lainnya. Tapi, karena mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan

jaga jarak dalam masa pandemi ini, kami hanya bisa menampung 300 peserta dari 100 klub, namun saya rasa mewakili dari 300 klub otomotif yang ada di Indonesia,” ujar Ketua MPR, saat membuka secara resmi Sosialisasi.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua Umum Komunitas Volkswagen Indonesia Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Lestari Moerdijat yang hadir secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet mengajak peserta sosialisasi dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merenungi lebih mendalam 4 pilar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara lebih konsisten terutama tindak nyatanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. □

DER

Massifkan Empat Pilar, MPR Kerjasama dengan Universitas Terbuka

SEKRETARIS Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono mewakili MPR RI melakukan penandatanganan kerjasama dengan Universitas Terbuka yang diwakili oleh Wakil Rektor UT Liestyodono Bawono Irianto, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Penandatangan kerjasama tersebut dalam rangka memassifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika). Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa penandatanganan tersebut adalah tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibuat oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dengan Rektor UT Prof. Ojat Darajat beberapa waktu lalu.

“Sosialisasi merupakan amanat UU MD3 sehingga untuk melakukan kegiatan tersebut perlu dilakukan secara gotong royong atau kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Dan itu sudah dilakukan MPR dengan bekerjasama kepada berbagai perguruan tinggi dan kelompok strategis,” ujamya. □

DER



Lagi. MPR Meraih Opini WTP

KEMENTERIAN Keuangan Republik Indonesia, Selasa (22/9/2020), menggelar 'Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020'. Karena di Jakarta berlaku masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19 maka acara rapat kerja ini digelar lewat 'video conference' atau 'daring'.

Salah satu agenda rapat kerja yang dibuka oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu adalah penyerahan penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). MPR termasuk salah satu lembaga negara yang terpilih sebagai penerima opini WTP dalam acara bertema: 'Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,' tersebut.

Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono mengikuti acara itu secara 'daring' dari Ruang Delegasi, Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta. Sebagai penerima opini WTP, Ma'ruf Cahyono menyatakan rasa syukur dan sekaligus bangga MPR dipercaya mengelola keuangan secara baik, akuntabel, dan transparan.

"Penghargaan pada tahun ini membuat kita telah sepuluh kali secara berturut-turut meraih WTP", ungkapnya. Di luar kategori peraih penghargaan kepada entitas pelaporan peraih opini WTP minimal 10 kali, menurut Ma'ruf Cahyono, MPR sebenarnya sudah lebih dari 10 kali meraih WTP.

Apa yang telah diraihinya ini, menurut Ma'ruf Cahyono, menjadi tanggung jawab dan tantangan ke depan agar MPR bisa mempertahankan predikat itu. "WTP merupakan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara", ungkap alumni Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah ini. Dengan meraih WTP, kata Ma'ruf Cahyono, MPR mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik, *good governance*. "Ke depan tugas kita tidak ringan bila ingin tetap mempertahankan WTP", paparnya.

Penghargaan ini juga sebagai motivasi dan stimulus kepada aparatur sipil negara (ASN) di Setjen MPR. "Bahwa kerja itu harus berprestasi", ujarnya. Reformasi birokrasi dan indikator penilaiannya harus ditingkatkan. Dia menegaskan, reformasi birokrasi harus memberi dampak dan manfaat yang lebih terasa bagi ASN. "Kita harus mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara", tuturnya.

Ke depan, lanjut Ma'ruf Cahyono, tantangan yang dihadapi oleh ASN semakin kompleks. ASN dituntut terus beradaptasi dengan lingkungan yang maju. "Hidup kita sekarang sudah serba elektronik", ungkapnya. Dari sinilah maka institusi pemerintahan harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik sekarang harus praktis, cepat, dan akurat. Tentu yang bisa menjawab tantangan itu adalah teknologi informasi. "Oleh karena itulah Setjen MPR berupaya terus meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik", ungkapnya.

Ada tiga aspek dalam pengelolaan atau manajemen. Tiga aspek itu adalah SDM yang handal, benar dalam mengelola uang, dan benar dalam mengelola barang. Bila ketiganya bisa dilakukan maka



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Setjen MPR mampu melakukan pelayanan secara akuntabel, transparan, dan terbuka, yang pada gilirannya meningkatkan pelayanan maksimal pada MPR dan masyarakat. "Itu harapan saya", ujar Ma'ruf Cahyono.

Bagi Ma'ruf Cahyono, untuk melakukan kerja yang baik diperlukan kerja keras dan kerjasama yang kuat. Saat ini dalam bekerja harus berpegang pada prinsip kolaborasi. Dalam menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyelesaikan masalah harus dilakukan dengan kolaborasi. "Saya canangkan bahwa kolaborasi tidak hanya di level pemimpin, tetapi juga semua stakeholder. Tidak hanya di internal kesetjanaan namun juga eksternal kesetjanaan sebab MPR juga memerlukan kemitraan untuk mendukung tugas-tugasnya", paparnya.

Ma'ruf Cahyono mengatakan, agar bisa mempertahankan WTP maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM. Tidak bisa menggerakkan orang bila SDM yang ada tidak handal. Untuk menggerakkan orang perlu usaha dan kerja keras. "Selain kolaborasi, sinergitas dari seluruh SDM perlu dibangun", tuturnya. Dia mengapresiasi kerja keras semuanya yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemajuan Setjen MPR.

Selain kerja keras dan kerjasama juga perlu dilakukan agar WTP tetap dipertahankan, menurut Ma'ruf Cahyono, adalah komitmen dan dukungan para leader, termasuk top manajer yang kuat mendorong, memotivasi, agar SDM terus bekerja untuk meraih prestasi. "Lakukan tugas sesuai ketentuan yang ada supaya tidak terjadi penyimpangan", tuturnya. Juga penting adalah mengefektifkan aparatur pengawas internal yang selama ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Juga tak kalah penting, kata Ma'ruf Cahyono, adalah terbangunnya semangat dan dedikasi. Tidak mungkin semua kerja bisa berjalan dengan baik tanpa tanggung jawab, dan tanggung jawab itu memerlukan kesadaran. "Dedikasi itu penting untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara," katanya. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Arif Wibowo, Wakil Ketua Komisi II DPR

Kata Kuncinya, Protokol Kesehatan Secara Ketat dan Disiplin

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan pemerintah masih tetap berpegang pada keputusan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya. Pilkada kali ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda maka tak heran banyak kalangan, termasuk ormas terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, mengusulkan untuk menunda Pilkada karena dikhawatirkan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Di tengah desakan menunda Pilkada Serentak, DPR, KPU, dan Bawaslu terus merancang tahapan Pilkada disesuaikan dengan pandemi Covid-19, terutama penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Untuk mengetahui perkembangan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020, Majelis

mewawancarai Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo. Berikut wawancara dengan politisi PDI Perjuangan ini. Petikannya.

Pilkada Serentak di 270 daerah berlangsung pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda. Bagaimana tanggapan Bapak?

Semua pihak, termasuk saya, memang khawatir terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak di tengah situasi pandemi. Namun kita bisa belajar dari pengalaman Korea Selatan dan Polandia yang berhasil menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19, dan berhasil meningkatkan partisipasi pemilihnya.

Di Korea Selatan, pemilihan umum dilaksanakan pada 15 April 2020. Metode pelaksanaan pemilihan umum ini dianggap sukses karena berhasil menjawab kekhawatiran banyak pihak. Dalam tata cara pemilihan di Korea Selatan, penyelenggara pemilihan umum berdiri dengan termometer,

hand sanitizer, mengenakan masker, dan sarung tangan serta disediakan tempat sampah sarung tangan atau masker. Pemilihan umum di negara ini sukses karena ribuan warganya di seluruh Korea Selatan mendonasikan masker, sarung tangan, dan hand sanitizer untuk pemilih dalam pemungutan suara di negara itu.

Polandia menggelar pemilihan presiden pada 28 Juni 2020. Bedanya dengan pemilihan presiden terdahulu adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pemilu ini meniru tata cara pemilihan umum di Korea Selatan. Penggunaan sarung tangan buat semua penyelenggara Pemilu, hand sanitizer di TPS, masker wajah, pelindung wajah, social distancing, menghindari menggunakan materi yang menyerap air di dalam TPS, mengatur dengan tertib orang di TPS dan penyemprotan desinfektan di permukaan obyek yang disentuh pemilih.

Kata kuncinya adalah penggunaan

protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilihan dilaksanakan secara disiplin dan ketat. Protokol kesehatan ini justru meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan, sehingga mengatasi ketakutan masyarakat untuk hadir di bilik-bilik suara.

Ada kekhawatiran Pilkada Serentak justru bisa menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Apa tanggapan Bapak?

Saya kira kekhawatiran Pilkada Serentak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 adalah sumir. Di luar tahapan Pilkada, kita ketahui banyak sekali muncul kluster baru penyebaran Covid-19 yang tidak kita duga,

Regulasi teknis tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak pada masa pandemi yang disusun oleh KPU sudah mengakomodasi protokol kesehatan, yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah dan disempurnakan oleh Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Di antaranya membatasi pertemuan tertutup, pertemuan dialog, atau kegiatan mengumpulkan orang di ruang tertutup dibatasi maksimal 50 orang dan menjaga jarak minimal 1 meter. Selain keharusan memakai masker secara benar. Serta mengupayakan agar setiap kegiatan menghadirkan masyarakat luas dilakukan melalui media daring (online).

Sekarang tinggal kemauan dari berbagai

dan masyarakat umum melaksanakan protokol kesehatan dalam Pilkada.

Banyak kalangan yang minta agar Pilkada Serentak lebih baik ditunda. Bagaimana menurut Bapak?

Sebelumnya kita pernah menunda tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 yang sedianya dilaksanakan September 2020, diundur menjadi Desember 2020. Hal ini dilakukan atas pertimbangan penyebaran Covid-19. Saya kira penundaan berikutnya akan menimbulkan kompleksitas konstitusional.

Pertama, sampai sekarang tidak ada satu pihak berwenang atau ahli epidemiologi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mampu



terutama di perkantoran. Hal ini terjadi karena kita tidak patuh dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan di setiap kegiatan produktif. Standar minimal protokol kesehatan adalah menggunakan masker yang menutupi hidung sampai dagu, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, serta selalu menjaga pola hidup bersih seperti mencuci tangan.

Apapun kegiatan masyarakat dalam masa pandemi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan berkontribusi terhadap penyebaran Covid-19, tidak hanya tahapan Pilkada. Maka semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan Pilkada wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah disusun oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada untuk menghindari ketakutan terjadi kluster penyebaran Covid-19.

pihak yang terlibat Pilkada ini untuk mematuhi regulasi itu, mulai dari partai politik, tim kampanye, pasangan calon, hingga penyelenggara itu sendiri, serta masyarakat sebagai peserta aktif dari setiap tahapan Pilkada. Institusi pengawas pemilu perlu mempertegas pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan ini dan memastikan semua pihak yang terlibat Pilkada mematuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan memasukkan protokol kesehatan ke dalam setiap tahapan Pilkada ini harus disertai pemberian sanksi bagi yang melanggar. Penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan, dan semua pihak terutama aparat penegak hukum memastikan secara jelas bahwa peserta pemilihan

memprediksi dengan pasti kapan pandemi ini berakhir. Dari data yang ada naik turunnya kurva penyebaran Covid-19 ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pembatasan sosial dan sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dengan baik.

Kedua, penundaan tahapan Pilkada dapat menimbulkan masalah konstitusionalitas masa jabatan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 UUD No. 23 tahun 2014, masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Sebelumnya, melalui Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa masa

jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Di sisi lain, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan, masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan 2020 akan berakhir 2024. Pergantian kepala daerah tersebut mengacu kepada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang jatuh pada November 2024. Dengan demikian masa jabatan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak Desember 2020 hingga nanti pelaksanaan Pilkada Serentak pada November 2024 adalah 3 tahun 10 bulan tanpa permohonan perselisihan hasil di MK, dan 3 tahun 7 bulan dengan perselisihan hasil di MK. Sehingga dapat dikatakan masa jabatan kepala daerah dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Desember 2020 bisa dikatakan 1 periode.

Dalam kerangka berpikir ini, menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 dengan pertimbangan Covid-19 dapat mengurangi masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 yang berpotensi melanggar konstitusionalitas masa jabatan kepala daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015 berakhir antara Februari sampai dengan September 2021, maka dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah tersebut, secara total diperlukan 261 pejabat kepala daerah kabupaten/kota dan 9 pejabat kepala daerah provinsi.

Penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 mengakibatkan daerah-daerah tersebut dipimpin oleh pejabat kepala daerah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan oleh karena menunggu pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini akan mengganggu jalannya administrasi pemerintahan daerah terkait.

Ada juga rencana menerapkan sanksi kepada peserta Pilkada Serentak (Pilgub, Pilbup, dan Pilwalkot) yang tidak menerapkan protokol kesehatan (dalam kampanye, misalnya). Pendapat Bapak?

Penerapan protokol kesehatan memberikan jaminan tidak saja kepada keselamatan



setiap warga masyarakat yang mengikuti tahapan Pilkada, tetapi juga jaminan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Hal ini penting untuk menjamin proses dan hasil Pilkada tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin daerah secara demokratis dan legitimate.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menganggap penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada, terutama dalam kegiatan yang mengundang kerumunan orang, seperti tahapan penetapan pasangan calon, penyelesaian sengketa calon, pengundian nomor urut, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penyelesaian

sengketa hasil merupakan hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Maka sangat perlu kiranya penyelenggara menjelaskan secara teknis protokol kesehatan dalam tahapan krusial yang tersebut di atas dan menuangkan dalam regulasi teknis tentang penyelenggaraan pemilihan.

Bahkan DPR dan Pemerintah mendesak penyelenggara untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain. Selain itu mendorong terjadinya kampanye secara daring, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye. Serta perlu adanya pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. □



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bedah Buku:

Mencari Telur Garuda

Siapa sangka lambang negara Burung Garuda yang banyak beredar di masyarakat, sebagian di antaranya tak sesuai dengan bentuk aslinya. Lebih parah lagi, di tangan para seniman, Burung Garuda dibuat dalam berbagai bentuk.

DIHADAPAN peserta acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, Anggota MPR RI R. Imron Amin, SH., MH., mengajak generasi muda untuk mempraktikkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Ajakan ini disampaikan, menurut Imron, karena saat ini banyak anak muda yang kehidupannya makin jauh dari nilai-nilai Pancasila.

“Banyak contoh perilaku anak-anak muda kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di dunia maya, kita kerap menemukan para netizen saling fitnah, mencela dan memaki antara satu dengan yang lain, padahal tindakan tersebut jauh dari Pancasila,” kata politisi Partai Gerindra itu.

dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, tingkah laku dan kehidupan mereka tidak sesuai dengan kaedah yang berlaku, laiknya orang Indonesia.

“Banyak anak muda yang tidak memerhatikan sopan santun, andhab asor, dan kepatutan dalam bergaul. Untuk hal-hal yang kecil misalnya, banyak anak muda kalau lewat di depan orang tua nyelonong begitu saja, tidak membungkukkan badan sebagai salah satu sikap menghormat pada orangtua,” kata Imron.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Kepala Biro Humas MPR, Siti Fauziah, mengapresiasi buku berjudul: Mencari Telur Garuda.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pernyataan itu disampaikan Imron saat menjadi salah satu narasumber acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta. Buku yang dibahas berjudul: “Mencari Telur Garuda”. Selain Imron, dua orang narasumber lainnya yang ikut membahas adalah si penulis buku, Nanang Hidayat, dan pengamat Geopolitik, Kepala Museum KAA 2008-2012, Drs. Isman Pasha, MH. Hadir pada acara tersebut Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, SE., MM.

Kepada para mahasiswa yang hadir pada acara tersebut, Imron mengajak mereka untuk selalu mempelajari dan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jangan sampai malas untuk menggali nilai-nilai Pancasila, apalagi sampai melupakannya begitu saja. Ini penting, karena Pancasila bersumber dari nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dahulu.

Saat ini, dalam praktik kehidupan sehari-hari, menurut Imron, sangat banyak anak muda yang tidak lagi mempraktikkan Pancasila

Buku tersebut menarik untuk dibahas karena mengetengahkan beberapa persoalan yang dihadapi lambang Negara Burung Garuda. Antara lain, bentuk Garuda yang sudah tidak sesuai aslinya, seperti yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, lambang Garuda kerap dibikin berbeda-beda oleh seniman pembuatnya, dan itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, perlakuan terhadap lambang negara yang tidak semestinya. Seperti cukai rokok yang selalu dirobek, meski di sana terdapat logo Garuda.

Menurut Bu Titi, perpustakaan MPR terbuka melaksanakan acara bedah buku, selama buku yang dibahas sesuai dengan tugas dan fungsi MPR. Terbukti sudah ada berbagai judul buku dibahas pada acara tersebut sebelumnya.

“Acara seperti ini biasanya dilaksanakan hingga dua kali sebulan. Namun, selama pandemi corona, frekuensinya dikurangi, semata-mata untuk mengurangi risiko penularan corona,” kata Siti Fauziah. □

MBO

Tegang Diajarin *Menembak...*



ARTIS penyanyi single dan mantan vokalis band Dewa 19, **Ari Lasso**, tampak sangat excited ketika diajak latihan menembak oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo di Perbakin Jakarta, September lalu. Namun, raut wajah Ari langsung tampak tegang begitu di depannya, di atas meja, berjejer pistol dan senapan serbu beserta amunisinya.

“Waduh luar biasa ini, tolong diajarin dong Pak gimana cara pakainya,” pinta Ari kepada Bamsoet. Lalu, Bamsoet dan para instruktur Perbakin memberi penjelasan seputar senjata api dan cara penggunaannya. Dan, Ari pun menyimak dengan serius.

Lalu dibantu oleh Bamsoet dan instruktur, Ari memasukkan peluru tajam ke magazin pistol, kemudian menembaknya dor... dor. Kali ini tidak lagi tegang, tapi sumringah.

“Pistol ini untuk olahraga ya gaess, bukan untuk main-main, karena senjata ini mematikan. Ingat ya, ini bukan buat gagah-gagahan. Aku sendiri tidak akan membawa senjata ini kemana-mana, cukup buat latihan saja di Perbakin, dan disimpan di Perbakin,” ujar pelantun single hits ‘Misteri Ilahi’ dan ‘Hampa’ ini. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ari Lasso

Bangga Menjadi Indonesia..

ARTIS penyanyi juara Indonesian Idol 2020, **Lydra Margaretha Ginting**, sungguh beruntung. Dia terpilih menjadi pengisi acara dalam HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Agustus lalu. Walaupun tampil secara virtual, tapi Lydra mengaku sangat excited dan bangga.

Lydra membawakan lagu-lagu pembangkit semangat, seperti 'Merah Putih.' Diiringi paduan suara dan alunan musik dari Gita Bahana Nusantara, juara pertama festival menyanyi solo, di Sanremo, Italia, 2017, Lydra tampil memukau.

"Bangga, meski saya sempat kuatir tidak maksimal. Tapi saya bersyukur saya bisa melakukannya demi Indonesia. Intinya, banggaah menjadi Indonesia," ujar artis pendatang baru di belantika musik Tanah Air. □

DER



Lydra Margaretha Ginting



Shirley Margaretha

Apapun Kondisinya Kita Harus Optimis

ARTIS sinetron dan film **Shirley Margaretha** sempat 'down' ketika kebijakan PSBB kembali diperketat oleh Pemerintah DKI Jakarta. "Tadinya udah seneng ya, sudah new normal. Tapi tiba-tiba PSBB diberlakukan kembali. Sempat down juga, tapi mau gimana lagi memang keadaan lagi sulit," ujarnya di Jakarta, baru-baru ini.

Artis yang mengawali karier sebagai pemain sinetron di awal 2000-an ini juga mengaku sedih karena semua rencana, seperti film dan lain-lain yang mulai aktif terpaksa mundur lagi.

"Sedih ya, semua ditutup, tapi memang sudah peraturan. Sebagai masyarakat harus patuh dan mendukung. Keputusan yang diambil pemerintah pasti tidak main-main. Tentu sudah dipikirkan secara matang, dan ini menyangkut kesehatan, bahkan nyawa masyarakat. Intinya, kita harus tetap optimistis," kata pemain film *Aku, Benci & Cona*, dan *Something In Between* ini. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



Panggung Toktan Pencetak Seniman dan Budayawan Riau

SEBUAH rumah di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, itu berhalaman cukup luas. Tanah berkontur, tidak datar atau rata. Sebagian agak rendah dan ada pula berupa jurang. Di sisi kanan rumah itu berupa lembah atau dataran rendah yang banyak tumbuh pepohonan. Nah, di sisi depan kanan rumah itu terdapat—mungkin layak disebut balai-balai—untuk tempat berbagai macam kegiatan, seperti latihan kesenian, baca puisi, drama, tarian, teater dan lainnya. Dan, di situ pula terdapat kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain makanan dan minuman, dan yang paling menonjol adalah kerajinan tenun dan batik.

Adalah H. Aris Abeba si pemilik rumah itu. Dia ini mantan *Public Relation Manager* perusahaan perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PTP-5 yang dikenal sebagai seorang seniman, sastrawan dan budayawan Riau. Di tangannyalah lahir komunitas seni yang sekarang bernama Panggung Ziarah Kesenian (ZK) Toktan. Kata Toktan adalah akronim dari Datok Jantan. Dan, kata Datok Jantan ini diambil dari panggilan cucu kesayangan untuk kekeknya (Aris Abeba). Tapi Toktan itu tidak selalu diartikan sebagai

Datok Jantan. Seperti dijelaskan oleh Qori, puteri Aris Abeba, ketika sang kakek sedang marah, Toktan bisa pula berarti Datok Setan. Mungkin yang ini hanya bercanda, maklum keluarga seniman.

Panggung ZK Toktan memiliki sejarah panjang. Berawal, ketika Aris Abeba masih menjabat manajer Humas PTP-5. Ketika itu Aris Abeba mendapat izin dari PTP-5 untuk bergerak di bidang kesenian, dengan mendirikan Sanggar PTP-5. Itu terjadi pada 1998. Kepada wartawan *Majelis* yang berkunjung ke sana, 23 Agustus 2020, Aris Abeba menceritakan bahwa semua biaya untuk kegiatan berkesenian ditanggung oleh kantornya, PTP-5. Maka, dalam kurun waktu, 1998 hingga 2010, sanggar ini banyak melahirkan para penyair, penari, dan pemain teater hebat asal Riau.

Perusahaan PTP-5 memang tak setengah-setengah membantu Sanggar PTP-5 ini. Bukan hanya biaya untuk latihan ditanggung, bahkan biaya untuk pengiriman artis ke luar negeri pun ditanggung oleh perusahaan. Hampir setiap tahun Sanggar PTP-5 mengadakan pertunjukan kesenian tradisi Riau, seperti tari-tarian, pembacaan puisi, pentas teater, dan peragaan busana produksi *home*

industry masyarakat Riau di beberapa negara di Asia, seperti: Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, dan Thailand.

Tidak hanya di Asia, sanggar ini juga pernah tampil di Eropa dan Amerika. Seperti di Hanover, Jerman (2000), Monaco (2002), Marseille, Prancis (2003), Zacatecas, Mexico (2004) dan pada 2005 Sanggar PTP-5 binaan Aris Abeba ini pernah manggung di Los Angeles, USA. Sedangkan di dalam negeri, Sanggar PTP-5 beberapa kali tampil di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selain tampil di Padang, Jambi, Medan, Manado, dan Bandung.

Selaku pimpinan sanggar, Aris Abeba kemudian menggiatkan panggung di dalam areal perkebunan milik Perusahaan PTP-5. Dan, pada 2005, Dheni Kurnia, seorang wartawan Senior Indonesia pulang kampung dan bergabung dengan sanggar binaan Aris Abeba tersebut. Dengan bergabungnya Dheni Kurnia — yang juga seorang penyair dan seniman antar bangsa—menyebabkan terjadi perubahan nama sanggar. Sanggar PTP-5 kemudian berubah menjadi 'Panggung Kebun'.

Tapi, pada 2010, setelah pensiun sebagai karyawan BUMN, Aris Abeba terpaksa membubarkan Panggung Kebun. Karena



Aris Abeba bersama Qori Islami

pensiun, bantuan dana dari PTP-5 pun ikut pensiun alias berhenti. Sejak saat itu, kegiatan Aris Abeba dan sanggar yang dipimpinya memasuki masa-masa sulit di bidang pendanaan. Banyak kegiatan yang sudah dirancang, gagal direalisasikan karena tidak ada sponsor. Masa sulit itu berlangsung selama empat tahun, hingga 2014. Dan, pada 2014 itu baru bangkit kembali dengan mendirikan sanggar baru yang dia beri nama Panggung Toktan.

Panggung Toktan yang didirikan kakek tiga cucu kelahiran Tanah Tinggi, Indragiri Hulu, Riau, ini memulai kegiatan berkeseniannya dengan merekrut anak-anak muda di berbagai bidang kesenian dan kerajinan. Mulai dari teater, baca puisi, tari, hingga musik. Juga kerajinan tenun tradisional Riau, seperti kain songket, tanjak, dan batik. Panggung Toktan pun kembali eksis di panggung kesenian Riau dan Indonesia. Aris Abeba kemudian dikukuhkan sebagai Imam panggung, sedangkan Dheni Kurnia sebagai Buya Panggung,

Pada 2014 itu Dheni dikirim ke Beijing, Cina, mengikuti seminar kebudayaan internasional. Kemudian bergabung dengan Tim Kesenian Riau, Dheni tampil dalam konser mantra puisi Dheni Kurnia di Kota Guang Xi. Lalu, di penghujung 2015, Panggung Toktan tampil di Basel dan Rheinfelden Swiss. Pada 2016, Panggung Toktan diundang pada Acara 'Indonesian Night' di Zurich, Swiss dan Vaduz, Lienstentein, sebuah tempat di kaki Pegunungan Alpen di perbatasan Swiss, Jerman, dan Austria.

Selanjutnya pada awal 2017, Panggung Toktan mengikuti Deklarasi Kuala Kangsar di Kampus USAS Perak, serta akhir 2017 di Sawah Padi, Selangor Malaysia, pertunjukan teater: Dondang Azab. Dan, Panggung

Toktan menjadi bagian dari Ziarah Kesenian (ZK) berpusat di Puchong, Malaysia, awal 2017. Dan, namanya pun berubah menjadi Panggung ZK Toktan.

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Panggung ZK Toktan pun berubah. Ketika memasuki usia 64 tahun, Aris Abeba menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Panggung Toktan kepada kaum muda yang kreatif. Ini sebagai upaya memberikan kesempatan pada 'generasi emas' untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi panggung. Termasuk untuk Konser Puisi Panggung Toktan di Kuala Kubu Baru dan



Dheni Kurnia dan Aris Abeba

Universitas Sultan Azlan Syah (USAS) Perak Malaysia.

Sebagai pendiri dan terakhir sebagai Imam Panggung Toktan agaknya Aris Abeba memiliki hak untuk menentukan calon penggantinya. Tak jauh-jauh, yang terpilih Qori Islami untuk memimpin Panggung Toktan. Qori Islami tak lain adalah puteri Aris Abeba. Kiranya tak salah Aris Abeba memilih puterinya sendiri, karena Qori memang

punya kapasitas untuk menduduki jabatan tersebut. Dia adalah seorang sutradara teater, penyair dan juga dosen (pensyarah) di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau.

Dalam menjalankan aktivitas panggung, Qori dibantu oleh Syahfitri (suaminya), Zamhir Arifin, Jefri Al Malay, Muslim Azzoumi, Griven H Putra, Surya Hadi, Hanif Muis Mahmud, Rahmadi, Hengky, Intan, Amnessa. Mereka adalah anak-anak muda yang tekun di bidang kepenyairan, musik, teater dan seni lukis. Sementara Aris Abeba, Junaidi, Herman Rante, Fakhrunnas MA Jabbar, Dheni Kurnia, Joserizal Zein, Tien Marni berperan sebagai pengarah dan penasihat.

Pada 23 Agustus 2020, bekerjasama MPR, Panggung Toktan menyelenggarakan Pagelaran Seni Budaya Melayu Riau. Kegiatan yang diinisiasi Anggota MPR yang juga Ketua Banggar MPR, Idris Laena, ini diselenggarakan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Peserta sosialisasi ini sebagian besar para seniman kenamaan di Riau.

Selain Idris Laena, hadir pula tiga anggota MPR yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran, yaitu Intsiawati Ayus (Kelompok DPD), Sadarestuwati (PDI Perjuangan), dan Eem Marhama Zulfa Hiz (PKB). Serta Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah; Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR, Maifrizal; dan Rharas Esthining Palupi, Kepala Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Sekretariat Badan Penganggaran, Biro Administrasi dan Pengawasan. □

JAZ



MENJADI camat adalah cita-cita yang ingin diraihny sewaktu kecil. Karena diusianya masih belia, saat itu, ia begitu kagum dan terpesona dengan penampilan seorang Pak Camat. Di matanya, camat itu begitu gagah dan berwibawa. Apalagi saat mengenakan setelan jas serba putih tatkala memimpin upacara bendera pada perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dengan lecana menempel di dada dan diikuti aparaturnya di bawahnya, Pak Camat terlihat begitu gagah dan juga berwibawa.

Apalagi, saat itu, pejabat tertinggi yang dikenalnya hanyalah Camat. Ia tidak pernah melihat, apalagi menyaksikan upacara yang diikuti Bupati, Gubernur, atau Presiden. Karena itulah, yang ada di dalam benaknya hanyalah Camat. Obsesi tersebut terus bergulir hingga ia beranjak remaja dan duduk di bangku SLTP.

Itulah sekelumit kisah masa kecil yang pernah dialami Ir. H. Muhammad Idris Laena, MH., yang kini menjabat Ketua Fraksi Golkar di MPR RI. Kisah tersebut tetap terjaga dan kerap membuat politisi

Ir. H. Muhammad Idris Laena, M.H.

Lincah Berlari Si Anak Pulau Kijang



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Partai Golkar ini kadang tersenyum bila mengenang masa kecilnya itu. Meski cita-cita ingin menjadi Camat itu menguap seiring perjalanan waktu, tetapi Idris tidak kecewa karena yang dia peroleh saat ini lebih besar dibanding dengan yang diangankan.

“Saya mengambil pelajaran dari orangtua saya, membangun silaturahmi itu sangat baik. Dulu Bapak menampung mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat melakukan KKN di desa saya. Ternyata mereka inilah yang kemudian mengajak saya belajar dan sekolah di Jakarta. Saya tidak tahu, jadi apa kalau tetap di kampung, karena sekolah yang ada di sana, saat itu, hanya sampai SLTP,” cerita Idris kepada Majalah *Majelis* saat menyambangi ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Menurut Idris, teman-teman masa kecilnya yang tetap tinggal di kampungnya, Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, semuanya menikah dan bekerja setelah lulus SMP. Karena itu, dia bersyukur bisa sekolah di SMA Negeri 15 Jakarta, dan mendapat gelar insinyur dari Universitas Trisakti Jakarta. Ia juga berterima kasih kepada mahasiswa IAIN Ciputat yang telah memberi wawasan serta mengajaknya ke Jakarta untuk meneruskan pendidikan.

Kalau tidak, menurut Idris, barangkali dia akan bernasib sama

seperti teman-temannya itu. Hanya bisa sekolah sampai SLTP, lalu bekerja kemudian menikah. Tidak bisa mengabdikan kepada masyarakat yang lebih luas, seperti yang dijalankannya sekarang, sebagai anggota legislatif.

Meski begitu, Idris Laena merasa bangga bisa menjadi bagian dari masyarakat Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Semasa duduk dibangku SD dan SLTP, ia bisa belajar dengan baik, tidak ada gangguan yang berarti. Tidak ada televisi, ataupun permainan yang bisa mengganggu waktu belajar. Bahkan, saat itu, ia bisa belajar di bangku sekolah dasar merangkap belajar di madrasah ibtidaiyah. Demikian juga saat di SLTP, Idris bisa belajar di bangku SMP dan sekaligus madrasah tsanawiyah sekaligus.

“Pagi saya belajar di sekolah umum, siang sampai sore belajar di sekolah agama, sedangkan malam hari belajar mengaji. Hari Jumat sekolah agama libur, sedangkan hari minggu sekolah umum yang libur, itu baru bisa kita manfaatkan untuk bermain. Jadi, jangan heran, bila saya bisa membaca Alquran dengan baik. Baik tajwid maupun tartilnya,” kata ayah empat anak kelahiran Riau 12 Januari 1965 ini.

Lahir di Indragiri Hilir, Riau, tetapi dalam diri Idris Laena mengalir darah Sulawesi. Kedua orangtuanya H. Lamek Taher dan Hj. Qurrotul Aena adalah pengungsi asal Sulawesi yang terdampar di Pulau



Kijang, karena di daerah asalnya berkecamuk pemberontakan DI/TII. Lamek Taher dan Qurrotul Aena sesungguhnya hendak melarikan diri dengan tujuan Johor Malaysia, namun salah arah sehingga terdampar di Pulau Kijang.

Mungkin ada yang bertanya dari mana asal kata Laena yang ada di belakang nama Muhammad Idris. Kata Laena itu merupakan gabungan nama orangtuanya, Lamek dan Aena. Penambahan kata Laena dimaksudkan untuk membedakan antara Muhamad Idris dan Muhammad Idris lainnya. Karena kebetulan saat itu ada beberapa teman sekelasnya juga bernama sama, Muhammad Idris.

“Dari pada di panggil Idris A, Idris B, dan seterusnya, Bapak kemudian menambahkan nama Laena. Nama itu diberikan untuk membedakan saya dengan Idris yang lain. Kini, Laena sudah menjadi nama fam, bahkan semua anak dan perusahaan saya memakai nama Laena di belakangnya,” tutur Idris.

Pakai Masker

Di saat sebagian orang khawatir menghadapi masa pandemi Covid-19, Idris Laena terlihat tetap tenang. Ia menjalankan tugas sebagaimana lazimnya. Memimpin rapat, ikut pertemuan, menerima tamu, dan menampung aspirasi masyarakat dilakukan sebagaimana biasa. Tetapi, semua itu dilaksanakan sembari mematuhi protokol kesehatan. Seperti, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta mengonsumsi makanan bergizi.

Idris menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan setengah hati dalam menghadapi corona. Mestinya, kata Idris, pemerintah melakukan kampanye penggunaan masker secara massal. Seperti kampanye peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada Agustus, dan diikuti hampir seluruh rakyat Indonesia.

“Lihatlah peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia beberapa waktu lalu, hampir semua gedung memasang spanduk bertuliskan: 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Bahkan, untuk mendapatkan logo peringatan, melalui proses yang tidak mudah. Begitu juga seharusnya kita menghadapi pandemi Covid-19,” harap Idris.

Pemerintah, kata Idris lebih lanjut, seharusnya melakukan upaya pencegahan jauh lebih besar dibanding pengobatan. Termasuk melakukan kampanye pencegahan corona secara besar-besaran,

seperti halnya pada acara tujuhbelasan. Karena upaya pencegahan memang lebih efisien daripada pengobatan.

Sayangnya, upaya pencegahan itu belum dilakukan pemerintah secara maksimal. Pemerintah kadang terlihat ragu-ragu mengambil keputusan dalam menghadapi corona ini. Seperti terjadinya penggantian istilah-istilah dalam menghadapi corona. Ada lockdown, PSBB, karantina hingga karantina lokal. Ada juga istilah physical distancing, lalu social distancing, kemudian menjadi jaga jarak.

“Memang, kasus ini belum ada contoh penanganannya. Tetapi dari awal kita tahu pentingnya masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Harusnya semua itu dikampanyekan secara besar-besaran, disertai sanksi bagi pelanggarnya. Karena penanganan seperti ini juga sudah dilakukan di Vietnam. Di sana ekonomi tetap bertumbuh, dan hanya satu korban meninggal akibat corona. Kuncinya, adalah pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak,” kata Idris.

Memang ada dilema, bagaimana ekonomi tetap tumbuh tetapi laju perkembangan corona bisa ditekan. Yang pasti, kehidupan ekonomi tidak bisa disepelekan. Karena orang lapar dan pengangguran bisa

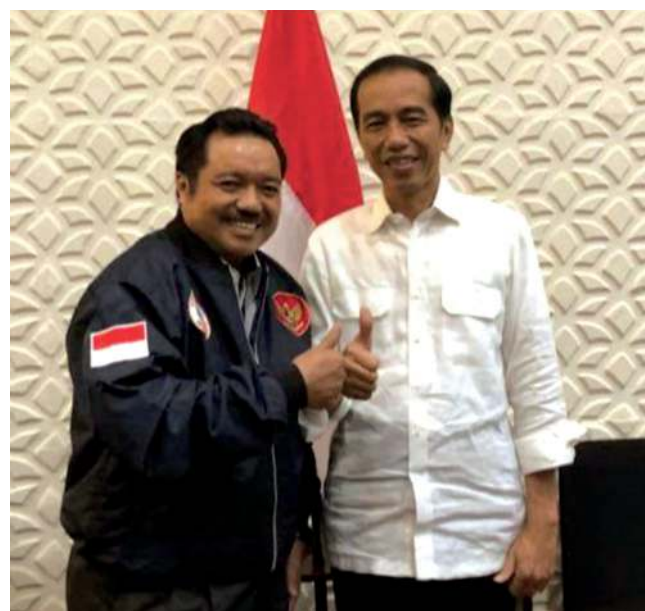


FOTO-FOTO: ISTIMEWA



menimbulkan persoalan sosial yang tidak dikehendaki. Tetapi, corona harus ditaklukkan. Caranya adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkan.

Pengganti Antar Waktu

Idris Laena adalah satu dari sedikit politikus yang menekankan pentingnya kemampuan finansial bagi semua orang yang hendak terjun ke kancah politik. Maksudnya, menjadi politisi itu harusnya sudah selesai dengan dirinya, dengan dunianya, dan dengan kebutuhan materinya. Kalau seorang politisi masih memikirkan kepentingan pribadi atau urusan dapurnya maka dia tidak bisa bekerja sepenuh hati. Mereka akan bermain dengan proyek, atau malah melakukan korupsi.

Karena itu, kalau masih ingin kaya atau mau mencari materi, menurut Idris, baiknya jangan dulu terjun ke politik. Kalau tidak, banyak hambatan yang akan ditemui diperjalanan. Karena alasan itu pulalah Idris Laena baru terjun ke dunia politik setelah kemampuan finansialnya mencukupi. Ia mengikuti ajakan bergabung dengan Partai Golkar pada 2000, sebagai Ketua Pokja UKM DPP Partai Golkar. Pada 2004 Idris Laena maju menjadi caleg DPR RI, namun tidak terpilih.

"Namun, saya jadi anggota DPR RI pada periode 2004-2009 melalui jalur Pengganti Antar Waktu. Saat itu perusahaan saya sudah

berkembang pesat, bahkan sudah melahirkan perusahaan yang lain. Mungkin ini terlalu ideal, tetapi sebaiknya memang begitu. Agar semua anggota dewan bisa bekerja dengan baik memperjuangkan aspirasi rakyat dengan baik," ungkap Idris Laena.

Sebagai politisi, Idris Laena berpendapat, model demokrasi di Indonesia harus terus diperbaiki. Apalagi, praktik politik uang dalam setiap kegiatan politik masih sangat terasa. Karena itu, hingga kini belum terpikir olehnya untuk ikut dalam kontestasi pilkada. Bukan karena tidak memiliki modal finansial, tetapi karena tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan untuk ikut bertarung dalam pilkada. "Kita bisa cari sponsor, tetapi di belakang hati mereka pasti akan menuntut imbalan. Sementara kalau kita pakai modal sendiri, rasanya terlalu besar, lebih baik dipakai buat usaha," katanya. □

MBO



Ir. H. Muhammad Idris Laena, MH.



Pendidikan

- SDN II Pulau Kijang Inhil, Riau lulus tahun 1977
- Madrasah Ibtidaiyah DDI, Pulau Kijang, Lulus tahun 1977
- SMPN 1 Pulau Kijang Inhil, Riau Lulus Tahun 1981
- SMAN 15 Jakarta lulus tahun 1984
- Fakultas Teknik dan perencanaan Universitas Trisakti

Karir

- 2002-2004 Dirut Laenaco Network MS & N BHD
- 2002-2004 Komisaris utama Laena Money Exchange
- 2002-2004 Komisaris Utama PT. LAENACO GROUP
- 2001-2004 Dirut Laenaco Network PTE. TD SG
- 2000-2004 Komisaris Utama PT. LAENACO UTAMA
- 1996-2004 Komisaris Utama PT. MLP
- 1992-1996 Direktur Utama PT. MBCM

Membangun Persatuan di Masa Pandemi Lewat Pemahaman Empat Pilar MPR RI

NEGARA ini telah tegak sempurna layaknya sebuah rumah. Pondasinya adalah Pancasila. Tiang pancangnya UUD '45. Atapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu terpatri nama rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. – Ir. Soekarno.

Itulah potongan pidato Bung Karno, Bapak Proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1963. Beliau dengan lantang meletakkan Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai ruh dalam membangun Negara Indonesia merdeka yang menjadi inspirasi lahirnya gerakan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang bertransformasi nama menjadi Empat Pilar MPR RI.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan. Mulai dari keunggulan geografis, keunggulan demografis, keunggulan sosial budaya, hingga keunggulan ideologis. NKRI tidak dibangun atas dua ideologi besar waktu itu, yakni liberal ala Amerika Serikat atau komunis ala Uni Soviet. NKRI dibangun atas ideologi yang digali dari bumi Indonesia bernama Pancasila yang dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kemajemukan sosial budaya yang dikristalisasi dalam bentuk nilai filsafat hidup Pancasila merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerohanian negara, dan sumber cita nasional. Ia juga sekaligus menjadi identitas dan integritas nasional yang diikat dalam satu ikatan bernama Bhinneka Tunggal Ika bermakna

berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

Ikatan tersebut yang menjadi filosofi lahirnya persatuan dan kesatuan. Perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan lingkungan tidak menyurutkan semangat persatuan dan kesatuan. Semangat inilah yang pernah digalang oleh para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dalam agenda Kongres Pemuda II yang melahirkan ikrar bersejarah bernama Sumpah Pemuda dan menjadi cikal bakal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah negara kesatuan (*unitary state*), sudah

selayaknya dipahami benar makna persatuan dan kesatuan tersebut. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi “*Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharm mangrwa*”, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua”. Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambang



negara Garuda Pancasila.

Informasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Pemuda ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bahwa kita pernah mencapai kejayaan. Informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia.

Persatuan di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 benar-benar memporak-porandakan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan

Oleh:
Dr. Syarifuddin Hasan, MM., MBA
Wakil Ketua MPR RI



Penanganan Covid-19 pada 5 September 2020 menunjukkan 188 ribu orang telah terinfeksi Covid-19 dan 7.832 diantaranya harus berpulang kepada sang khalik. Kasus harian positif terus menerus bertambah.

Tidak hanya di bidang kesehatan, Pandemi Covid-19 juga telah mengganggu sosial dan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pengangguran baru bertambah 3,05 juta selama Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesiapun berkontraksi ke minus 5,32% pada Kuartal II 2020 dan telah diprediksi akan minus kembali pada Kuartal III dan IV 2020. Sehingga, potensi terjadinya resesi semakin menganga.

Pemerintah pun telah mengambil banyak kebijakan. Mulai dari *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga yang terbaru Adaptasi Kehidupan Baru dengan penguatan protokoler kesehatan. Berbagai kebijakan ini dikeluarkan mengingat Covid-19 bukan hanya menjadi ancaman bagi individu melainkan masyarakat secara luas.

Tentu, dalam menanggulangi Pandemi Covid-19, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan tim medis semata. Perlu sinergi dan kerjasama antarsemua lapisan masyarakat. Masyarakat sebagai bagian peting dalam lapisan perang melawan wabah ini harus pro-aktif. Inilah saatnya aksi nyata dan persatuan kembali hadir dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, Empat Pilar MPR RI yang merupakan gerakan penanaman Pancasila sebagai ruh bernegara secara horizontal dan vertikal sudah selayaknya dijadikan sebagai rujukan bersama di masa Pandemi. Pancasila adalah jalan tengah dalam perang melawan Pandemi. Ada sisi progresivitas dan kekuatan transendental. Bahwa melawan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama dengan tetap percaya bahwa Pandemi ini merupakan cobaan

penguat dari Sang Pencipta untuk bangsa Indonesia.

Sikap persatuan, gotong royong, kemanusiaan, kepedulian sosial yang dihadirkan lewat pemahaman Pancasila adalah modal besar dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemberian pemahaman Empat Pilar MPR RI adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa di tengah ujian besar kepada bangsa ini, kita masih punya pegangan bersama. Pegangan ini telah tercatat dalam sejarah berhasil menjadikan bangsa ini keluar dari berbagai ujian zaman.

Untuk mengimplementasikan Empat Pilar tersebut banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah Pandemi. Di antaranya, menempatkan makna persatuan dengan tidak saling menyalahkan antargolongan atas hadirnya Covid-19. Tidak menyebarkan berita *hoax* yang mampu menimbulkan perpecahan. Serta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang telah berupaya melindungi bangsa Indonesia dari Covid-19, baik dukungan sebagai mitra strategis maupun mitra kritis.

Persatuan yang lahir dari pemahaman Empat Pilar yang baik dapat hadir sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tetap harus bekerjasama dalam situasi seperti apapun. Pandemi Covid-19 merupakan kewajiban bersama bangsa Indonesia agar kita mampu memulihkan negara untuk menjalankan kehidupan dan kegiatan bernegara kembali.

Kunci dalam menghadapi suatu masalah pada hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antargolongan. Menyalahkan pemerintah tanpa mengikuti anjuran dari pemerintah tentu bukan salah satu bagian dan jiwa kepribadian dari bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. □

Sejarah **Membuktikan** Kita Bangsa Toleran

Kata-kata toleran saat ini sering disebut orang. Hal demikian kerap muncul sebab banyak peristiwa yang dikatakan tidak intoleran. Dalam buku *Meluhurkan Kemanusiaan*, tercatat bangsa ini memiliki dasar sikap toleransi yang kuat.

UNGKAPAN mengajak kepada semua untuk menerapkan nilai-nilai luhur para pendahulu bangsa kerap diucapkan oleh pejabat negara dan tokoh masyarakat. Biasanya ucapan yang demikian disampaikan pada pertemuan-pertemuan formal di awal sambutan atau pidato. “Marilah kita sebagai bangsa Indonesia terus menerapkan nilai-nilai luhur para pendahulu”, demikian kalimat yang sering diucapkan seorang pejabat di awal pertemuan dengan masyarakat.

Penting untuk menerapkan nilai-nilai luhur, sebab di sana ada norma, panduan, dan tata cara kehidupan antarmanusia dalam bermasyarakat sehingga tertata perilaku yang harmoni, toleransi, saling menghargai, serta menghormati.

Bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai luhur, bisa kita baca dan simak dibanyak buku. Kupasan mengenai nilai-nilai luhur sudah banyak ditulis oleh para pakar dan filsuf sejak dulu kala. Salah satu buku yang mengupas masalah itu adalah buku berjudul: *Meluhurkan Kemanusiaan*. Buku ini diterbitkan oleh *Penerbit Buku Kompas*. Buku ini memiliki ketebalan xiv + 274 hlm. Di dalamnya berisi kumpulan esai dengan para penulis Franz Magnis Suseno, Karlina Supelli, Novita Dewi, Al Andang L. Binawan, J. Sudarminta, Wawan Setyadi, serta beberapa pakar di bidangnya.

Dalam esai yang berjudul *Toleransi dan Budi Luhur*, Franz Magnis menulis bahwa kemampuan untuk bertoleransi penting. Namun, sering kali kita mendengar bahwa toleransi saja masih sikap yang cukup terbatas, bahwa yang perlu adalah lebih dari sekadar bertoleransi. Toleransi dianggap sekadar membiarkan saja, belum suatu sikap yang betul-betul positif – seperti misalnya saling menghargai.

Terhadap hal yang demikian, Franz Magnis dalam tulisannya menyebut, “Ya, sudah lumayan” sekali kalau orang betul-betul bersedia membiarkan mereka yang hidup, membawa diri, dan berpikir berbeda. Hanya masyarakat yang tidak lagi primordial-naif mampu bertoleransi. Jadi, sekadar membiarkan mereka yang berbeda juga sudah merupakan suatu keutamaan sungguh-sungguh. Hal mana bisa dikonfirmasi oleh siapa saja yang pernah hidup dalam

masyarakat yang tidak memiliki keutamaan itu.

Lebih lanjut dalam paparan, Franz Magnis menyebut, bersikap toleran tidak lain menunjukkan kemampuan untuk menerima suatu fakta paling dasar kemanusiaan bahwa kita hidup bersama orang lain. Kita tidak hidup sendiri. Dari sinilah ia mengatakan, toleransi berarti kita tidak lagi merasa diganggu oleh keberlainan mereka, kita menjadi mampu untuk menerima mereka sebagai mereka, bukan hanya sebagai sarana keamanan dan keuntungan sendiri.

Dalam buku ini, Franz Magnis menyebut toleransi di Indonesia masih tinggi. Ada tiga kunci dalam sejarah di mana toleransi yang ada

membuktikan diri secara cemerlang. Dua dari tiga toleransi yang membuktikan diri secara cemerlang adalah: *pertama*, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dalam Kongres II Pemuda, pemuda dari Jawa yang mayoritas tidak menuntut didahulukan. Pun demikian mayoritas pemuda dalam kongres itu beragama Islam, namun mereka tidak menuntut Islam diberi kedudukan istimewa. *Kedua*, pada 18 Agustus 1945, dalam penetapan UUD Tahun 1945, meski umat Islam mayoritas namun mereka tidak meminta kedudukan istimewa dalam UUD. Pun demikian dalam dasar negara Pancasila, tokoh-tokoh golongan nasionalis Islam rela menghapus 7 kata dari Pancasila yang sudah ditetapkan pada 22 Juni 1945.

J. Sudarminta dalam esai berjudul: *Agama, Ruang Publik, dan Tantangan Era Pasca – Kebenaran*, mengatakan bahwasanya or-

ang melakukan kebohongan publik memang sudah lama terjadi di dunia. Namun, kenyataan bahwa kebohongan publik itu begitu cepat dan meluas tersebar serta amat memengaruhi terbentuknya opini publik memang merupakan gejala yang sulit dilepaskan dari revolusi teknologi digital belakangan ini. Dengan gawai di tangan, orang dalam waktu singkat dapat mengakses berbagai informasi yang tersedia di internet. Dalam beragam media sosial, banjir ribuan informasi dan berita, baik dalam bentuk tulisan, foto, gambar meme, yang sering kali sulit disaring mana yang benar dan mana yang salah, mana yang membantu dan mana yang sesungguhnya merusak. □

AWG

